



PERANAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENANGKAL SIKAP DAN PERILAKU RADIKALISME SANTERI DI PONDOK PESANTREN AL-MIZAN MAJALENGKA

**Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M. Si
Dr. Yayah Nurhidayah, M. Si**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019**

**PERANAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
DALAM MENANGKAL SIKAP DAN PERILAKU RADIKALISME
SANTERI DI PONDOK PESANTREN AL-MIZAN MAJALENGKA**

Oleh:

Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

**PERANAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
DALAM MENANGKAL SIKAP DAN PERILAKU RADIKALISME
SANTERI DI PONDOK PESANTREN AL-MIZAN MAJALENGKA**

Penulis :

Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si.

ISBN 978-623-94414-6-3

Diterbitkan oleh :

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

Jln.Perjuangan ByPass Karya Mulya, Kec.Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat
45132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin dari penulis.

©2019

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti : Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si.

Judul Penelitian : Peranan Pendidikan Multikultural dalam Menangkal Sikap & Perilaku Radikalisme Santeri di Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri, benar keasliannya, bukan skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di kemudian hari karya ini terbukti merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab sekaligus menerima sanksi sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku termasuk mengembalikan seluruh dana yang telah saya terima kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan.

Cirebon, 15 Desember 2019
Peneliti,

Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
NIP. 19591213 198603 2 001

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH AKADEMIK HASIL PENELITIAN DOSEN

Judul Penelitian : Peranan Pendidikan Multikultural dalam Menangkal Sikap dan Perilaku Radikalisme Santeri di Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka – Jawa Barat

Klaster Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner

Ketua Peneliti :

Nama Lengkap : Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.

Jenis Kelamin : Perempuan

NIDN : 2013125901

Disiplin Ilmu : Psikologi Pendidikan

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IV d

Jabatan : Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana (S3)/PAI

Alamat Rumah : Jln. Kandang Perahu no 27 RT 01 RW 11 Karya Mulya – Cirebon

E-mail : etinurhayati@syekhnurjati.ac.id

Jumlah Anggota Peneliti : 2 (dua) orang

Nama Anggota 1 : Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.

Nama Anggota 2 : Dr. Yayah Nurhidayah, M.Si.

Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka

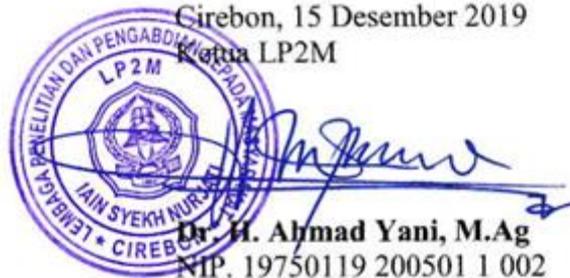
Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan

Sumber Dana Penelitian : DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019

Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000

Cirebon, 15 Desember 2019

Ketua LP2M



Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag
NIP. 19750119 200501 1 002

ABSTRAK

Menjadi radikal tampaknya merupakan sebuah tren baru di kalangan remaja, karena memiliki pemikiran, sikap, dan perilaku radikal dianggap keren, gagah, berani, kritis, dinamis, berjiwa muda, dan energik. Pendidikan multikultural di pondok pesantren dipandang efektif menangkal sikap dan perilaku radikal. Pondok pesantren Al-Mizan dipilih sebagai objek penelitian karena telah menerapkan Pendidikan Multikultural.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran: (1) seting sosial pondok pesantren, (2) pelaksanaan pendidikan multikultural, (3) sikap dan perilaku santri di pondok pesantren, (4) internalisasi pendidikan multikultural santri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan FGD, dan teknik analisis data secara kualitatif dalam bentuk narasi.

Kesimpulan penelitian: (1) Seting sosial pondok pesantren Al-Mizan Jatiwangi – Majalengka, didirikan tahun 1999 oleh H. Ahmad Fauzi beserta keluarga H. Kosim Faozan dan Hj. Umi Kulsum sebagai muwakif. Nama Al-Mizan terinspirasi dari QS. Al-Rahman [55]:9) yang mengandung nilai keadilan dan menolak kehancuran. Di bidang pendidikan formal mengelola: TK Islam, SDIT, M.Ts., SMA Islam, SMK; Di pendidikan non formal mengelola pondok pesantren, DTA, PKBM, BLK, dan SMA Terbuka; Di pendidikan informal mengelola KALAMI, BASTOH, AEC, dan tahfidz al-Qur'an. Di bidang da'wah sosial mengelola DKM, MT, Paguyuban Shalawat Akar Jati, LKSA, RPA, dan LAZIS. Di bidang Ekonomi, mengelola Mizan Mart, KOPONTREN, Bank Mini Syariah, dan Tour & Travel Al-Mizan. (2) Pendidikan Multikultural di pondok pesantren Al-Mizan mencakup empat bentuk, yaitu: *Suluk Mizani*, identitas pondok pesantren, profil pengasuh, pengajaran kitab kuning. (3) Sikap dan perilaku santri di lingkungan pondok pesantren hampir tidak ada yang memiliki sikap dan perilaku fanatis terhadap satu pendapat, tanpa mengakui pendapat lain; mewajibkan orang lain melaksanakan yang bukan kewajibannya; keras dan kasar yang tidak beralasan, dan menganggap kafir (musuh) kepada orang lain yang tidak sepaham. (4) Internalisasi Pendidikan Multikultural santri untuk menangkal sikap radikalisme melalui *manhaj al-fikr*, pengajaran kitab, dan figure ideal sebagai internalisasi *multicultural knowledge*, dan untuk

menangkal perilaku radikalisme melalui *manhaj al-haraki* dan kegiatan keagamaan, sebagai internalisasi *multicultural action/habituatation*.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Radikalisme, Pondok Pesantren.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas Rahmat dan perkenan Allah kami telah selesai melakukan penelitian tahun 2019 ini, yang berjudul “Peranan Pendidikan Multikultural dalam menangkal Sikap dan perilaku Radikalisme santeri di Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka – Jawa Barat”. Berkenaan dengan hal itu, kami patut menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Sumanta, M.Ag., yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian tahun 2019 dengan biaya dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag., yang telah memberi kesempatan penelitian tahun 2019 dengan biaya dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Ketua Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Budi Manfaat, M.Pd., yang telah memfasilitasi kami dalam melakukan penelitian ini, dari mulai proses awal sampai akhir.
4. Para Pengasuh Yayasan Al-Mizan, K.H. Mas Zaenal Muhyidin, H. Zaenal Arifin, yang telah menerima kami untuk melakukan penelitian di pondok pesantren Al-Mizan dan telah banyak membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh kami, dan terutama atas kesediaannya sebagai narasumber dalam kegiatan FGD.
5. Ustadz Ade Duryaman, Ustadz Amir Hamzah, dan semua Pengurus Yayasan Al-Mizan, yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu memberi informasi dan data yang dibutuhkan oleh kami.

6. Para santeri putera dan puteri yang telah terlibat dalam pengumpulan data dan FGD penelitian.

Atas semua kebaikan dan bantuan dari para pihak tersebut di atas untuk kelancaran penelitian ini, kami tidak mungkin dapat membalasnya, kecuali ucapan terima kasih, seraya berharap kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat, terutama untuk mencapai kemajuan pendidikan, khususnya Pendidikan Multikultural di pondok pesantren Al-Mizan dalam mengusung moto perjuangan “Al-Mizan untuk Keadilan dan Harmoni”.

Penelitian ini telah kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan telah kami upayakan sebaik mungkin hasilnya, namun dalam realitasnya, inilah adanya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca akan kami jadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Cirebon, 15 Desember 2019
Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Relevansi dengan Penelitian Terdahulu.....	6
BAB II.....	11
KAJIAN TEORETIS	11
A. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	11
1. Makna Pendidikan Multikultural	11
2. Sejarah Pendidikan Multikultural	31
3. Urgensi Pendidikan Multikultural.....	44
4. Karakteristik Pendidikan Multikultural	49
5. Pendidikan Islam Multikultural	54
B. RADIKALISME.....	58
1. Makna Radikalisme	58
2. Ciri Radikalisme	63

3. Islam dan Radikalisme	65
C. PONDOK PESANTREN	69
1. Makna Pondok Pesantren.....	69
BAB III	79
METODOLOGI PENELITIAN.....	79
A. Metode Penelitian	79
B. Responden Penelitian.....	82
C. Teknik Pengumpulan Data.....	82
D. Teknik Analisis Data.....	84
E. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	86
BAB IV	89
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Seting Sosial Pondok Pesantren Al-Mizan	89
B. Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Al-Mizan.....	107
C. Sikap dan Perilaku Santeri Pondok Pesantren Al-Mizan.....	129
D. Internalisasi Santeri terhadap Pendidikan Multikultural.....	140
BAB V	149
SIMPULAN DAN SARAN.....	149
A. Simpulan	149
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
BIODATA TIM PENELITI.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menjadi radikal tampaknya merupakan sebuah tren baru di kalangan remaja, karena memiliki pemikiran radikal dan terlibat dalam tindakan radikal dianggap sebagai gaya yang keren, gagah, berani, kritis, dinamis, dan berjiwa muda yang masih energik. Anggapan demikian dengan sengaja dipopulerkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang disebabkan oleh rasa ketidak-puasan, ketidak-adilan, kesenjangan yang dialami dalam kehidupan dan menyaksikan berbagai peristiwa dan kondisi yang dipandanginya tidak tepat, dalam rangka mempengaruhi dan merekrut sasaran kaum remaja milenial melalui berbagai cara, terutama melalui media sosial.

Di samping itu, tidak terbantahkan bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultur dilihat dari segi ras, etnis, budaya, agama, dan bahasa, sehingga berkonsekuensi memiliki banyak problem eksistensi sosial, etnik, dan kelompok keagamaan yang beragam. Menurut Musa Asy'ari (2004), penyebab problem itu karena adanya pengelolaan yang kurang baik terhadap multi etnik, multi budaya, dan multi agama yang ada di Indonesia.

Di sisi yang lain, globalisasi telah membuat hubungan antar manusia di dunia semakin dekat, tetapi tidak otomatis membuat mereka saling akrab dan saling menghormati, bahkan yang terjadi di beberapa tempat muncul konflik, perselisihan, dan peperangan. Hal ini karena globalisasi memungkinkan perjumpaan yang makin intens antar berbagai perbedaan itu dengan alat komunikasi modern. Dengan makin mudahnya komunikasi, semua perbedaan itu bercampur aduk, bertemu, dan berseteru. Tingginya mobilitas manusia, membuat manusia yang berlatar belakang budaya, etnis, dan agama yang berbeda berjumpa dan bergaul dalam satu kota. Hal ini jika tidak dikelola dengan baik, dapat membawa petaka dan konflik yang berbahaya. Globalisasi juga telah melahirkan isu-isu baru dalam hubungan

internasional seperti: hak azasi manusia, intervene kemanusiaan, demokrasi, terorisme, dan radikalisme.

Dalam konstelasi kehidupan semacam itu, konflik menjadi sesuatu yang kian mudah terjadi. Deretan peristiwa yang telah terjadi di Indonesia seperti: tawuran antar pelajar, tawuran antar etnis, teror, pengeboman, serta pembunuhan dengan berbagai latar belakang. Cukup banyak peristiwa yang dapat dijadikan contoh nyata, dari mulai skala kecil sampai skala besar, bagaimana keragaman telah menjadi bencana yang tragis dan memilukan. Bagaimana mungkin orang dapat menghancurkan dan membunuh mereka yang berbeda karena sentimen ras, suku, agama, atau afiliasi politik, bahkan hanya karena perbedaan sosok idola di bidang olah raga atau sepak bola. Beragam peristiwa konflik di Indonesia itu memunculkan beragam upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun akademisi, untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya fenomena konflik, mencari solusi meminimalisir konflik, dan membangun kesadaran masyarakat tentang keragaman. Tumbuhnya kesadaran atas fakta keragaman budaya (multikultur) ini diharapkan dapat melahirkan sikap toleran dan memandang mereka yang berbeda sebagai mitra yang harus dihormati dan dihargai, bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan.

Santeri merupakan kelompok remaja yang rentan memperoleh pengaruh radikalisme akibat dari perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang super cepat, karena perkembangan kognitif mereka belum matang, sehingga sering berpikir dan bertindak tanpa perhitungan yang matang. Menurut Erikson (2010), usia remaja sedang mengalami masa pencarian identitas diri (*identity formation*). Dalam masa tersebut, mereka aktif meniru sikap dan perilaku orang lain yang dipandanginya menggambarkan semangat keremajaan, hebat, energik, dan heroik, sehingga tindakan mengkritik, mendemo, dan memprotes, bahkan kalau perlu dengan cara-cara yang radikal adalah merupakan trend kaum remaja masa kini. Remaja yang pasif dan eksklusif dipandang sebagai pengecut dan tidak menarik, serta tidak diakui eksistensinya.

Kasus-kasus radikalisme yang terjadi di beberapa daerah, yang melibatkan oknum pelaku yang diidentifikasi memiliki kaitan dengan Islam, tokoh dan santeri dari pondok pesantren, itu telah mencoreng nama Islam dan khususnya pondok pesantren. Padahal pondok pesantren idealnya sebagai pusat penanaman nilai-nilai luhur (*akhlaq al-karimah*), bukan tempat sarang teroris, radikal, intoleran, eksklusif, ortodok, kampungan, dan lainnya. Stigma negatif tersebut tentu perlu diluruskan. Salah satu upaya untuk menghapus stigma tersebut adalah dengan memberikan Pendidikan Multikultural di pondok pesantren, agar para santeri memiliki wawasan multikultur dan diinternalisasikan sehingga dapat menangkal sikap dan perilaku radikalisme.

Menurut Ngainun dan Achmad Sauqi (2017), pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif, sebab pendidikan bersifat sistemik, dengan penyebaran cukup merata. Lembaga pendidikan dengan berbagai tingkatan telah tersebar meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Dunia pendidikan dipandang efektif mengatasi konflik dan mengajarkan kesadaran akan keragaman. Masalahnya, di dunia pendidikan sendiri juga sarat dengan problem, seperti: kualitas lulusan dan tingkat kompetensi lulusan yang berbeda dan makin menurun dibandingkan di negara-negara lain. Kondisi ini tidak berbeda dengan pendidikan di lembaga-lembaga agama dan pondok pesantren, misalnya: model pembelajaran yang cenderung dogmatis, kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, metode pembelajaran yang lebih didominasi pemahaman yang tekstual, ajaran agama yang dogmatis dan eksklusif. Implikasinya, mereka cenderung melihat perbedaan, terutama dalam perbedaan agama, sebagai yang harus dikalahkan.

Pondok pesantren Al-Mizan berlokasi di Jatiwangi kabupaten Majalengka adalah salah satu pondok pesantren tradisional yang dipilih sebagai objek dalam studi ini didasarkan pada suatu fakta bahwa al-Mizan telah menerapkan Pendidikan Multikultural kepada para

santerinya. K.H. Maman Imanul Haq, salah seorang Kyai utama di pondok pesantren itu, telah dikenal masyarakat Indonesia sebagai tokoh muslim yang pluralistik, egaliter, dan pejuang penegakan HAM, dan populer ketika terjadi penyerangan terhadap kelompok aliran Ahmadiyah di depan monument nasional Jakarta. K.H. Maman Imanul Haq membela aliran Ahmadiyah bukan dilatar belakangi oleh kesamaan aliran yang dianutnya, namun didasarkan faham bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sebagai makhluk dan hamba Tuhan, betapapun berbeda aliran bahkan agama sekalipun. Pemahaman K.H. Maman Imanul Haq yang pluralistik, egaliter, dan multiculturalist itu selalu ditanamkan kepada para santerinya, dan menjadi ciri tersendiri bagi pondok pesantren yang dipimpinya. Hal itu seperti tercermin dari perilaku keseharian santeri di pondok pesantren tersebut sangat tertib, damai, saling menghormati, dan toleran. Fakta lain adalah tercermin dari visi dan misi pondok pesantren, seperti dijelaskan K.H. Maman Imanul Haq berikut:

Pondok pesantren Al-Mizan adalah lembaga pendidikan dan pengajaran yang memadukan ilmu agama dan umum guna mencetak insan yang religius, intelektual, mandiri, nasionalis, dan berwawasan global. Visi pondok pesantren ini adalah "Tauhid kesetaraan". Dari spirit Tauhid kesetaraan ini, akan melahirkan spirit Islam yang berorientasi kepada perdamaian, anti kekerasan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Islam damai dan toleran yang memberikan kesejukan kepada siapapun. Pondok pesantren ini di samping membawa kemaslahatan secara individual, kesetaraan Tauhid, akan mendorong pula pada terbentuknya kemaslahatan sosial, sebuah tatanan masyarakat yang bermoral, santun, manusiawi, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, kezaliman, dan penindasan".

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang *Peranan Pendidikan Multikultural dalam Menangkal Sikap dan Perilaku Radikalisme di Pondok pesantren Al Mizan Majalengka*". Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau *role model* untuk pondok pesantren lain di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat mengajukan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah setting sosial pondok pesantren Al-Mizan yang telah mengimplementasikan Pendidikan Multikultural?
2. Bagaimanakah Pendidikan Multikultural itu diimplementasikan di pondok pesantren Al-Mizan?
3. Bagaimanakah sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian di lingkungan pondok pesantren Al-Mizan?
4. Bagaimanakah santri menginternalisasi Pendidikan Multikultural sehingga sikap dan perilakunya terindikasi anti radikal?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran objektif setting sosial pondok pesantren Al-Mizan Majalengka
2. Menggali informasi pelaksanaan Pendidikan Multikultural di pondok pesantren Al-Mizan Majalengka
3. Mengidentifikasi sikap dan perilaku santri di pondok pesantren.
4. Menemukan cara santri menginternalisasi Pendidikan Multikultural sehingga sikap dan perilakunya terindikasi anti radikal.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah pengetahuan tentang Pendidikan Multikultural di pondok pesantren, baik dari sisi materi, metode, kurikulum, prinsip, dan azas pembelajaran.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan model Pendidikan Multikultural di pondok pesantren lainnya.

E. Relevansi dengan Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Mohammad Bahrul Ulum (2017) berjudul *Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan dan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik*. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Nilai-nilai pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren Al-Ishlah di Lamongan dan Qomaruddin di Gresik sarat dengan nilai-nilai Pendidikan Multikultural, yaitu: nilai toleransi, demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. (2) Implementasi penanaman nilai-nilai Pendidikan Multikultural di dua pondok pesantren tersebut terpolakan menjadi dua, yaitu *multicultural knowing* dan *multicultural feeling*, yang diberikan melalui kegiatan keseharian, seperti: disiplin dalam shalat berjamaah, disiplin masuk kelas, disiplin berpakaian, disiplin berbahasa, disiplin bermukim di asrama, disiplin belajar dan membaca, disiplin waktu dan disiplin berolahraga. (3) Penanaman nilai-nilai Pendidikan Multikultural di kedua pondok itu memberikan dampak positif terhadap sikap santri dalam hidup rukun tanpa konflik berarti.

Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah bahwa Pendidikan Multikultural berdampak positif terhadap sikap santeri dalam hidup rukun tanpa konflik, meskipun Bahrul Ulum tidak menyebutkan sebagai anti radikal. Perbedaan dengan penelitian penulis berusaha dapat mendeskripsikan Pendidikan Multikultural ala pondok pesantren Al-Mizan, mengidentifikasi sikap dan perilaku santeri yang anti radikal, dan menemukan bagaimana santeri menginternalisasi Pendidikan Multikultur.

Kedua, penelitian Windu Tias Kurniawan (2017) berjudul *Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di Pesantren Miftahus Salam Banyumas*. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Nilai-nilai Pendidikan Multikultural yang diterapkan di pondok pesantren ini melalui kegiatan keseharian santeri; (2) Nilai-nilai Pendidikan Multikultural meliputi:

demokrasi, keadilan, kesetaraan, keragaman, kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; (3) Keberhasilan nilai multikultural tersebut dibuktikan dengan kegiatan yang menghargai keragaman, misalnya: *home even*, malam apresiasi santeri, pemilihan pengurus ikatan santeri, dan lain-lain; (4) Faktor keberhasilan itu didukung oleh visi dan misi pesantren yang berorientasi pada *akhlaq al-karimah*.

Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah pada objek Pendidikan Multikultural di pondok pesantren. Perbedaannya, penelitian Windu Tias Kurniawan lebih fokus untuk mengidentifikasi nilai-nilai multikultural, kegiatan pondok pesantren yang mengandung nilai multikultural, dan faktor keberhasilan penerapan Pendidikan Multikultural, sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan untuk mengidentifikasi sikap dan perilaku radikal dan cara santeri menginternalisasi Pendidikan Multikultur, di samping menjelaskan pelaksanaan Pendidikan Multikultural ala pondok pesantren Al-Mizan.

Ketiga, penelitian Rif'atul Mahfudhoh dan Mohammad Yahya Ashari (2015) berjudul *Multikulturalisme Pesantren di antara Pendidikan Tradisional dan Modern*. Jenis penelitian kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan, pondok pesantren mempunyai potensi multikultural yang tinggi yang terletak pada sikap *egalitarian*, *flexible* dan *inclusive*, walaupun kurikulumnya tidak mau beranjak dari pola klasik dengan hanya mengkaji kitab kuning.

Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah pada objek Pendidikan Multikultural di pondok pesantren. Perbedaannya, penelitian Rif'atul Mahfudhoh dan Mohammad Yahya Ashari tampaknya ambigu, di satu sisi kehidupan di pondok pesantren berpotensi mengandung multikultur, namun di sisi lain pondok pesantren tersebut belum peka terhadap fakta keberagaman, bahkan disinyalir masih *conservative*, *defensive*, dan memegang *absolute truth*. Penelitian penulis meski mengakui bahwa kehidupan di pondok pesantren berpotensi tinggi mengandung keberagaman, namun di pondok pesantren yang penulis teliti justru sangat memperhatikan dan sudah menerapkan Pendidikan Multikultural.

Keempat, penelitian Akhmad Satori (2014) berjudul *Model Pendidikan Multikultural pada Pesantren Tradisional di Kota Tasikmalaya dalam Mencegah Ancaman Radikalisme*. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Pola internalisasi tradisi di pondok pesantren sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Ahl Sunnah wa al-Jamaah (ASWAJA), seperti prinsip *tawasut*, *tasammuh*, *ta'adul* selalu ditanamkan di pondok pesantren maupun Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di lingkungannya. (2) Pola transformasi Pendidikan Multikultural di pondok pesantren secara bertahap: Tahap pertama, memberi pengetahuan nahwu, sharaf, balaghah sebagai ilmu alat untuk dapat membaca dan memahami ilmu agama yang lebih mendalam; Tahap kedua, memberi ilmu ushul fiqh, al-Qur'an, dan al-Hadits. (3) Respon dan penerimaan terhadap ajaran baru di pondok pesantren selalu dilakukan melalui metode diskusi dan tanya jawab, terutama dalam pengajian *bahts al-masail*.

Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah pada objek Pendidikan Multikultural di pondok pesantren untuk menangkal radikalisme. Perbedaannya, penelitian Akhmad Satori menyusun Model Pendidikan Multikultural di Pesantren Tradisional Tasikmalaya dengan pola internalisasi tradisi ASWAJA dan pola transformasi melalui dua tahap yaitu dengan ilmu alat seperti nahwu, sharaf, dan balaghah, serta ushul fiqh, al-Qur'an, dan al-Hadits, serta dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, terutama dalam *bahts al-masail*. Tampaknya, Model Pendidikan Multikultur yang dikembangkan oleh Akhmad Satori bersifat *integrated curriculum*. Penelitian penulis berusaha untuk mempelajari tentang (1) Setting sosial Pondok Pesantren Al-Mizan yang telah menerapkan Pendidikan Multikultural; (2) Pelaksanaan Pendidikan Multikultur ala pondok pesantren tersebut, (3) Sikap dan perilaku anti radikal santeri yang ditunjukkan dalam kehidupan keseharian di lingkungan pondok pesantren tersebut, dan (4) internalisasi santeri terhadap Pendidikan Multikultural.

Kelima, penelitian Abdullah Ali (2011) berjudul *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Modern Al-Salam Surakarta*. Jenis

penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menemukan nilai dasar dari kurikulum pendidikan di Al-Salaam adalah kemajemukan, yaitu pendidikan multikultural yang menembus sekat-sekat perbedaan. Sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh civitas akademika Al-Salam. Kurikulum dan mata pelajaran mempunyai misi yang sama dengan pondok pesantren lainnya dalam memajukan Pendidikan multikultural.

Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah pada objek Pendidikan Multikultural di pondok pesantren, serta kurikulum dan mata pelajaran di pondok dan sekolah mengandung misi yang sama dalam menekankan pada Pendidikan Multikultural. Perbedaannya, penelitian Abdullah Ali di pondok pesantren modern dan lebih fokus pada kurikulum pendidikannya, sedangkan penelitian penulis berusaha memotret sikap dan perilaku anti radikal yang ditunjukkan santeri dalam kehidupan keseharian di lingkungan pondok pesantren dan mencari tahu bagaimana cara santeri menginternalisasi Pendidikan Multikultur sehingga sikap dan perilakunya anti radikal.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

1. Makna Pendidikan Multikultural

a. Pengertian Multikultural dan Multikulturalisme

Wacana multikulturalisme makin populer di era globalisasi, disebabkan munculnya gelombang globalisasi yang ditandai kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal budaya. Budaya-budaya manusia di seluruh dunia menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain melalui teknologi informasi dan komunikasi (internet), sehingga budaya dari suatu negara tidak hanya menjadi bagian dari negara yang bersangkutan, tetapi saat ini sudah menjadi bagian dari budaya negara-negara lain. Minimalnya, budaya dari berbagai negara sudah menjadi pengetahuan bersama. Menurut Purwasito (2003:136) “teknologi telekomunikasi dan informasi telah mengubah dunia yang terpisah-pisah menjadi kampung global. Dalam perubahan global tersebut, masyarakat yang terpisah dalam batas-batas geografis telah hancur (*borderless*), batas kebangsaan telah mati, kecuali terintegrasi dalam kehidupan global yang multikultural”.

Michel Benedict (dalam HAR.Tilaar, 2004:72) dengan tegas menyatakan, arus multikulturalisme bergerak sangat cepat seiring dengan munculnya gelombang globalisasi yang melanda dunia. Globalisasi yang dipicu oleh teknologi informasi telah melahirkan dunia nyata dan dunia maya (*cyber culture*). Dunia nyata semakin sempit karena ditembus oleh teknologi komunikasi, sedangkan dunia maya yang diciptakan oleh komputer dan teknologi informasi berkembang semakin luas, sehingga tidak dapat menghindari dari lahirnya multikulturalisme di dunia saat ini. Melalui dunia nyata yang semakin sempit dan dunia maya yang luas melahirkan berbagai jenis fantasi manusia. Umat manusia dewasa ini bukan hanya mengenal

budayanya sendiri, tetapi juga mengenal budaya-budaya lain di segala penjuru dunia.

Multikulturalisme bukan hanya pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia, tetapi juga merupakan tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut, sehingga ada yang beranggapan multikulturalisme merupakan arus balik dari gelombang globalisasi. Bahkan globalisasi juga memiliki kecenderungan melahirkan monokulturalisme akibat imperialisme Barat (HAR Tilaar, 2004:74).

Menurut Ngainun dan Syauqi (2017 : 48) mengutip pendapat Adnan Aslan, kata pluralis dan multikultural saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat secara luas. Kemunculan kedua istilah ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan dunia yang makin mengglobal. Pluralis dan multikultural dengan berbagai varian penggunaannya menjadi isu global yang memaksa setiap komunitas untuk menerimanya dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kecenderungan arus utama globalisasi.

Istilah multikultural sendiri berasal dari dua kata, multi artinya banyak, beraneka ragam, atau bermacam-macam, cultural artinya budaya. Multikultural adalah banyak budaya, atau beranekaragam budaya. Sedangkan secara istilah kultur memiliki banyak pengertian, sebagaimana diungkapkan para ahli, antara lain: E.B Taylor dalam Ensiklopedia menjelaskan, “kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. L.H Morgan (dalam Ngainun Naim & Syauqi (2017:119) mendefinisikan kultur sebagai sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Emile Durkheim dan Marcel Maus menjelaskan, kultur adalah sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat di dalam sebuah masyarakat untuk diterapkan. A.R. Radcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski menyebutkan, kultur sebagai sebuah praktek sosial yang memberikan support

terhadap struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individunya. Koentjaraningrat (2003 : 72) mendefinisikan, kultur atau kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian kultur sangat beragam yang dikemukakan para ahli, namun dari semua itu, dapat disimpulkan berdasarkan titik persamaan yang mempertemukan beragam definisi tersebut, seperti dalam catatan Ngainun (2017: 122-123) memberi makna kultur sebagai berikut :

1. Kultur adalah sesuatu yang bersifat general sekaligus spesifik. General artinya, setiap manusia di dunia memiliki kultur, tetapi kultur dari setiap masyarakat satu dengan lainnya berbeda, tergantung masyarakat pendukungnya di mana kultur itu berada.
2. Kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Misalnya, seorang anak dapat menirukan perilaku dan kebiasaan tertentu dari melihat perilaku orang tuanya. Setidaknya, terdapat tiga model pembelajaran: (a) pembelajaran individu secara situasional, (b) pembelajaran situasi secara sosial, (c) pembelajaran kultural.
3. Kultur adalah simbol, artinya setiap budaya itu memiliki simbol-simbol baik verbal maupun non verbal, simbol berupa bahasa, maupun artefak. Makna dari simbol itu terikat oleh budaya, sehingga simbol yang sama bisa memiliki makna yang berbeda, atau makna yang sama bisa memiliki simbol yang berbeda untuk budaya yang berbeda-beda.
4. Kultur dapat membentuk atau melengkapi sesuatu yang alami. Misalnya, manusia perlu makan, kultur mengajarkan pada manusia bagaimana cara mendapatkan makanan, jenis makanan apa yang harus dimakan, kapan waktu makan dan bagaimana cara makan. Kultur juga dapat menyesuaikan diri dengan alam secara alamiah dimata kita hidup.

5. Kultur sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu, sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat. Kultur menuntut adanya partisipasi atau dukungan dari kelompok masyarakat. Oleh karena kultur terbentuk secara bersama-sama atau ditransformasikan melalui masyarakat. Misalnya, suatu masyarakat memiliki budaya, keyakinan, nilai, norma, pandangan hidup, ingatan, gaya berfikir, harapan dan tingkah laku, yang mengenyampingkan perbedaan yang ada antar individu.
6. Kultur adalah sebuah model. Artinya, kultur bukan suatu kumpulan dari adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya. Kultur adalah sesuatu yang disatukan dari berbagai bagian yang terpisah dan menjadi sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat, kepercayaan, institusi, dan nilai-nilai adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan lainnya.
7. Kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, kultur adalah sebuah proses bagi suatu masyarakat untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga setiap orang berusaha untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan.

Berdasarkan paparan di atas, pengertian multikultural atau multikulturalisme adalah segala hal yang berkaitan dengan adanya keaneka ragaman budaya. Dari keragaman itu meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, dan sejenisnya, agar tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan terhindar dari beragam konflik yang berkepanjangan. Menurut Chairul Mahfud (2016:75), “Secara hakiki dalam kata multikultural terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik”. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran masyarakat terhadap kebutuhan manusia untuk diakui merupakan awal dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Suryana (2015 : 194), “multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang serta penghormatan dan keingintahuan atas budaya orang lain”. Bikhu Parekh (dalam Benyamin Molan, 2016: 29) membedakan istilah multikultural dan multikulturalisme. Istilah multikultural mengacu pada ada keanekaragaman budaya, sedangkan istilah multikulturalisme mengacu pada sebuah tanggapan normatif atas fakta itu. Artinya, ketika berbicara multikulturalisme adalah berbicara tentang aspek keanekaragaman budaya dan bagaimana fakta keanekaragaman itu ditanggapi dan disikapi secara normatif. Dengan kata lain, multikulturalisme berbicara tentang aspek deskriptif keanekaragaman (multikultural) yang disikapi secara normatif (multikulturalisme).

Menurut Irwan Abdullah, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan, kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanannya pada kesetaraan budaya. Menurut HAR Tilaar (2004:82), multikulturalisme bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Multikulturalisme mengandung pengertian yang sangat kompleks yaitu multi dan culturalisme. *Multi* artinya *plural*, *culturalisme* berarti budaya. Istilah *plural* mengandung arti berjenis-jenis, karena itu pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis, tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas, di mana komunitas itu mempunyai budaya masing-masing. Oleh karena itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi, tetapi tidak mengakui pluralisme sehingga terjadi berbagai segregasi.

Multikulturalisme itu bukan sekedar soal perbedaan dan identitas semata, melainkan menyangkut semua hal yang tertanam dan ditopang oleh budaya. Multikulturalisme tidak hanya sekedar menerima dan mengakui begitu saja semua budaya, tetapi juga menyikapi secara kritis budaya yang dianut. Multikulturalisme adalah

upaya jujur untuk menata masyarakat yang plural menjadi masyarakat multikulturalistik yang harmonis, dinamis, dan memberi penghargaan terhadap kebebasan dan kesetaraan manusia.

Parekh menjelaskan jenis multikulturalisme sebagai berikut:

1. *Multikulturalisme isolasionis* yaitu suatu masyarakat di mana semua kelompok budaya dapat hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi secara minimal satu sama lain.
2. *Multikulturalisme akomodatif* yaitu masyarakat *plural* yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas.
3. *Multikulturalisme otonomis* yaitu masyarakat *plural* dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menganggarkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif

Sedangkan Tilaar (2004 : 83) membagi *multikulturalisme* kepada dua jenis: **Pertama**, multikulturalisme tradisional dengan ciri-ciri: (a) adanya kebutuhan terhadap pengakuan; (b) legitimasi keragaman budaya atau pluralitas budaya. Pada fase ini multikulturalisme baru mengandung hal-hal yang esensial di dalam perjuangan untuk pengakuan budaya yang berbeda. **Kedua**, multikulturalisme modern dengan ciri-ciri telah memiliki berbagai jenis pemikiran baru seperti: studi budaya (*cultural studies*), *postcolonial*, *globalization*, *femisme*, *postfeminisme*, *potitical economic - neo-marxisme*, dan *post-structuralist*.

Menurut Masdar Hilmy (dalam Choirul Mahfudz, 2016:78), bagi bangsa Indonesia adanya keragaman budaya merupakan kenyataan sosial yang niscaya. Meskipun demikian, hal itu tidak secara serta merta diiringi dengan penerimaan positif pula, bahkan banyak fakta yang justru menunjukkan fenomena sebaliknya. Keragaman budaya justru telah memberi sumbangan terbesar bagi munculnya berbagai ketegangan dan konflik, sehingga modal sosial itu justru menjadi kontra produktif bagi penciptaan tatanan kehidupan yang damai, harmonis dan toleran.

Menurut pendapat Choirul Mahfudz (2016 : 79), multikulturalitas kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai takdir Tuhan (*given*), bukan bentukan manusia. Meskipun masyarakat menyadari bahwa setiap manusia memiliki perbedaan baik secara fisik dan non fisik, tetapi nalar kolektif masyarakat tentang multikulturalitas belum menerima bahwa setiap individu atau kelompok memiliki keyakinan, adat, budaya, agama, dan tatacara ritual tertentu. Nalar kolektif masyarakat, masih terkooptasi oleh *logocentrism* tafsir hegemonik yang syarat akan prasangka, kecurigaan, kebencian dan mereduksi kelompok yang ada di luar dirinya (*other*). Akibatnya, ikatan sosial, kolektivitas, dan kerjasama hanya berlaku untuk kelompoknya saja (*in group*), tidak berlaku untuk kelompok di luar dirinya (*out group*).

Dengan demikian, multikulturalitas kebangsaan Indonesia seperti pedang bermata ganda. Di satu sisi multikulturalitas dapat menjadi modalitas untuk menghasilkan energi positif, namun di sisi yang lain dapat menjadi ledakan yang menghancurkan sendi, struktur, dan pilar kebangsaan, jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, Suparlan (2002 : 2) menawarkan upaya untuk membangun masyarakat multikultur melalui tiga hal:

1. Konsep multikultur menyebar luas dan dapat dipahami pentingnya oleh bangsa Indonesia serta adanya keinginan untuk mengadopsi dan menjadikan pedomanan hidupnya pada tingkat local dan nasional.
2. Ada kesamaan antar para ahli pengertian tentang multikulturalisme dan bangunan konsep yang mendukungnya.
3. Ada upaya untuk mewujudkan cita-cita multikulturalisme.

Istilah lain yang sering disandingkan dengan multikultural adalah pluralitas. Kedua istilah itu dalam prakteknya, sering disamakan pengertiannya, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda, seperti Benyamin Molan (2016: 30) menggambarkan, Pluralitas lebih menggambarkan keaneka ragaman budaya sebagaimana adanya dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya, orang dalam berbagai budaya

menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti pasar, tetapi masing-masing cenderung bertahan dan tinggal dalam sekat budayanya. Pluralitas budaya menggambarkan keanekaragaman budaya dalam arti luas, multikulturalisme menunjukkan sikap normatif terhadap pluralitas.

Kata pluralitas sendiri berasal dari bahasa Inggris *plural* artinya jamak. Dalam arti keanekaragaman dalam masyarakat. Secara istilah pluralisme bukan sekedar keadaan, atau fakta yang bersifat jamak atau banyak, tetapi secara substansial pluralisme dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap saling mengakui, menghormati, menghargai, memelihara, mengembangkan dan memperkaya keadaan yang bersifat *plural* atau jamak. (Ngainun & Sauqi, 2017 : 73). Purwasito (2003 : 132) menyatakan pluralisme adalah wacana yang dikembangkan oleh kaum post-modernis, yang menolak segala bentuk penyeragaman, sedangkan multikultur adalah pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. Pengakuan terhadap pluralitas ini merupakan suatu kesadaran untuk mengurangi batas atau sekat-sekat budaya.

Menurut Ngainun & Syauqi (2017 : 76), konsep pluralisme dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pluralisme tidak hanya menunjuk pada ada kemajemukan, tetapi juga menunjukkan keterlibatan terhadap kenyataan kemajemukan. Misalnya, pluralisme agama, budaya, dan multikulturalisme dapat dijumpai di mana-mana. Namun, seseorang dapat dikatakan pluralis, jika ia dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Pluralitas agama adalah setiap pemeluk agama, bukan hanya dituntut untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi dituntut terlibat untuk memahami perbedaan dan persamaan guna mencapai kerukunan dan kebhinekaan.
2. Pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah adanya keanekaragaman suku, ras, bangsa yang hidup di satu lokasi. Namun, interaksi secara positif antar penduduk khususnya dalam bidang agama, sangat sedikit.
3. Pluralisme berbeda dengan relativisme. Penganut relativisme akan menyatakan bahwa hal menyangkut kebenaran atau nilai

ditentukan oleh pandangan hidup atau kerangka berfikir seseorang atau masyarakatnya. Konsekuensinya, agama apapun harus dinyatakan benar. Atau agama adalah sama. Pluralisme tidak memaknai agama sebagai seragam, tetapi beraneka ragam.

4. Pluralisme agama bukan sinkretisme, yakni menciptakan agama baru dengan memadukan sebagian dari unsur-unsur yang ada dalam setiap agama untuk dijadikan bagian integral. Pluralisme bukan sinkretisme, yang menghilangkan kemajemukan.

Furnival dalam Chaerul Mahfudz (2016 : 84) menggambarkan, keadaan masyarakat plural sebagai “masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup dan berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal”. Pandangan Furnival ini berkaitan dengan realitas sosial-kultural- politik Eropa yang relatif “homogen”, tetapi sangat diwarnai *chauvinism* etnis, rasial, agama dan gender. Menurutnya, masyarakat plural di Asia tenggara, terutama Indonesia, akan terjerumus ke dalam anarkis, jika gagal menemukan formula *federasi pluralis* yang memadai.

Menurut Molan (2016:30), dibutuhkan satu konsep atau ideologi untuk menata masyarakat pluralistik menjadi multikulturalistik. Multikultural merupakan sikap normatif terhadap pluralitas. Multikulturalisme tidak pernah mendorong perpecahan, pemisahan, misalnya, antar imigran, minoritas, etnik dan budaya setempat. Multikulturalisme justru menciptakan struktur di mana penggabungan imigran dan minoritas etnik dilakukan secara fair, dan dengan pengakuan bahwa keinginan imigran dan minoritas untuk mempertahankan aspek kultur mereka itu masuk akal, dan keaneka ragaman budaya itu dengan sendirinya diinginkan dan menguntungkan negara dalam berbagai hal. Sedangkan menurut Purwasito (2003; 138), multikultural merupakan tempat pembelajaran masyarakat dari berbagai kultur yang berbeda-beda. Multikultural merupakan proses transaksi pengetahuan dan pengalaman, yang digunakan anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda menuju kearah kebaruan kultur.

b. Pengertian Pendidikan Multikultural.

Menurut James A Banks (2010 : 1), Pendidikan Multikultural adalah sebuah ide, gerakan reformasi pendidikan, dan sebuah proses yang bertujuan mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga siswa laki-laki dan perempuan, siswa luar biasa, dan siswa yang menjadi anggota beragam ras, etnis, bahasa, dan budaya kelompok akan memiliki kesempatan sama untuk mencapai pendidikan di sekolah. Hal ini diperlukan untuk membuat konsep sekolah sebagai sistem sosial untuk menerapkan pendidikan multikultural dengan sukses. Setiap variabel utama di sekolah, seperti -- budaya, hubungan kekuasaan, kurikulum, materi, dan sikap serta kepercayaan staf -- harus diubah dengan cara yang memungkinkan sekolah mempromosikan kesetaraan pendidikan bagi siswa dari berbagai kelompok. Untuk mengubah sekolah, para pendidik harus memiliki pengetahuan tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku siswa.

Multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, language, and cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school. It is necessary to conceptualize the school as a social system in order to implement multicultural education successfully. Each major variable in the school, such as—its culture, its power relationships, the curriculum and materials, and the attitudes and beliefs of the staff—must be changed in ways that will allow the school to promote educational equality for students from diverse groups. To transform the schools, educators must be knowledgeable about the influence of particular groups on student behavior.

Pendidikan Multikultural menggabungkan gagasan bahwa semua siswa -- terlepas dari jenis kelamin, kelas sosial, dan karakteristik etnis, ras, atau budaya mereka -- harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Gagasan penting lain dalam pendidikan multikultural adalah bahwa beberapa siswa, karena karakteristik ini, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di

sekolah karena mereka saat ini terstruktur daripada siswa yang berasal dari kelompok lain yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda.

Multicultural education incorporates the idea that all students -- regardless of their gender, social class, and ethnic, racial, or cultural characteristics -- should have an equal opportunity to learn in school. Another important idea in multicultural education is that some students, because of these characteristics, have a better chance to learn in schools as they are currently structured than do students who belong to others groups or who have different cultural characteristics.

Pendidikan multikultural juga merupakan gerakan reformasi yang mencoba mengubah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, bahasa, dan kelompok budaya akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Pendidikan multikultural melibatkan perubahan total sekolah atau lingkungan pendidikan; itu tidak terbatas pada perubahan kurikuler.

Multicultural education is also a reform movement that is trying to change the schools and other educational institutions so that students from all social-class, gender, racial, language, and cultural groups will have an equal opportunity to learn. Multicultural education involves changes in the total school or educational environment it is not limited to curricular changes.

Senada dengan pandangan Banks, Michael Vavrus (2002 : 1) menjelaskan, Pendidikan Multikultural adalah “upaya reformasi sekolah secara total yang dirancang untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan untuk berbagai kelompok budaya, etnis, dan ekonomi”. Pendidikan multikultural dapat membantu guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melayani semua anak, terutama yang mempunyai minat secara historis telah dipinggirkan oleh institusi dan orang-orang yang ada dalam posisi istimewa. Untuk mencapai tujuan ini, guru yang responsif secara budaya, membutuhkan pengembangan profesional yang relevan dari lembaga yang memiliki komitmen untuk reformasi pendidikan multikultural.

Frederick J Baker (dalam Ali, 2011: 106) menyatakan, Pendidikan Multikultural adalah gerakan reformasi yang didesain untuk lingkungan pendidikan secara menyeluruh sehingga peserta didik yang berasal dari kelompok etnik, ras, yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, perguruan tinggi dan universitas. Francisco Hidalgo, dalam Ali (2011: 107) menyatakan pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleran lainnya. Definisi ini lebih khusus, hanya terbatas pada aspek proses pembelajaran saja. Pembelajaran di kelas, dalam konteks multikulturalisme, mengandaikan pada proses pembelajaran yang berlangsung secara demokratis, artinya, semua siswa dari latar belakang yang berbeda akan memperoleh hak, dan perlakuan yang sama di kelas dari pendidik. Proses pembelajaran yang melibatkan semua peserta didik tanpa harus ada yang merasa *superior-inferior*,

Selanjutnya, Bank (2010 : 20) menjelaskan, “ketika banyak guru berpikir tentang pendidikan multikultural, sebagian besar dari mereka hanya berfikir tentang konten kurikulum berkaitan dengan kelompok etnis, ras, dan budaya. Padahal, mengkonseptualisasikan pendidikan multikultural secara eksklusif sebatas konten yang terkait dengan berbagai kelompok etnis dan budaya dapat bermasalah, karena beberapa alasan: **Pertama**, guru yang tidak mampu melihat keterkaitan antara konten mata pelajaran dengan masalah budaya mudah menghentikan pengajaran berbasis pendidikan multikultural dengan argumen bahwa itu tidak relevan dengan disiplin ilmu mereka. Hal ini sering dilakukan oleh guru Matematika dan Sains di sekolah menengah. Argumen yang tidak relevan ini dapat menjadi bentuk perlawanan yang disahkan dalam konteks pendidikan multikultural, ketika dikonseptualisasikan terutama atau secara eksklusif sebagai konten semata. **Kedua**, guru Matematika dan guru Sains sering menyatakan bahwa pendidikan multikultural hanya cocok untuk guru bidang studi ilmu sosial dan sastra, tetapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan mata pelajaran sains dan matematika. **Ketiga**, mereka juga berargumen bahwa matematika dan sains yang diajarkan oleh

guru diberikan secara sama kepada semua siswa tanpa melihat budaya anak-anak didik tersebut. Oleh karena itu, Pendidikan Multikultural perlu lebih didefinisikan dan dipahami secara luas sehingga guru dari berbagai disiplin ilmu dapat merespons dengan cara yang tepat dan perlawanan terhadap Pendidikan Multikultural dapat diminimalisir.

Pendidikan Multikultural bukan hanya berkenaan dengan masalah-masalah kebudayaan dalam arti sempit, tetapi berkenaan dengan masalah politik, yaitu kesamaan derajat manusia, perubahan struktur sosial yang tidak mengenal perbedaan kelompok manusia berdasarkan asal usul etnisnya, perbedaan agama dan gender (Tilaar, 2004:140).

Ainurrafiq Dawan (dalam Ngainun & Syauqi, 2017 : 50) menjelaskan, “pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran agama”. Pengertian pendidikan multikultural seperti ini membawa implikasi luas terhadap pendidikan. Dimana pendidikan sendiri dapat dipahami sebagai proses tanpa akhir atau sepanjang hayat, maka pendidikan multikultural menuntut penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun datangnya dan dari budaya apapun dia. Tujuannya, tercipta kedamaian, keamanan, tanpa dihantui kecemasan dan kebahagiaan tanpa rekayasa.

Zamroni (2011: 144) mendefinisikan Pendidikan Multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah para ilmuwan untuk memecahkan persoalan yang terdapat di dunia pendidikan dengan tujuan kegagalan dan kelemahan, bahkan diskriminasi dalam dunia pendidikan dapat benar-benar diungkap.

Istilah yang sepadan dengan Pendidikan Multikultural menurut L H Ekstran (dalam Ali, 2011 : 103), ada empat istilah, yaitu: *interetnic education*, *trascultural education*, *multiethnic education* dan *cross-cultural education*. Sementara Barry Van Driel menyebut istilah pendidikan multikultural dengan sebutan “*human right education*, dan *intercultural education*. UNESCO sendiri memperkenalkan istilah lain, yaitu *inclusive education*. Beberapa istilah di atas, yakni menurut Ekstran dan Driel memiliki pengertian yang sama, yaitu konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Namun, dari 8 istilah tersebut yang paling populer digunakan di beberapa negara Eropa, Australia, dan Indonesia adalah *intercultural education*, *multicultural education* dan *inclusive education*. Dua istilah yang pertama menunjuk kepada pemberian kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan bagi peserta didik yang memiliki latar belakang budaya dan etnik yang berbeda. Sedangkan istilah yang terakhir menunjuk kepada pemberian kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan kepada semua peserta didik tanpa melihat keadaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan kondisi yang lain.

c. Tujuan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah konsep yang luas dan memiliki beberapa dimensi berbeda dan penting. Praktik pendidik dapat menggunakan dimensi-dimensi ini sebagai panduan mereformasi sekolah saat ingin menerapkan pendidikan multicultural (Banks, 2010:). Dengan kata lain, dimensi-dimensi pendidikan multikultural ini juga merupakan tujuan pendidikan multikultural. Dimensinya mencakup: (1) integrasi konten untuk kurikulum sekolah dasar dan menengah, (2) proses konstruksi pengetahuan multikultural, (3) pengurangan prasangka dan diskriminasi, (4) pedagogi kesetaraan, (5) memberdayakan budaya sekolah dan struktur sosial untuk semua anak dan remaja. Setiap dimensi didefinisikan dan diilustrasikan sebagai berikut:

1) Integrasi Konten

Integrasi Konten berkaitan dengan sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari berbagai budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi, dan teori utama dalam bidang atau disiplin ilmu mereka. Memasukkan konten etnis dan budaya ke dalam subjek area harus logis, tidak dibuat-buat. Ada lebih banyak peluang untuk integrasi konten etnis dan budaya dalam beberapa subjek area daripada yang lain. Dalam studi sosial, seni bahasa, dan musik, sering dan cukup ada peluang bagi guru untuk menggunakan konten etnis dan budaya untuk menggambarkan konsep, tema, dan prinsip-prinsip. Ada juga peluang untuk mengintegrasikan konten multikultural ke dalam matematika dan sains. Namun, peluangnya tidak sebanyak yang ada dalam studi sosial, seni bahasa, dan musik (Bank, 2010 : 20)

2) Proses Konstruksi Pengetahuan

Proses konstruksi pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana guru membantu siswa untuk memahami, menyelidiki, dan menentukan bagaimana asumsi budaya implisit, kerangka referensi, perspektif, dan bias dalam suatu disiplin ilmu mempengaruhi cara pengetahuan itu dibangun di dalamnya. Siswa dapat menganalisis proses konstruksi pengetahuan dalam sains dengan mempelajari bagaimana rasisme telah diabadikan dalam sains oleh teori genetika intelijen, Darwinisme, dan eugenika. Dalam buku *The Mismeasure of Man*, Gould (1996) menggambarkan bagaimana rasisme ilmiah berkembang dan berpengaruh di abad ke-19 dan ke-20. Rasisme ilmiah terus memiliki pengaruh yang signifikan pada interpretasi tes kemampuan mental di Amerika Serikat (Bank, 2010 : 21)

3) Pengurangan Prasangka

Pengurangan prasangka digambarkan dalam pelajaran dan kegiatan yang dilakukan guru untuk membantu siswa berkembang secara positif, dalam hal sikap terhadap kelompok ras, etnis, dan budaya lain yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak datang ke sekolah memiliki banyak sikap negatif dan

kesalahpahaman terhadap ras dan kelompok etnis yang berbeda (Aboud, Stephan & Vogt dalam Bank, 2010: 22). Penelitian juga menunjukkan bahwa pelajaran, unit, dan bahan ajar yang mencakup konten tentang berbagai ras dan kelompok etnis dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap antar kelompok yang lebih positif jika kondisi tertentu ada dalam situasi mengajar (Bigler, Stephan & Vogt dalam Bank, 2010: 22). Kondisi ini termasuk gambaran positif mengenai kelompok etnis dalam bahan ajar dan penggunaan bahan ajar multietnis secara konsisten dan secara berurutan.

Hipotesis tentang kontak dari Allport (1954) menyediakan beberapa panduan yang berguna untuk membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan tindakan antar-ras yang lebih positif dalam situasi kontak. Dia menyatakan bahwa kontak antar grup akan meningkatkan hubungan antar kelompok ketika kontak ditandai dengan empat syarat ini: (1) status yang sama, (2) kerja sama daripada kompetisi, (3) sanksi oleh orang yang memiliki otoritas seperti guru dan administrator, dan (4) interaksi interpersonal di mana siswa berkenalan sebagai individu (Bank, 2010 : 22).

4) Pedagogi Ekuitas

Guru dalam setiap disiplin ilmu dapat menganalisis prosedur dan gaya mengajar mereka untuk menentukan sejauh mana mereka mencerminkan isu dan masalah multikultural. Pedagogi ekuitas ada saat guru memodifikasi pengajaran mereka dengan cara yang akan memfasilitasi pencapaian akademik siswa dari beragam ras, budaya, jenis kelamin, dan kelompok kelas sosial. Ini termasuk menggunakan berbagai gaya mengajar dan pendekatan yang konsisten dengan berbagai gaya belajar di dalamnya berbagai kelompok budaya dan etnis, yang menuntut tetapi sangat personal ketika bekerja dengan kelompok siswa asli Amerika dan Alaska, dan menggunakan teknik pembelajaran kooperatif dalam matematika dan instruksi sains untuk

meningkatkan prestasi akademik siswa kulit berwarna (Cohen & Lotan, Slavin, dalam Bank, 2010 : 20).

Tilaar (2004 : 139) menyatakan, melalui pergaulan antar kelompok yang intensif, prasangka buruk dapat dihilangkan dan dapat dibina kerjasama yang erat dan saling menghargai. Misalnya, momen peringatan hari pahlawan tanpa membedakan warna kulit dan agama merupakan cara untuk menanamkan sikap positif terhadap etnis lain. Nilai-nilai tersebut dimasukan dalam kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum sendiri. Pada gilirannya, peserta didik dapat mentransformasikan nilai-nilai tersebut di dalam perbuatan.

5) Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur Sosial.

Dimensi penting lain dari pendidikan multikultural adalah budaya dan organisasi sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender, ras, dan kelas sosial. Budaya dan organisasi sekolah harus diperiksa oleh semua staf sekolah. Mereka harus berpartisipasi dalam merestrukturisasi budaya dan organisasi itu. Praktik pengelompokan dan pelabelan, partisipasi olahraga, disproporsionalitas dalam prestasi, disproporsionalitas dalam program pendidikan khusus dan berbakat, dan interaksi staf dan siswa lintas etnis dan ras adalah variabel penting yang perlu diperiksa untuk menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari beragam kelompok ras dan etnis dan dari kedua kelompok gender. Menurut Sekar Purbarini Kawuryan (2009:17), tujuan Pendidikan Multikultural adalah: (1) mengembangkan literasi etnis dan budaya, (2) mengembangkan pribadi, (3) mengklarifikasi nilai dan sikap, (4) meningkatkan kompetensi multikultural, (5) meningkatkan keterampilan dasar, (6) memperkuat pribadi dan reformasi sekolah, (7) memberi wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh, (8) memberi wawasan hidup lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia, (9) membantu dapat hidup berdampingan secara damai.

a) Mengembangkan literasi etnis dan budaya.

Tujuan dari pendidikan multikultural adalah mempelajari latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, kondisi sosial politik dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas, secara komprehensif, komparatif, dan juga menunjukkan persamaan dan perbedaan diantara kelompok-kelompok yang ada. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pencerahan atau literasi tentang pluralisme budaya dan keragaman etnis, sehingga mereka memiliki pengetahuan lebih akurat tentang warisan budaya sendiri maupun budaya orang lain. Pengetahuan pluralisme budaya menjadi dasar untuk menghormati, mengapresiasi, menilai dan memperingati keragaman budaya baik lokal, nasional, maupun global. Selama ini, informasi tentang sejarah dan kontribusi kelompok etnis tradisional diabaikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Begitupun, dengan pandangan dan sikap menilai kelompok etnis, sistem nilai dan budaya tertentu dari sudut pandang kelompok lain masih bias dan menyimpang.

b) Mengembangkan pribadi

Pendidikan Multikultural bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri yang lebih baik dan memperbaiki pandangan negatif terhadap etnis yang berbeda. Selama ini para siswa telah menginternalisasi konsep negatif dan salah tentang etnisnya sendiri dan kelompok etnis lain. Siswa dari kelompok lain mungkin memahami bahwa budayanya memiliki nilai tawar rendah, sementara budaya lain memiliki nilai tawar yang tinggi. Dengan kata lain, budayanya sendiri dipandang rendah, sementara budaya orang lain dianggap lebih unggul. Pendidikan multikultural membantu pengembangan konsep diri siswa yang positif dan kebanggaan terhadap identitas diri sendiri. Hal ini dapat berkontribusi kepada keseluruhan prestasi intelektual, akademik, dan sosial siswa. Pendidikan multikultural dapat memaksimalkan potensi kemanusiaan manusia. Dengan memenuhi kebutuhan individu dan mengajar siswa seutuhnya akan

mempertinggi rasa penghargaan pribadi, kepercayaan dan kompetensi dirinya.

c) Mengklarifikasi nilai dan sikap

Pendidikan multikultural mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari martabat manusia seperti keadilan, kebebasan, dan demokrasi. Lewat pendidikan ini mengajarkan siswa untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadarkan mereka bahwa perbedaan bukan suatu kekurangan, atau rendah diri, melainkan perbedaan atau keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Oleh karena itu, keragaman harus dikelola dengan baik, sehingga menjadi pendorong kemajuan sosial dan ada kekuatan dalam pluralisme etnis dan budaya; bahwa kesetiaan etnis dan loyalitas nasional bukan tidak dapat didamaikan; dan bahwa kerjasama dan koalisi antara kelompok etnis tidak tergantung pada pemilikan keyakinan, nilai dan perilaku yang sama. Artinya, menganalisis dan mengklarifikasi sikap dan nilai etnis merupakan langkah utama untuk melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat.

d) Meningkatkan kompetensi multikultural

Melalui pendidikan multikultural siswa belajar berinteraksi dengan orang-orang yang secara etnis, ras, dan budaya berbeda. Mengetahui dan berkomunikasi lintas budaya, menjadikan siswa memiliki kemampuan atau kompetensi multikultural. Pendidikan multikultural mampu meredakan ketegangan dengan mengajarkan bagaimana berkomunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, berfikir alternatif, menganalisis bagaimana budaya mempengaruhi nilai, sikap, kepercayaan, harapan, dan perilaku. Melalui pengalaman belajar dan memberi kesempatan siswa untuk memaktekan kompetensi budaya dan berinteraksi dengan orang yang memiliki pengalaman dan situasi berbeda.

e) Meningkatkan keterampilan dasar

Pendidikan multikultural melatih keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis, seperti: memperbaiki penguasaan membaca, menulis, materi pelajaran, berfikir kritis, pemecahan konflik dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berfikir siswa yang berbeda etnis.

f) Memperkuat pribadi dan reformasi sekolah

Pendidikan multikultural memulai perubahan dari sekolah, yang pada akhirnya akan menyebar ke masyarakat. Di sekolah mereka belajar tentang sikap, nilai, kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan tentang isu-isu etnis, sehingga pada saatnya mereka memiliki komitmen dan kemauan yang tinggi untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial. Dalam kesempatan itu mereka mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Pengetahuan tentang isu-isu etnis, dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan melakukan tindakan sosial, kemampuan kepemimpinan dan komitmen moral atas harkat dan persamaan. Artinya, pendidikan multikultural mampu memperkuat pribadi dan reformasi sekolah.

g) Memberi wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh

Pendidikan multikultural mengajarkan kekayaan budaya bangsa, sehingga akan tumbuh rasa kebangsaan dan kebanggaan pada diri siswa terhadap identitas budanya sendiri. Materi-materi, program dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi dan stereotipe perlu ditambahkan dalam kurikulum sekolah.

h) Memberi wawasan hidup lintas budaya bangsa

Era globalisasi yang telah menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia terhubung satu sama lain dan saling bergantung dalam pergaulan tanpa batas, menuntut setiap orang menjadi bagian dari warga dunia, bukan hanya menjadi warga dari satu negaranya. Pendidikan multikultural membantu siswa memiliki

wawasan global, namun tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya.

i) Membantu dapat hidup berdampingan secara damai

Tujuan akhir dari pendidikan multikultural adalah membawa perubahan pada diri siswa mampu hidup berdampingan secara damai, meskipun berhadapan dengan beragam perbedaan budaya, etnis, gender, ras, kepercayaan, bahasa dan lainnya. Melihat perbedaan sebagai keniscayaan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan akan menumbuhkan sikap toleran terhadap kelompok lain dan dapat hidup berdampingan secara damai.

Gorski (dalam Sekar Kawuryan, 2009:22), menjelaskan fungsi Pendidikan Multikultural sebagai berikut:

1. Memberi konsep diri yang jelas
2. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya
3. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat
4. Membantu mengembangkan pembuatan keputusan (*decision making*), partisipasi sosial (*social partisipation*), dan keterampilan kewarganegaraan (*citizenship skill*).

2. Sejarah Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dunia pendidikan, karena sebelum perang dunia II pendidikan multikultural belum dikenal. Pada masa itu pendidikan sering dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan melalui monopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain, pendidikan multikultural merupakan gejala baru dalam pergulatan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (*education for all*), maka perlu dipaparkan sejarah pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural tumbuh dari pergolakan Gerakan Hak-hak Sipil tahun 1960-an. Selama dekade tersebut, orang Afrika-Amerika mulai menuntut hak-haknya yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Tujuan Gerakan Hak-hak Sipil untuk menghilangkan diskriminasi dalam akomodasi publik, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Konsekuensi dari tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap institusi pendidikan, karena kelompok etnis Afrika-Amerika dan diikuti oleh kelompok lainnya menuntut sekolah harus mereformasi kurikulum yang mencerminkan pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif mereka. Kelompok etnis juga menuntut agar sekolah mempekerjakan lebih banyak guru dan administrator dari ras kulit hitam dan coklat sehingga anak-anak mereka lebih sukses memerankan model. Kelompok etnis juga mendorong komunitas untuk mengontrol sekolah di lingkungan mereka dan merevisi buku teks agar mencerminkan keragaman masyarakat di Amerika Serikat (Bank : 2010 : 5).

Respons awal sekolah dan para pendidik terhadap gerakan etnis 1960-an nampak terburu-buru (Banks, 2006). Program dan pelajaran dikembangkan tanpa pemikiran dan perencanaan yang hati-hati yang diperlukan untuk menjadikannya sehat secara pendidikan atau melembagakannya dalam sistem pendidikan. Karakteristik dominan reformasi sekolah terkait dengan keragaman etnis dan budaya selama tahun 1960-an dan awal 1970-an adalah adanya program hari libur dan hari-hari khusus lainnya, perayaan etnis, dan kursus-kursus yang berfokus pada satu kelompok etnis (Bank : 2010 : 6).

Keberhasilan yang terlihat dari Gerakan hak-hak sipil, ditambah pertumbuhan yang cepat dan dukungan kelompok nasional liberal, telah merangsang kelompok yang terpinggirkan mengambil tindakan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap mereka dan untuk menuntut agar sistem pendidikan merespon kebutuhan, aspirasi, budaya, dan sejarah mereka. Gerakan hak-hak perempuan muncul sebagai salah satu gerakan reformasi sosial yang paling signifikan di abad ke-20 (Schmitz, Butler, Rosenfelt, & Guy-Sheftal, 2004). Selama tahun 1960-an dan tahun 1970-an, diskriminasi terhadap perempuan

dalam pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan tersebar luas dan seringkali mencolok. Gerakan hak-hak perempuan mengartikulasikan dan mempublikasikan bagaimana diskriminasi dan pelembagaan seksisme membatasi kesempatan perempuan dan berdampak buruk bagi negara. Para pemimpin gerakan ini, seperti Betty Friedan dan Gloria Steinem, menuntut agar lembaga-lembaga politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan bertindak untuk menghapuskan diskriminasi jenis kelamin dan memberikan kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan bakat dan ambisi mereka.

Tujuan utama dari gerakan hak-hak perempuan adalah:

1. Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama,
2. Menghapuskan undang-undang yang mendiskriminasi perempuan dan menjadikan mereka warga negara kelas dua,
3. Mempekerjakan lebih banyak perempuan di posisi kepemimpinan,
4. Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak (Bank : 2010 : 6).

Ketika kaum feminis (orang yang bekerja untuk kesetaraan politik, sosial, ekonomi, dan jenis kelamin) melihat institusi pendidikan, mereka mencatat masalah -masalah yang mirip dengan yang telah diidentifikasi oleh kelompok etnis kulit berwarna. Buku pelajaran dan kurikulum didominasi oleh laki-laki; dan sebagian besar perempuan tidak terlihat di dalamnya. Kaum feminis menunjukkan bahwa buku teks sejarah didominasi oleh sejarah politik dan militer -bidang di mana laki-laki menjadi peserta utama (Trecker, 1973). Sejarah sosial, sejarah keluarga, sejarah kerja dan sejarah orang-orang kebanyakan (biasa) diabaikan. Kaum feminis mendesak untuk merevisi buku pelajaran untuk memasukkan lebih banyak sejarah tentang peran penting perempuan dalam pembangunan bangsa dan dunia. Mereka juga menuntut lebih banyak perempuan yang direkrut pada posisi administrasi di sekolah. Meskipun sebagian besar guru di sekolah dasar itu perempuan, tetapi sebagian besar administrator adalah laki-laki (Bank, 2010: 6).

Kelompok terpinggirkan lainnya, dirangsang oleh gejolak sosial dan tuntutan hak asasi manusia selama tahun 1970-an, mengutarakan keluhan mereka dan menuntut agar lembaga-lembaga itu direformasi. Dengan begitu, mereka akan merasakan lebih sedikit didiskriminasi dan memperoleh lebih banyak hak asasi manusia. Orang cacat, warga negara senior, kaum gay dan lesbian membentuk kelompok yang terorganisir secara politis selama periode ini dan membuat terobosan signifikan dalam mengubah lembaga dan hukum. Advokasi hukum untuk warga negara penyandang cacat mencapai kemenangan yang signifikan selama tahun 1970-an. Pendidikan untuk semua penyandang cacat tahun 1975, yang mengharuskan siswa yang memiliki kecacatan dididik dalam lingkungan yang terbatas dan melembagakan istilah *mainstreaming* (pengarusutamaan) dalam pendidikan. Mungkin hal ini merupakan kemenangan hukum paling signifikan dari gerakan ini untuk hak-hak siswa penyandang cacat dalam bidang pendidikan (Bank, 2010 : 7).

Pendidikan multikultural muncul dari beragam kursus, program, dan praktik. Sistem pendidikan multikultural merancang lembaga pendidikan untuk menanggapi tuntutan, kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok siswa (Bank, 2010:7). Poin lain bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk keanekaragaman budaya, atau pendidikan untuk "orang kulit berwarna" (Bank, dikutip Rahim, 2012). Konsekuensinya, tidak hanya satu program yang dapat diidentifikasi, tetapi berbagai program pendidikan harus ditawarkan (Sleeter, 1996).

Istilah pendidikan multikultural telah menggambarkan beragam program dan praktik. Program ini terkait dengan pemerataan pendidikan, jenis kelamin, kelompok etnis, minoritas bahasa, kelompok berpenghasilan rendah, dan penyandang cacat. Di satu wilayah sekolah, pendidikan multikultural bisa berarti kurikulum baru yang menggabungkan pengalaman kelompok etnis kulit berwarna; di sekolah lain, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai program yang melibatkan pengalaman dari kelompok-kelompok etnis dan perempuan. Di sekolah lain lagi, istilah ini dapat digunakan untuk

menjelaskan upaya reformasi sekolah secara total yang dirancang untuk meningkatkan pendidikan kesetaraan untuk berbagai kelompok budaya, etnis, dan ekonomi (Bank, 2010 : 7).

Menurut Tilaar (2004 : 90), akar sejarah multikultural dimulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Paham multikultural berkembang dari negara demokrasi besar, yaitu Amerika Serikat yang hidup subur segregasi dan diskriminasi ras, hingga pada pertengahan abad 19 terjadi perang saudara, hal itu merupakan cikal bakal lahirnya multikulturalisme di dunia.

Abraham Lincoln, sebagai pejuang demokrasi, dengan politik Abolisinya telah menghapus perbudakan, dan telah menempatkan ras negro pada tempat yang layak di dalam masyarakat Amerika yang demokratis. Selanjutnya, Martin Luther King, sebagai tokoh pejuang anti segregasi, pengaruhnya sangat besar di Amerika dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan telah menghasilkan perubahan yang sangat signifikan di dunia pendidikan di semua jenjang pendidikan di Amerika Serikat yang tidak lagi membedakan warna kulit (Tilaar, 2004 : 132).

Sejak saat itu, pendidikan yang bersifat rasis dalam masyarakat Amerika dan berbagai segregasi di sekolah secara legal telah berakhir dengan keluarnya Undang-undang *Civil Right Bill*. Selanjutnya, perkembangan multikulturalisme yang panjang di Amerika Serikat dapat dibagi kepada tiga periode: (1) Periode perjuangan untuk mencapai kesamaan kedudukan dari ras-ras yang berbeda dalam masyarakat; (2) Periode perkembangan hak asasi manusia, gerakan rasisme makin menyempit dan ditolak masyarakat, kesamaan hak antar ras makin baik; (3) Periode pengakuan pluralisme budaya. Perkembangan pendidikan multikultural sendiri di Amerika Serikat, jika ditelusuri dapat dikategorikan kepada empat fase: (1) Pendidikan segregasi; (2) Pendidikan menurut konsep *Salad Bowl*; (3) Pendidikan menurut konsep *Melting Pot*; (4) Pendidikan Multikultural.

a) Konsep Pendidikan Segregasi

Di dalam masyarakat Amerika Serikat, golongan kelompok etnis negro atau yang berkulit hitam dianggap kelompok etnis rendah dibandingkan dengan kelompok etnis berkulit putih. Dalam paham politik dan dalam kehidupan sosial segregasionisme telah mengelompokkan kehidupan manusia ke dalam kelas yang berbeda yaitu kelas rendah untuk kelompok kulit berwarna, dan kelas menengah tinggi untuk kelompok kulit putih. Kelompok kulit putih mempunyai hak istimewa menikmati pendidikan yang berkualitas.

b) Konsep Pendidikan Salad Bowl

Konsep pendidikan ini diibaratkan salad yang isinya beraneka macam dan ditaruh dalam sebuah bejana menghasilkan jenis makanan yang nikmat. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari masing-masing kelompok etnis dapat hidup berdampingan secara damai dan keseluruhannya merupakan satu perpaduan yang masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing mengurus dirinya sendiri, dan dapat hidup bersama sepanjang yang satu tidak mengganggu yang lain.

c) Konsep Pendidikan Melting Pot.

Di dalam konsep ini masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun, dengan menyadari perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Bahkan kelompok yang berjenis-jenis kebudayaan yang mendiami negara bagian Amerika mengalami apa yang disebut proses Amerikanisasi, yaitu mereka secara tidak sadar meleburkan unsur-unsur kebudayaan etnis spesifik menjadi menjadi bentuk yang berbau budaya Amerika, seperti orientasi kepada modernisasi dan kemajuan. Perbedaan antara konsep *salad bowl* dan *melting pot* terletak pada sikap masing-masing etnis itu terhadap kelompok lainnya. Kalau dalam salad bowl, tidak mempedulikan adanya komitmen untuk saling mengetahui dan saling berbagi unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki dengan kelompok lain, maka dalam melting pot terasa adanya suatu

kekuatan untuk mensitesiskan kebudayaan dari masing-masing kelompok kepada budaya Amerika.

d) Pendidikan Multikultural

Setelah proses segregasi yang membedakan harkat manusia terhapus dari masyarakat Amerika, kelompok-kelompok etnis dari berbagai negara yang memasuki Amerika menjadi warga negara yang setara dalam masyarakatnya. Anggota-anggota kelompok etnis tersebut bisa menduduki pos-pos penting baik di dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan swasta. Hal ini berpengaruh pada pendidikan. Dalam bidang pendidikan, lahirnya suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul serta agamanya. Apalagi setelah munculnya undang-undang *separation between state and religion*, menambah maraknya berbagai jenis kebudayaan dan agama di Amerika Serikat. Pendidikan multikultural berkembang sangat cepat di dalam masyarakat multikultur di Amerika Serikat. Multikulturalisme di Amerika bersifat antar budaya kelompok etnis yang besar atau dapat dikatakan masalah budaya antar bangsa (Tilaar, 2004 : 137-138).

Pendidikan Multikultural di Jerman, dapat dikatakan belum berkembang. Namun demikian adanya orang-orang asing, seperti pekerja asing menyebabkan diperlukan kebijakan-kebijakan khusus dalam sistem pendidikannya, tanpa mengubah sistem pendidikan nasional Jerman itu sendiri. Secara implisit Jerman telah membuat kebijakan sistem pendidikan untuk kelompok anak-anak asing dan kelompok minoritas (Tilaar, 2004: 142) antara lain:

1. Kebijakan separatisme. Kebijakan ini berlaku bagi golongan minoritas yang telah berabad-abad tinggal di Jerman. Mereka dilindungi undang-undang khusus dan dapat menyelenggarakan pendidikan menurut kebudayaan golongan minoritas tersebut.
2. Kebijakan asimilasi, bertujuan agar anak-anak dari orang asing dapat menyesuaikan diri atau berasimilasi dengan masyarakat

Jerman. Mereka diberi tunjangan untuk belajar bahasa Jerman, sehingga mempermudah mereka memasuki sekolah di Jerman

3. Kebijakan kerjasama. Kebijakan ini mengakui adanya golongan minoritas yang mempunyai kebudayaan tertentu. Mereka dihormati sepanjang tidak mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat umum. Kebijakan ini dikenal dengan *intercultural education*.
4. Kebijakan uni Eropa. Kebijakan ini memunculkan istilah kultur *bergeifende Erziehung* (pendidikan yang menjembatani perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Eropa) yang merupakan upaya untuk menumbuhkan *Eurochauvinisme* dari anggota uni Eropa. *Eurochauvinisme* merupakan kebudayaan mainstream yang membatasi budaya yang lain, khususnya budaya non Eropa. Di Jerman dalam upaya untuk mengembangkan pendidikan yang tidak berbau rasisme, maka dikembangkan model pendidikan *Auslander pedagogik* seperti terjadi di Universitas Birmingham, meliputi: model pendidikan integratif, studi perempuan, dan pendidikan anti rasisme (Tilaar, 2004 : 144).

Di Inggris pendidikan multikultural berkembang sesuai dengan semakin banyaknya kaum imigran yang memasuki Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal (orang putih) bersama-sama dengan kelompok kulit berwarna. Selanjutnya diperkuat dengan adanya politik imigrasi melalui undang-undang *Common wealth Immigran Act* tahun 1962, yang mengubah status kelompok berwarna dari kelompok imigran menjadi kelompok “shelter”(penghuni tetap). Pendidikan multikultural di Inggris juga dipengaruhi oleh gerakan-gerakan anti rasisme dari Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Martin Luther King. Pada tahun 1981 terjadi perubahan signifikan dalam pendidikan multikultural di Inggris dengan terbitnya *British National Act*, Sejak itulah pendidikan multikultural bukan hanya terlihat di bidang pendidikan sekolah saja, melainkan juga melalui forum-forum pendidikan masyarakat seperti jaringan BBC (Tilaar, 2004: 148).

Muilard (dalam Tilaar, 2004:148), perkembangan pendidikan multikultural di Inggris dapat dibagi kepada lima periode: (1) Pendidikan untuk kelompok imigran (tahun 1950-1960); (2) Pendidikan multi rasial (tahun 1960-1970); (3) Pendidikan multi etnik (akhir tahun 1970-an); (4) Pendidikan multikultural (tahun 1980-an); (5) Pendidikan anti rasisme.

Pendidikan Multikultural di Kanada mengambil bentuk yang khusus, berbeda dengan di Amerika Serikat. Hal ini karena perbedaan sejarah serta komposisi penduduk dari kedua negara itu. Kanada pada tahun 1991 berpenduduk sebanyak 20 juta jiwa, hampir 8 juta berasal dari berjenis-jenis etnis. Hampir seluruh etnis di muka bumi terwakili di Kanada (Tilaar, 2004: 149). Pada tahun 1971 adanya politik multikulturalisme dari Pemerintahan Liberal, yang memberikan status yang sama untuk penggunaan bahasa Perancis dan Inggris sebagai bahasa resmi di Parlemen dan kantor-kantor pemerintah. Tahun 1972 didirikan Direktorat Multikultural dalam lingkungan departemen luar negeri untuk memajukan cita-cita multikulturalisme, integrasi sosial dan hubungan positif antar ras. Tahun 1988 muncul *Canadian Multiculturalism Act*. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan ada sejumlah dana dialokasikan untuk memajukan hubungan harmonis antar ras, memperluas saling pengertian antar kebudayaan yang berbeda-beda, memelihara bahasa-bahasa asli dan budaya, kesempatan yang sama dari kelompok etnis minoritas untuk berpartisipasi, pengembangan kebijakan multikultural untuk semua kantor pemerintah federal. Pada tahun 1991-1992, pemerintah memberi anggaran 25,5 juta dollar untuk kementerian pluralisme. Kanada merupakan negara pertama yang memberi pengakuan legal terhadap multikulturalisme (Tilaar, 2004: 149)

Meskipun multikulturalisme merupakan kebijakan resmi pemerintah, namun tidak ada satu kebijakan yang sama, masing-masing melaksanakan kebijakan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Mc.Leod (dalam Tilaar, 2004: 154) menyebutkan, ada tiga model Pendidikan Multikultural, yaitu: (1) Pendidikan Multikultural spesifik; (2) Pendidikan Multikultural berorientasi

problem; (3) Pendidikan Multikultural berorientasi interkultural. Sementara Magsino (1985) memnagi menjadi enam model, yaitu: (1). Pendidikan Multikultural untuk *emergent society*; (2) Pendidikan Multikultural untuk kelompok kultural yang berbeda; (3) Pendidikan Multikultural untuk memperdalam saling pengertian budaya; (4). Pendidikan Multikultural untuk akomodasi kebudayaan; (5). Pendidikan Multikultural untuk memelihara nilai kebudayaan dari suatu kelompok tertentu ketika berada dalam bahaya atau terancam punah; (6) Pendidikan Multikultural untuk adaptasi budaya serta untuk membentuk kompetensi bikultural.

Di Australia, Pendidikan Multikultural lahir dari sejarah yang spesifik. Paham multikulturalisme di Australia berkaitan dengan perkembangan politik. Pemerintahan partai buruh di bawah pimpinan Whitiam dan penerusnya Frazer dari partai koalisi konservatif, telah memberikan angin segar bagi perkembangan multikulturalisme. Di bawah pemerintahan partai Liberal, berdasarkan laporan Galbally (dalam Tilaar, 2004 : 158) dikemukakan empat prinsip penting:

1. Setiap anggota masyarakat Australia mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensinya dan mempunyai akses yang sama untuk memperoleh program dan pelayanan.
2. Setiap orang harus mempertahankan kebudayaannya sendiri tanpa prasangka atau memusuhi kebudayaan yang lain. Setiap orang didorong untuk mengerti kebudayaan lain yang berbeda.
3. Kebutuhan imigran pada dasarnya dipenuhi oleh program-program untuk seluruh masyarakat, namun program khusus dapat diadakan untuk menjamin adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang yang berbeda kebudayaan.
4. Setiap pelayanan dan program harus dikonsultasikan dengan rakyat dengan maksud agar mereka dapat menolong dirinya sendiri.

Dari prinsip tersebut, maka pada tahun 1977 berdiri *Australian Ethnic Affairs*, yang bertugas memberikan saran kepada Kementerian Imigrasi dan Urusan Etnik (*Ministry for Imigration and Ethic Affairs*). Masyarakat multikultural di Australia didirikan berdasarkan tiga

prinsip: kohesi, kesetaraan, dan identitas bangsa. Selanjutnya berturut-turut didirikan *Multicultural Education Program* yaitu program pendidikan untuk anak-anak migran, *Australian Institute of Multicultural Affairs*, *National Agenda for a Multicultural Australia*. Sasaran program ini meliputi: hak-hak budaya, keadilan, dan efisiensi ekonomi. Pada perkembangan selanjutnya, pelaksanaan paham multikulturalisme dalam pendidikan di Australia mengalami perubahan terkait kondisi politik pemerintah. Oleh karena itu Pendidikan Multikultural di Australia dapat dibedakan kepada tiga fase perkembangan: (1) Dari politik pasif ke arah asimilasi aktif (1945-1972); (2) Dari pendidikan imigran ke Pendidikan Multikultural (1972-1986); (3) Imperatif ekonomi dalam Pendidikan Multikultural (1986-1993).

Tujuan Pendidikan Multikultural di Australia adalah:

1. Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multikultural
2. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia.
3. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai multikulturalisme
4. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan inter etnis
5. Memperluas kesadaran dan menerima sebagai seorang yang mempunyai identitas Australia, tetapi juga identitas yang spesifik di dalam masyarakat multikultural Australia.

Sejarah perkembangan Pendidikan Multikultural di Afrika Selatan, memiliki corak yang berbeda dengan sejarah di negara-negara lain. Afrika selatan sampai tahun 1994 terkenal sebagai negara yang sangat keras melaksanakan politik segregasi yang disebut dengan politik *Apartheid*. Masyarakat distrukturkan berdasarkan garis rasial dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Secara historis, perkembangan Pendidikan Multikultural di Afrika Selatan terbagi kepada empat masa:

1. Politik Anglosiasi dari kolonialisme Inggris, politik penjajahan Inggris ialah peng-Inggrisan (*Anglosiation*) dari masyarakat Afrika Selatan menurut garis ras. Politik ini pada permulaan abad ke 20 mendapat tantangan dari *Cristian Education Movement* yang bertujuan mengembangkan kebudayaan Afrika, khususnya kebudayaan *Bantu*. Hal ini merupakan tantangan terhadap politik *Apartheid*. Namun, dalam pelaksanaannya, justru memperkuat politik *apartheid*. Di samping itu, muncul gerakan mahasiswa Soweto pada 16 Juni 1976, yang bertujuan menentang pelaksanaan politik bahasa yang dianggap sangat memberatkan mahasiswa kulit hitam. Politik bahasa yang diterapkan pada waktu itu adalah bahasa Inggris untuk ras kulit putih, dan untuk ras Afrika di samping bahasa Inggris juga bahasa Afrika dan dialek dari suku-suku (Tilaar, 2004: 162).
2. Politik pendidikan tahun 1950-1990, politik pendidikan pada masa ini ditandai oleh politik *apartheid* di mana masing-masing kelompok ras mempunyai sistem pendidikan sendiri dan diurus oleh *Departemen Colored Affairs*. Politik ini juga mendapat tantangan yang sangat keras dari mahasiswa, seperti gerakan *African Student Organization*, *Congres of South African Student*, dan pemberontakan mahasiswa Suweto dengan tujuan: (1) menentang politik pendidikan *Bantu* yang mengembangkan kebudayaan Afrika berdasarkan garis rasial, (2) keadaan ekonomi yang memburuk, (3) sistem pendidikan yang inferior bagi kulit hitam (Tilaar, 2004 : 163).
3. Reformasi struktur pendidikan. Pada masa ini dipelopori oleh gerakan "*people Education*" memperjuangkan pendidikan non rasial di Afrika Selatan berisi: (1) demokrasi pendidikan yang mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam mengambil keputusan tentang isi serta kualitas pendidikan, (2) menentang politik *apartheid*, (3) mengupayakan pendidikan yang berkualitas untuk semua, (4) mengembangkan sikap kritis terhadap kehidupan sekitar dan dunia, (5) menjembatani perbedaan yang ada dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan praktis, (6) menghilangkan

perbedaan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemanusiaan.

4. Kebijakan pendidikan sesudah terhapusnya politik Apartheid. Pada tahun 1994 di Afrika Selatan diadakan pemilihan umum non rasial, dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden, maka terjadilah berbagai kebijakan dalam politik pendidikan, antara lain:
 - a. Tahun 1991, Presiden Nelson Mandela membentuk tim 35 yang bertugas meneliti krisis pendidikan di Afrika selatan sebagai akibat politik apartheid yang panjang
 - b. Tahun 1997, National Crisis Committee, meluncurkan Culture of Learning and Teaching
 - c. Tahun 1996 presiden Thabo Mbeki meluncurkan *African Renaissance*.
 - d. Tahun 1997 ditetapkan kurikulum 2005 didasarkan kepada pendekatan hasil, non diskriminatif.
 - e. Tahun 1996-1998 didirikan *Truth and Reconciliation Commission*, bertujuan mempromosikan kesatuan nasional, konsolidasi dan mengembangkan budaya. Dalam bidang pendidikan, mengembangkan kurikulum hak azasi manusia yang meliputi: anti *rasisme*, anti *diskriminasi gender*, mengutamakan resolusi konflik dan menghormati hak anak (Tilaar, 2004:166).

Gema wacana pendidikan multikultural mulai berhembus sampai di Indonesia sejak tahun 2000 diselenggarakan berbagai diskusi, workshop, seminar, penelitian, dan penerbitan jurnal yang bertema multikulturalisme. Jurnal Antropologi Indonesia dari Universitas Indonesia mengadakan Simposium Internasional di Makasar, membahas isu multikulturalisme, seperti: demokrasi, Hak Azasi Manusia, Kewarganegaraan (Ali, 2011: 97).

Wacana pentingnya Pendidikan Multikultural di Indonesia yang digemakan melalui berbagai simposium dan workshop di atas, menurut para penggagasnya, dilatar belakangi oleh fakta bahwa

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak program tentang eksistensi sosial, etnik, dan kelompok keagamaan yang beragam. Problem tersebut disebabkan oleh adanya upaya penyeregaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintahan masa Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, maupun budayanya. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” pun diterapkan secara berat sebelah. Artinya, semangat ke-ika-an lebih menonjol daripada semangat ke-bhineka-an dalam pengelolaan Negara Indonesia (Ahmad Rois, 2013).

3. Urgensi Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar dalam membangun masyarakat Indonesia baru. Hal ini karena beberapa alasan: **Pertama**, masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis. **Kedua**, dunia kini makin terbuka di era globalisasi ini. **Ketiga**, Indonesia adalah negara demokrasi, di mana masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghormati hak azasi manusia dan eksistensi kebhinekaan bangsa dan masyarakat. Multikulturalisme bukan hanya merupakan prinsip dalam membangun masyarakat Indonesia baru, tetapi juga prinsip di semua tatanan kehidupan masyarakat. Tanpa multikulturalisme mustahil dapat dibangun suatu kesatuan masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, sebagaimana pendapat Tilaar (2004: 173) bahwa yang mendorong maraknya pandangan multikulturalisme dan yang mendorong pesatnya pemikiran tersebut sekurang-kurangnya ada tiga yaitu: HAM, globalisme, dan proses demokratisasi.

Menurut Choirul Mahfudz (2016: 216), Pendidikan Multikultural sangat urgen diterapkan di Indonesia karena beberapa alasan: (1) sarana alternatif pemecahan konflik, (2) agar siswa tidak tercerabut dari akar budayanya, (3) landasan pengembangan kurikulum nasional, (4) menjadikan masyarakat Indonesia yang multikultur.

a. Pendidikan Multikultural: alternatif pemecahan konflik

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di Indonesia yang secara realitas plural. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya (Chairul Mahfudz, 2016 : 216).

Kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, guna mengolah perbedaan menjadi suatu aset, bukan sebagai sumber konflik. Oleh karena itu, pendidikan multikultural memiliki tanggungjawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya global dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai budaya. Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural dapat dikatakan berhasil jika pada diri siswa terbentuk sikap hidup saling toleran, tidak bermusuhan, tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, ras, gender, bahasa, adat istiadat atau lainnya. Juga terciptanya kondisi nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat (Chairul Mahfudz, 2016: 217).

b. Siswa tidak tercerabut dari budayanya

Pendidikan Multikultural signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya saat berhadapan dengan berbagai budaya asing. Era globalisasi yang memungkinkan pertemuan berbagai budaya tidak dihindarkan, sehingga akan menjadi tantangan serius bagi siswa. Mengingat beragam kebudayaan di negeri ini, berbaur dengan banyak budaya asing yang kian mudah diperoleh melalui televisi, internet, dan lain-lain, maka untuk menyikapi realitas global tersebut, siswa hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas, akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Melalui Pendidikan Multikultural siswa memiliki pemahaman banyak budaya agar siswa tidak tercerabut dari akar budayanya (Chairul Mahfudz, 2016: 219)

c. Pengembangan Kurikulum Nasional

Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan Pendidikan Multikultural dapat dilakukan melalui langkah:

- a. Mengubah filosofi dari yang berlaku seragam, kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan.
- b. Konten harus berubah dari teori sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi ke pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki.
- c. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman budaya, politik, sosial, ekonomi tidak boleh hanya mendasarkan pada psikologi belajar, harus diseragamkan oleh institusi pendidikan.
- d. Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa harus berdasarkan tingkat isomorphisme tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, cara belajar yang bersifat individualist dan bersaing secara kompetitif individualistik diganti dengan model belajar kelompok dan bersaing secara kelompok. Dengan demikian perbedaan individu menjadi kekuatan kelompok, dan siswa menjadi terbiasa hidup dengan berbagai budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

d. Menjadikan Masyarakat Indonesia yang Multikultur

Membangun masyarakat Indonesia yang multikultur dapat terwujud apabila:

- a. Konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami urgensinya oleh bangsa Indonesia, serta ada keinginan untuk mengadopsi dan menjadikan sebagai pedoman hidup.
- b. Adanya kesamaan pemahaman antara para ahli mengenai makna multikulturalisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Upaya yang untuk mewujudkan cita-cita multikulturalisme.

Masalah multikultural merupakan sesuatu yang penting di Indonesia karena keunikan dan keanekaragaman budaya di Indonesia. Meski begitu, isu multikulturalisme masih merupakan hal baru di Indonesia. Baru-baru ini, beberapa peneliti dan makalah akademis semakin banyak membahas masalah ini pada tahun 2000-an (Suparlan, 2002; Lubis, 2006; Syaifuddin, 2006; Amirin, 2012). Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh perubahan politik dan sosial di Indonesia. Namun demikian, Indonesia perlu memikirkan kembali konsep pendidikan multikulturalnya sendiri. Suparlan (2002) mengatakan bahwa multikultural di AS dan Eropa berkembang dari kesadaran satu etnis (berarti orang kulit putih) menjadi multi-etnis (menerima keberagaman). Sebelum terjadi Perang Dunia II, Rakyat di Amerika Serikat dan Eropa, tampaknya hanya tahu satu-satunya masyarakat, itu adalah "orang kulit putih." Etnis lainnya adalah kelompok minoritas, tidak berdaya, subordinasi, didiskriminasi dengan pembatasan hak. Larangan diskriminasi warna dimulai pada 1960 setelah gerakan hak asasi manusia untuk kesetaraan pada tahun 1950-an (Suparlan, 2002). Berbeda dengan kelahiran sejarah multikulturalisme di Indonesia sebagai bangsa (*Journal of Education and Research Vol. 2 No. 10 October 2014: 317*).

Dalam Jurnal International, Yeni Rahmawati menjelaskan, menjadi multikultural tidak dapat dihindari, dan karena keragaman sudah merupakan identitas nasional di Indonesia. Fenomena keanekaragaman telah dinyatakan pada simbol nasional "Bhineka Tunggal Ika" (*Unity in Diversity*). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, masyarakat Indonesia memiliki kehidupan dalam komunitas yang beragam. Masalah multikultural adalah sesuatu yang penting di Indonesia karena keunikan dan keanekaragaman budaya di Indonesia. Meski begitu, isu multikulturalisme masih merupakan hal baru di Indonesia. Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh perubahan politik dan sosial di Indonesia. Namun demikian, Indonesia perlu memikirkan kembali konsep pendidikan multikulturalnya sendiri. Beberapa peneliti dan ilmuwan semakin banyak membahas masalah ini pada tahun 2000-

an seperti: (Suparlan, 2002; Lubis, 2006; Syaifuddin, 2006; Amirin, 2012 dalam *Journal of Education and Research* Vol. 2 No. 10 October 2014: 317).

Menurut Yeni Rahmawati, untuk mengembangkan Pendidikan Multikultural di Indonesia, suasana sekolah harus disiapkan untuk mendukung masalah ini. Mengutip pendapat Bank (2010) menyebutkan tentang dimensi pendidikan multikultural seperti integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi kesetaraan, dan pemberdayaan budaya sekolah. Tujuan utama dari pendidikan multikultural untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berfungsi dalam etnis mereka sendiri (*mikroculture*), bangsa (*macroculture*), etnis lain, dan komunitas global (*Journal of Education and Research* Vol. 2 No. 10 October 2014: 317).

Seperti disebutkan di atas, Indonesia telah menerima keberagaman bahkan ketika negara-negara lain berjuang dengan diskriminasi dan rasisme. Dalam pandangan historis, Indonesia memiliki landasan awal yang baik dalam mendukung keanekaragaman dan meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, menerima keanekaragaman dan perbedaan. Memang, orang Indonesia masih perlu belajar dari negara lain untuk menjaga keberagaman. Namun, kondisi ini tidak membuat bangsa Indonesia pesimis, tetapi orang Indonesia harus positif untuk mencapai masa depan. Hidup dalam keberagaman melekat dalam jiwa dan hasrat bangsa Indonesia. Orang-orang di Indonesia telah memiliki "Bhineka Tunggal Ika" dan "Panca Sila" sebagai simbol dan fondasi nasional dalam kehidupan multikultural. Untuk mengembangkan pandangan multikultural sendiri. "Bhineka tunggal Ika" tidak cukup hanya sebagai simbol nasional. Implikasi dari simbol ini sangat dibutuhkan. Kurikulum sekolah harus mengadopsi masalah ini. Keragaman budaya, agama, ras, suku, dan bahasa, harus ditawarkan kepada siswa (*Journal of Education and Research* Vol. 2 No. 10 October 2014: 323).

Jadi implikasi dari pengajaran seharusnya; lebih mendorong siswa untuk memiliki sikap peduli, saling bekerjasama, kepekaan

terhadap kebutuhan orang lain, pendekatan pembelajaran yang lebih personal, gaya dan karakteristik belajar yang lebih sensitif, dan memiliki pengetahuan karakteristik kelompok (Bank, 2010: 15). Poin lain untuk mendukung gagasan ini adalah sistem sosial dan gerakan komunitas untuk mempertahankan multikultural. Secara umum setidaknya ada empat kelompok orang yang utama yang dapat diatur dalam gerakan sosial untuk mendukung pendidikan multikultural: basis konstituen, pemegang kekuasaan, aktivis, dan masyarakat umum (Sleeter, 1996).

Semua bagian dari masyarakat ini harus bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Perubahan sosial komunitas tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan bersama-sama. Mengenai ini Althusser (1970) menyatakan, tidak ada produktivitas tanpa dukungan dari unsur produktivitas itu sendiri. Segala jenis produktivitas tidak dapat ditentukan dengan keputusan "top down"; itu harus dibangun dari bawah, sehingga menginspirasi bagaimana menerapkan "Bhineka Tunggal Ika" di seluruh negara. Itu tidak dibangun dari atas, tetapi harus dimulai dari bawah dengan dukungan dari semua elemen (*Journal of Education and Research* Vol. 2 No. 10 October 2014: 323).

4. Karakteristik Pendidikan Multikultural

Berdasarkan pengertian tentang pendidikan multikultural seperti dijelaskan di atas, maka karakteristik pendidikan multikultural dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.

Prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan merupakan prinsip yang mendasari pendidikan multikultural baik pada level ide, proses maupun gerakan. Prinsip ini mengakui adanya hak persamaan untuk semua anak dalam pendidikan. Sebelumnya, di Amerika, Kanada, dan Jerman, tidak memberikan tempat kepada anak-anak dari keluarga kulit hitam, Mereka juga tidak memberikan hak yang sama kepada anak kulit hitam dan imigran.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan. Di beberapa negara berkembang seperti Afrika, Banglades, Brazil, Cina Mesir, India, Indonesia, Mexico dan Nigeria dan Pakistan, kesempatan pendidikan hanya diberikan kepada anak dari keluarga kelas menengah ke atas. Beberapa anak dari keluarga miskin, tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. (Ali, 2011 : 110). Perlakuan yang tidak sama terhadap mereka jelas bertolak belakang dengan prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu UNESCO, memberikan program *Education for All*, sebagai jawaban terhadap permasalahan pendidikan yang belum secara merata dinikmati oleh semua anak dari berbagai latar belakang.

Menurut Dede Rosada dalam Ali (2011 : 110) menjelaskan bahwa program *Education for all* dari UNESCO, tidak hanya memberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga perlakuan yang sama untuk memperoleh pelajaran di dalam kelas. Dengan perlakuan yang sama mereka akan memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka. Artinya, melalui pendidikan multikultural, siswa akan memperoleh perhatian yang sama tanpa melihat latar belakang ras, warna kulit, etnik, agama, bahasa dan budaya peserta didik. Pendidikan multikultural tidak membedakan peserta didik yang bodoh dan pandai, atau yang rajin dan malas.

Prinsip keadilan sesuai dengan ajaran QS. Al-Syu'ara [26]: 38, QS Al-Hadid [57]:25, QS. Al-A'raf [7]: 181, telah memberi landasan moral dan etik, bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan adil baik dalam ucapan, sikap, dan tindakan, baik dalam interaksi sesama muslim maupun interaksi sosial antara orang Muslim dengan non Muslim. Prinsip keadilan juga berlaku dalam interaksi sosial antara kelompok etnis Arab dan non Arab, kelompok kulit hitam dengan kulit putih, dan lainnya. Artinya, Islam tidak mengajarkan doktrin rasisme.

Dalam konteks Islam, menurut Ahmad Rois (2013) tidak ada diskriminasi radikal di dalam kelas, meskipun ada pemisahan antara kelas laki-laki dan perempuan, itu hanya dilakukan sebagai tindakan antisipasi terhadap pelanggaran moral, baik dalam pandangan Islam dan kultur masyarakat. Dengan demikian pemisahan kelas tersebut bukanlah tindak diskriminatif. Prinsip demokrasi sesuai dengan doktrin Islam tentang musyawarah, kesetaraan (*al-musawa*), dan keadilan (*al-adl*) telah dipraktikkan Rasulullah ketika mengelola keragaman di Madinah.

b. Prinsip kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian.

Pendidikan multikultural menganut orientasi hidup universal, oleh karena itu, pendidikan multikultural menentang praktek-praktek hidup yang menodai nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian, seperti kekerasan, konflik, permusuhan dan individualistik. Orientasi kemanusiaan, menempatkan harkat dan mabat manusia di atas segalanya. Menurut Nimrod Aloni (1999) dalam *Encyclopedia Humanistic of Education*, prinsip kemanusiaan memiliki nilai-nilai: (1) otonomi, rasional dan penghargaan untuk semua orang, (2) kesetaraan dan kebersamaan, (3) komitmen untuk membantu semua orang untuk pengembangan potensinya. Nilai yang pertama bersifat filosofis, nilai yang kedua bersifat sosio-politis, dan nilai yang ketiga bersifat paedagogis (Ali, 2011:115).

Prinsip kemanusiaan, sesuai dengan prinsip Islam *hablu min al-nas*, menurut Abdul Aziz Syachedina dalam Ali (2011 : 115), menempatkan manusia pada dua posisi. Pertama, posisi manusia sebagai makhluk terbaik dari Allah. Kedua, manusia harus tunduk kepada hukum Allah. Dua posisi tersebut, menurut Hasan Hanafi, melahirkan doktrin pentingnya pemeliharaan kehidupan manusia:

- a. Pemeliharaan kehidupan manusia sebagai tolok ukur utama
- b. Pemeliharaan akal manusia
- c. Perjuangan untuk kebenaran pengetahuan

- d. Menjunjung tinggi harkat manusia dan kehormatan masyarakat
- e. Pemeliharaan kesejahteraan individu dan kelompok.

Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari budaya manapun dengan harapan tercipta kedamaian sejati, keamanan, yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan tanpa rekayasa (Ngainun, Syauqi, 2017: 50).

Dalam prinsip kebersamaan terdapat kesatuan perasaan dan sikap diantara individu yang berbeda dalam kelompok, baik keluarga, komunitas, suku maupun kelas. Kebersamaan menandai pendidikan multikulturalisme, karena merupakan nilai yang mendasari hubungan seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan kelompok dan komunitas. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang prinsip *ta'aruf* dan *ta'awun* (QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS. Al-Maidah [5]: 2). Kedua ayat ini menjadi landasan dalam menjalin hubungan sosial di masyarakat majemuk.

Prinsip kedamaian merupakan harapan semua umat manusia. Dalam Ensiklopedia dijelaskan tiga prinsip kedamaian, (dalam Ali, 2011 : 117) yaitu: (a) *peace as an absence of war*, (b) *peace of selfless of act of love*, (c) *peace as an absence of violence or of evil; presence of justice*.

Dari ketiga prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedamaian hidup dalam masyarakat dapat terwujud dengan cara menghindari peperangan, mementingkan diri sendiri, dan tindakan kekerasan. Prinsip kedamaian ini sesuai dengan prinsip Islam. Doktrin ini menurut Maulana Wahiduddin Khan mengandung pengertian bahwa Islam menawarkan visi hidup damai di tengah masyarakat yang beragam (Ali, 2011 : 117).

c. Prinsip mengakui, menerima, dan menghargai keragaman

Untuk mengembangkan orientasi hidup kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang

majemuk, maka diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap sosial yang positif ini, menurut Donna M. Gollnick dan Lawrence A. Blum antara lain, mengambil bentuk kesediaan untuk mengakui, menerima dan menghargai keragaman. Pendidikan multikultural memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan sikap-sikap sosial yang positif tersebut. Dengan demikian, pendidikan multikultural menolak sikap-sikap sosial yang cenderung rasial, stereotip (mengejek objek tertentu) dan berprasangka buruk kepada orang atau kelompok lain yang berbeda suku, ras, bahasa, budaya dan agama (Ali, 2011 : 119)

Menurut Donna, sikap menerima, mengakui dan menghargai keragaman ini diperlukan dalam kehidupan sosial di masyarakat yang majemuk. Karena dalam pandangannya, penerimaan, pengakuan, dan penghargaan terhadap keragaman laksana mosaik dalam suatu masyarakat. Didalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil (microculture) yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar (macroculture). Menurut Lawrence, penerimaan, pengakuan, dan penghargaan terhadap keragaman merupakan sikap sosial yang diperlukan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis didalam masyarakat yang majemuk (Ali, 2011: 119).

Dalam persepektif Islam, gejala keragaman harus diterima, diakui dan dihargai. Istilah keragaman sendiri dalam pandangan Imarah dalam Ali (2011:119) paralel dengan konsep *al-ta'adudiyat* (pluralitas) dan *al-tanawwu* (keragaman) dalam Islam. Namun, menurut Imarah kedua prinsip tersebut tidak berlaku bagi Allah, karena Allah tidak memiliki sisi parsial dan plural. Allah dzat Maha Sempurna, dengan segala sifat kesempurnaannya yang tercermin dalam *Asma al-Husna*. Kedua konsep tersebut hanya cocok untuk makhluk-makhluk Allah seperti benda-benda mati, hewan, manusia dan pemikirannya. Oleh karena keempat unsur tersebut berdiri di atas kemajemukan, interrelasi, serta tersusun dari partikel dan unsur yang terpisah. Dengan kata lain, Keesaan hanya milik

Allah SWT, sedangkan kemajemukan menjadi ciri khas dan milik seluruh dimensi kehidupan makhluk. Dalam QS. Al-Rum [30]: 22, QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS Hud [11]: 118-119, QS. Al-Maidah [5]: 48, dan QS Al-Baqarah [2]:62 telah dijelaskan bahwa keragaman meliputi keragaman makhluk di langit dan di bumi. Keragaman manusia dari segi warna kulit, bahasa, bangsa, agama, kepercayaan, paham/aliran, adat istiadat, dan sistem kehidupan merupakan Sunnatullah, dan selalu ada sepanjang masa. Keragaman dibutuhkan oleh manusia sebagai hikmah dan pelajaran agar manusia dapat saling bekerjasama, mengenal, dan berkompetisi di kalangan pihak-pihak yang berbeda.

5. Pendidikan Islam Multikultural

Pendidikan Multikultural secara historis pertama kali dikembangkan di lembaga pendidikan tertentu di Amerika, diwarnai oleh diskriminasi etnis, namun belakangan mendapat perhatian serius dari pemerintah, dengan maksud menghindari diskriminasi etnis dalam pendidikan. Pendidikan multikultural sendiri merupakan strategi pembelajaran yang berlatar belakang budaya siswa yang bermacam-macam digunakan sebagai usaha meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Hal ini dirancang untuk memperluas dan menunjang konsep budaya, perbedaan, kesamaan, dan demokrasi (Episteme, volume 8, No.2, Desember, 2013: 303).

Pendidikan Multikultural memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam tentang kedamaian, keadilan, kebersamaan, sikap menghargai, toleransi, dan kesetaraan. Meskipun begitu, prinsip Pendidikan Multikultural dari Barat beranjak dari filsafat dan konsep Hak Azasi Manusia, prinsip Pendidikan Multikultural dalam Islam beranjak dari wahyu seperti digambarkan Abdullah Ali (2011:124):

Tabel 2.1

Pendidikan Multikultur dalam Perspektif Barat & Islam

Perspektif Barat	Perspektif Islam
Demokrasi, kesetaraan, Keadilan	Al-Musyawahah, al-musawa, al-‘adl
Kemanusiaan, kebersamaan, kedamaian	Habl min al-nas, al-ta’aruf, al-ta’awun, al-salam
Toleransi, empati, simpati, solidaritas social	Al-ta’addudiyat, al-tanawwu’, al-tasamuh, al-rahmah, al-‘afw, al-ihsan

Dalam pandangan Ngainun Naim dan Syauqi (2017: 53) konsep pendidikan Islam Multikulturalis meliputi:

1. Pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keragaman.
2. Pendidikan Islam multikultural merupakan usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas pluralis-multikultural.
3. Pendidikan islam pluralis multikulturalis tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan identitas suku, agama, ras dan budaya.
4. Pendidikan Islam pluralis multikultural memberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembangnya *sense of self* kepada setiap anak didik

Rifatul Mahfudhoh & Mohammad Yahya Anshari (2015), menawarkan beberapa nilai Islam dalam Pendidikan Multikultural mencakup nilai dasar, implementasi, dan tujuan, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pendidikan Islam Multikultural

Kategori	Materi
----------	--------

<p>Nilai Dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tawhid</i>. Sebagai ruh bagi manusia. Suatu cara pandang yang diarahkan untuk merealisasi ketauhidan Tuhan dalam relasi antara manusia. Tuhan menjadi sumber utama dari kehidupan manusia; sesama manusia adalah bersaudara di bawah naungan tauhid (<i>ukhuwah basyariyyah</i>). 2. <i>Ummah</i> (kehidupan bersama). Setiap orang memiliki akses yang sama sebagai penghuni alam semesta, hidup berdampingan, mengikat hubungan sosial yang harmonis baik kepada kelompok, komunitas, dan masyarakat luas. 3. <i>Rahmah</i> (kasih sayang). Mencontoh sifat-sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, manusia diciptakan Tuhan tidak lain hanya untuk berinteraksi dan berkomunikasi atas dasar semangat cinta dan kepedulian. 4. <i>Al-musawa</i> (<i>egalitarianism</i>). Semua manusia adalah bersaudara dan setara di bawah naungan Allah, meskipun Allah menciptakan perbedaan seks, gender, ras, warna kulit, dan agama. Oleh karena perbedaan itu sunnatullah, sehingga harus disikapi dengan semangat persamaan hak dan kewajiban.
<p>Implementasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ta`aruf, ihsan</i> (saling mengenal, berlaku baik). Kesadaran dan kemauan untuk hidup bersama, berdampingan, bertetangga dengan orang lain yang berasal dari budaya, etika, dan agama berbeda untuk memperluas hubungan sosial, saling memberi, dan rela berkorban. 2. <i>Tafahum</i> (saling memahami). Kesadaran adanya perbedaan nilai antara satu dengan kelompok lain, sehingga harus saling melengkapi untuk menciptakan hubungan yang dinamis dan bekerja sama dengan kelompok berbeda keyakinan dalam satu hubungan. Sahabat sejati adalah partner dialog yang selalu menunjukkan komitmen pada nilai

	<p>kebersamaan, saling memahami perbedaan, dan keunikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Takrim</i> (saling menghormati). Saling menghormati adalah nilai-nilai universal dari setiap agama dan budaya, bersedia mendengar perbedaan pendapat dan cara pandang dan menghormati perbedaan individu/kelompok. 4. <i>Fastabiq al-khayrat</i> (kompetisi yang sehat). Persamaan dalam perbedaan mendorong lahir komunikasi dan kompetisi antar individu dan kelompok untuk meraih kualitas dan prestasi tinggi dalam setiap aspek kehidupan sosial. 5. <i>Amanah</i> (saling mempercayai). Menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan antar manusia. 6. <i>Husn al-dzan (positive thinking)</i>. Berhati-hati dalam memvonis seseorang atau sesuatu (<i>truth claim</i>), berusaha untuk melakukan klarifikasi dari sumber aslinya. 7. <i>Tasamuh</i> (toleransi). Menghormati perbedaan dan keragaman agama, budaya, dan etnisitas. 8. <i>Afw, maghfirah</i> (sifat pemaaf). Suka memaafkan berarti melupakan segala bentuk kesalahan, kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang baik sengaja maupun, baik sedang mempunyai kekuasaan maupun tidak. 9. <i>Sulh</i> (rekonsiliasi). Memilih jalan untuk menyepakati konsep kebenaran, kedamaian, dan hukum setelah terjadi pertikaian. 10. <i>Ishlah</i> (resolusi konflik). Hubungan kuat antara dimensi psikologis dan politik untuk mencari jalan tengah yang saling menguntungkan, menyelesaikan perselisihan dan konflik.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salam (peace)</i>. Menciptakan, menjaga, membangun perdamaian.

	<p>2. <i>Layn</i> (anti kekerasan). Perbuatan, perkataan, sikap, perilaku untuk menjaga fisik, mental, sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup.</p> <p>3. <i>`Adl</i> (keadilan). Kesetaraan sosial untuk senantiasa menjaga, berbagi, bersikap moderat merespon perbedaan, terbuka dalam berperilaku dan bersikap.</p>
--	---

Tujuan akhir Pendidikan Islam Multikultural menurut Ali (2011 : 128) mencakup tiga ranah: pengetahuan (kognitif), sikap (*attitude*), pemelajaran (*instructional*). Kompetensi pengetahuan multikultural terlihat dari indikator: memiliki pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, kemampuan menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Kompetensi sikap multikultural terlihat dari indikator: memiliki kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, responsi terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Kompetensi pembelajaran multicultural terlihat dari indikator: mampu memperbaiki distorsi, stereotipe, kesalah-pahaman tentang kelompok etnik, baik dalam buku teks maupun dalam media pembelajaran, mampu menerapkan strategi yang tepat dalam menghadapi perbedaan, mampu berkomunikasi antar budaya, dan menjelaskan dinamika kultural. James Lynnch (dalam Ali, 2011:128) menyebutkan, hanya ada dua jenis kompetensi yaitu penghargaan kepada orang lain dan penghargaan kepada diri sendiri.

B. RADIKALISME

1. Makna Radikalisme

a. Pengertian Radikal dan Radikalisme

Kamus umum Bahasa Indonesia memberi definisi radikalisme kepada tiga pengertian: (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan

sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam politik (<https://kbbi.web.id/radikalisme>).

Secara epistemologis, radikal berarti “akar” atau mendalam. Namun, kini radikal atau radikalisme tertuju kepada kelompok agama yang menyukai kekerasan. Secara semantic radikalisme ialah paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan social dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Dalam Ensiklopedi Indonesia, radikalisme adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideology yang mereka anut.

Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin *radix*, yang artinya akar, pangkal, dan bagian bawah atau bisa disebut secara menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan, sedangkan secara terminologi adalah aliran atau faham yang radikal terhadap tatanan politik, faham atau aliran yang menuntut perubahan sosial politik dalam suatu negara secara keras. Secara umum radikalisme dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang mengarah kepada hal-hal negatif. Dari istilah itu muncul istilah ekstrim, anti barat, anti Amerika dan terorisme (Endang Turmudzi & Riza Sihbudi, 2005).

Menurut para ahli radikalisme adalah *ideology* (ide, gagasan) dan paham yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghabisi musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama.

Di awal Abad 21 ini, persoalan radikalisme Islam menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Pasca-gegap gempita yang

terjadi pada akhir 1980-an, ketika Uni Soviet menarik diri dari Afghanistan, dunia internasional dikejutkan kembali oleh kenyataan munculnya serangkaian aksi-aksi kekerasan teroristik, yang diduga kuat melibatkan kelompok-kelompok Islam radikal. Serangan terhadap Amerika Serikat (AS), WTC dan markas Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon), 11 September 2001, seolah menjadi titik mula dari serangkaian aksi teror lainnya yang menjalar di beberapa tempat belahan dunia.

Radikalisme sendiri dapat dibedakan menjadi dua level, yaitu level pemikiran dan level tindakan atau aksi. Pada level pemikiran radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan yang intinya mendukung cara-cara penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pada level tindakan, radikalisme bisa berada di ranah sosial politik dan agama. Pada ranah politik tampak dalam tindakan memaksakan kehendak dengan cara-cara yang inkonstitusional, tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial. Pada ranah agama, radikalisme tercermin dari tindakan destruktif, anarkhis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok agama lain, atau dari kelompok seagama terhadap kelompok yang berbeda paham.

Sebagaimana dinyatakan Jainuri (2016: 4), dalam sejarah umat manusia, termasuk umat muslim, radikalisme selalu muncul dalam pemikiran maupun gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang ide, gagasan, nilai yang dimiliki oleh seseorang yang diyakininya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah. Ia sangat tertutup, biasanya sulit diajak berinteraksi, ia mau berinteraksidan berkomunikasi hanya dengan kelompoknya saja. Orang yang memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak mau menerima pemikiran lain selain yang dimilikinya. Otoritas pengetahuan yang dimilikinya diperoleh dan dikaitkan kepada figur tertentu yang dinilai tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu, kaum radikal tidak mau menerima figur lain sebagai rujukan pengetahuannya. Bagi mereka berlaku istilah siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan. Dalam dialog cenderung, tidak mau

memahami keragaman pandangan orang lain, bahkan mereka ingin memadukan pandangan yang berbeda dengan pandangan dan pendapat menurut standar diri sendiri dan memaksakan kehendak.

Dalam gerakan, radikalisme ditandai oleh aksi ekstrim yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik gerakan radikal dapat dilihat dari perbuatan seperti: makar, revolusi, demonstrasi, protes sosial yang anarkis, serta berbagai tindakan kekerasan yang merusak. Orang ekstrim biasanya reaktif terhadap persoalan yang dihadapi dan melakukan tindakan kekerasan dalam menjawab persoalan. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum radikal sesungguhnya didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakininya. Gerakan radikal ingin mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicita-citakan yang berbeda dari yang ada (Jainuri, 2016:5).

Menurut George A. Theodore & Achilles G Theodore (dalam Jainuri, 2016:5), radikalisme dalam tinjauan ideologi, memiliki dua makna. **Pertama**, ideologi yang non-kompromis. Berkaitan dengan penerimaan pembangunan, perubahan dan konsep kemajuan. Kelompok ini disebut kaum radikal kanan. Sedangkan ideologi non kompromis yang mendasarkan pada nilai-nilai masa lalu, yang tidak mau menerima perubahan disebut sebagai radikal kiri. Apabila dikaitkan dengan politik, radikalisme adalah orientasi politik yang cenderung menerima perubahan melalui revolusi. Artinya, radikalisme adalah keyakinan akan adanya perubahan dalam masyarakat, dan perubahan ini hanya mungkin terjadi melalui cara-cara revolusi. Istilah lain yang disematkan untuk kaum radikal adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri, lawan dari moderat. Radikalisme dalam pemikiran dapat ditemukan dalam dua kelompok yang berbeda: kaum modernis-tradisionalis, sekularis- puritan, liberalis-konservatif, dan globalis-nasionalis. Apabila masing-masing tidak saling mengenal atau menerima ide atau pikiran satu sama lain, di situlah sikap radikal muncul, karena biasanya masing-masing mempertahankan pandangan dan kebenarannya sendiri. **Kedua**, radikalisme dalam gerakan merupakan pendekatan non kompromis

terhadap persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang ditandai oleh ketidakpuasan terhadap status quo dan keinginan melakukan perubahan secara cepat dengan cara yang ekstrim. Dalam radikalisme gerakan juga dikenal istilah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Keduanya ingin melakukan perubahan dalam masyarakat dan kepemimpinan secara fundamental, meskipun mereka memiliki cara yang berbeda (Jainuri, 2016:7).

Menurut Azyumardi Azra (2016), radikalisme merupakan jiwa yang membawa pada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan yang biasanya dengan cara kekerasan dan menggantinya dengan cara baru. Secara rinci radikalisme mengandung makna: (1). mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan; (2). negara atau rezim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara dan rezim lain dan 3) negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional (Abdul Khalim, 2017: 74). Menurut Masduqi (dalam Abdul Khalim, 2017: 74), radikalisme adalah fanatik terhadap satu pendapat dan menegasikan adanya pendapat orang lain, mengabaikan terhadap kesejarahan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham, dan tekstual dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensi syaria'at (*maqasyid al-syari'at*).

Dalam khazanah keislaman, menurut Irwan Masduqi dalam Abdul Khalim, (2017: 74) radikalisme disebut dengan *al-tasyarruf*, artinya berlebihan, berdiri di posisi ekstrim dan jauh dari posisi tengah-tengah atau melewati batas kewajaran. Dalam teks-teks agama, radikalisme disebut dengan istilah *al-ghuluw*, *al-tasyaddud*, dan *al-tanathu'*.

Sedangkan menurut BNPT dalam Hendropriyono (2009: 13), radikalisme merupakan embrio dari lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*), dan aksi yang ekstrim.

Adapun ciri-ciri dari sikap dan faham radikal antara lain:

1. Intoleran: tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain
2. Fanatik: merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah
3. Eksklusif: membedakan diri dari orang lain pada umumnya
4. Revolusioner: menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa seseorang yang memiliki sikap dan pemahaman radikal belum tentu ia melakukan tindakan teroris atau menjadi teroris, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang berbuat teroris, atau termotivasi untuk bergabung dengan gerakan tersebut, antara lain: Pertama, faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri: kemiskinan, ketidakadilan, atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti: ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal.

2. Ciri Radikalisme

Radikalisme memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Radikalisme terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan.
2. Melakukan upaya penolakan secara terus menerus dan menuntut terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki.
3. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan.
4. Penganut Radikalisme tidak segan menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya.

5. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua yang bertentangan dengannya adalah bersalah.

Menurut Syahrin Harahap (2017: 9) ciri-ciri radikal dan teroris adalah sebagai berikut:

1. Tekstualis dan kaku dalam bersikap dan memahami teks-teks suci, mengakibatkan kesimpulan yang meloncat.
2. Ekstrim, fundamentalis dan eksklusif. Ekstrim artinya selalu menunjukkan sikap berseberangan dengan mainstream, atau arus umum, terutama pemerintah. Fundamentalis karena berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara tekstualis dan kaku termasuk dalam kehidupan beragama.
3. Eksklusif. Orang radikal selalu memandang paham dan caranya sendirinyalah yang benar
4. Selalu bersemangat mengoreksi orang lain, menolak bahkan melawan orang lain.
5. Membenarkan cara-cara kekerasan dan menakutkan dalam mengoreksi orang lain dan dalam menegakkan serta mengembangkan faham dan ideologinya
6. Memiliki kesetiaan lintas negara
7. Rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas
8. Oleh karena rekonstruksi musuh yang tidak jelas, maka melakukan *all out war* (perang mati-matian terhadap yang dianggap musuh agamanya dan yang melakukan kemungkaran, meskipun tidak secara langsung memusuhi mereka, membunuh dan mengusirnya sebagai syarat perang agama
9. Sangat *concern* pada isu-isu penegakan negara agama (seperti khilafah) karena dianggap berhasil mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera.
10. Sangat menekankan tauhidiah hakimiyyah. Dan menghukum orang kafir karena tidak menjadikan dasar agama sebagai dasar hukum bernegara dan bermasyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan radikalisme selalu memiliki konotasi negatif. Padahal, radikalisme juga memiliki sisi positif, hal ini seperti dikemukakan oleh Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barry (1994) dalam Kamus Ilmiah Populer bahwa radikalisme adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai kemajuan. Afif Muhammad, yang dikutip oleh Muslih (2015:80) mengatakan bahwa predikat radikal bisa dikenakan pada tataran pemikiran atau faham tertentu sehingga muncul istilah pemikiran radikal dan bisa pula dikenakan untuk gerakan. Atas dasar itu radikalisme bisa dipahami dalam dua dimensi yang berbeda, yakni dimensi pemikiran dan dimensi gerakan. Dalam dimensi pemikiran radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan. Kadang dalam dimensi wacana atau pemikiran dibutuhkan sikap radix, artinya membahas suatu hal secara tuntas, sampai ke akar-akarnya, melihat dari berbagai sudut pandang dan lainnya. Filsafat adalah hasil berfikir secara radikal, sehingga para filosof adalah orang-orang yang radikal. Dalam konotasi ini radikal memiliki makna yang positif.

Agama mengajarkan faham dan keyakinan secara radikal dalam arti mendalam sampai ke akar-akarnya, akan tetapi agama tidak mengajarkan paham radikalisme seperti pada pemaknaan yang berkembang ahir-ahir ini, yang cenderung negatif, memandang keyakinan, faham, dan caranya beragama yang paling benar dan yang lain salah, bahkan mungkar. Menegakkan faham dan keyakinan secara kekerasan, teror bahkan melakukan pembunuhan (Syahrin Harahap, 2017: 29).

3. Islam dan Radikalisme

Radikalisme sering dikaitkan dengan agama tertentu, khususnya Islam. Hal ini dapat kita lihat dari mulai munculnya ISIS yang melakukan teror terhadap beberapa negara di dunia dengan menggunakan symbol-simbol Islam dalam setiap aksi teror mereka. Tindakan ISIS dan dukungan dari sebagian umat Islam terhadap ISIS

pada akhirnya sebagian kecil masyarakat dunia menganggap ISIS merupakan gambaran dari ajaran Islam (Ulin Nuha, 2014).

Umat Islam seringkali berada dalam posisi tersudutkan, hal ini terjadi selain karena kekacauan dalam melihat Islam, dalam arti normatif sebagai ajaran, dengan Islam dalam arti rasional, hasil pemikiran ahli, ulama, dan Islam dalam arti sosiologis empiris, juga karena perilaku sebagian orang Islam dan juga karena Islam sering dicatut untuk tindakan-tindakan teror. Seperti dalam Kasus pengeboman WTC di Amerika Serikat 11 September 2001, Islam dicatut dalam tindakan tersebut, meskipun tidak terbukti (Syahrin Harahap, 2017: 31).

Mengaitkan Islam dengan radikalisme jelas tidak memiliki relevansi, karena Islam sebagai agama tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Islam adalah agama *Rahmatan lil a'lamin*. Islam disebarkan justru untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian bagi umat manusia di muka bumi. Sekalipun dalam Islam ada ajaran tentang jihad atau peperangan, tetapi Islam memberi batasan-batasan yang tegas tentang etika, aturan dan batasan berjihad dalam Islam.

Dari makna generiknya saja, terorisme dan radikalisme jelas bertolak belakang dengan Islam. Terorisme memiliki makna ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan, kebencian dan bahkan pembunuhan. Sedangkan Islam bermakna keselamatan, penyerahan diri, kecintaan kepada Tuhan. Kecintaan kepada Tuhan berarti kecintaan kepada sesama dan mendambakan kehidupan situasi masyarakat yang tanpa kekacauan (Syahrin Harahap, 2017: 33).

Mohamad Ulin Nuha (2014 : 25) dalam tulisannya berjudul "*Geneologi dan Ideologi Gerakan Radikal Islam Kontemporer di Indonesia*", menjelaskan bahwa asal-usul gerakan Islam Radikal di Indonesia berasal dari kelompok Islam Fundamentalis. Kelompok Islam fundamentalis (seringkali) dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas beragam peristiwa berdarah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai istilah ditawarkan

oleh para pemikir, baik non-Muslim maupun Muslim, untuk (sekedar) memberikan deskripsi paling-sempurna tentang kelompok ini. Misalnya, kelompok radikalisme (*Islam Revolusioner*), *Islamist*, dan *Neo-fundamentalisme*. Beragam terma itu karena digunakan secara bergantian dalam literatur gerakan Islam kontemporer dan Barat menyebutnya sebagai radikalisme dan terorisme.

Sejalan dengan pendapat di atas, Afadhal, dkk, menyatakan istilah radikalisme pada dasarnya sangat erat dengan istilah fundamentalisme. Keduanya sama-sama mendasarkan pada pemikiran keagamaan dan bisa muncul pada agama apa saja. Keduanya menunjuk kepada gerakan keagamaan yang eksklusif, menarik perbedaan nyata antara mereka dengan kelompok lain, keduanya juga cenderung menonjolkan identitas fisik kelompok (Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, 2005: 4-5).

Fundamentalisme sendiri adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan untuk kembali kepada agama tadi jika dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat (Abdul Hakim, 2017: 74).

Di negara-negara Timur Tengah, gerakan radikalisme Islam telah berakar-urat dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Akan tetapi, dalam hal geneologinya, menurut Oliver Roy menegaskan bahwa Islam radikal berasal dari dua organisasi keagamaan, yakni kelompok *al-Ikhwān al-Muslimīn* (Hasan al-Banna, 1906-1949), Mesir dan *Jamaat al-Islami* (Abu A'la al-Mawdudi, 1903-1979), Pakistan). Dari keduanya kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan Islam radikal di berbagai belahan dunia Muslim, meski berbeda bentuk, dan tidak terkecuali Indonesia (Ulin Nuha, 2014: 33).

Dalam konteks Indonesia, komunitas usroh yang berkembang di kampus-kampus pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, ditemukan ajaran di samping dari kedua tokoh di atas juga berasal dari ajaran Sayyid Qutb (1909-1966) dan Muhammad Qutb. Ajaran keduanya menjadi menu wajib bagi para anggotanya untuk

membangkitkan kesadaran Islam. Kelompok tersebut begitu menarik perhatian banyak kalangan pada masa itu, sejauh dapat diamati citra fundamentalisme Islam setidaknya, apabila dikaitkan dengan konteks sosial politik kekinian, hampir selalu diparalelkan dengan sikap, pemikiran, pandangan hidup dan perilaku yang berdimensi negatif. Kelompok inilah yang pada perkembangan berikutnya ditengarai menjadi cikal bakal munculnya kelompok Islam radikal saat ini (Ulin Nuha, 2014: 34)

Lebih lanjut Ulin Nuha (2014 : 32) menyatakan tentang sejarah gerakan radikalisme Islam dari Timur tengah hingga ke Indonesia. Penamaan radikalisme Islam didasarkan atas dua alasan; (1) istilah ini merupakan sebuah fenomena ideologis, yang pendekatannya harus dilakukan dengan memusatkan pada makna ideologis, dan mengesampingkan akibat serta konteks sosial, dan (2) istilah ini tidak menunjuk pada doktrin, kelompok atau gerakan tunggal tetapi menunjukkan beberapa karakteristik tertentu dari sejumlah doktrin, kelompok, dan gerakan. Karena itu, istilah ini didefinisikan sebagai orientasi kelompok ekstrim dari kebangkitan Islam modern.

Di Indonesia, meminjam pembacaan M. Zaki Mubarak, Jamhari dan Jajang Jahroni (dalam Ulin Nuha, 2014) menjelaskan “Islam radikal kontemporer teridentifikasi ke dalam lima kelompok, yakni: Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahl Sunnah wa al-Jamaah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI), dan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

Islam radikal secara geneologi, tidak terkecuali di Indonesia berasal dari dua organisasi besar keagamaan yakni kelompok *al-Ikhwah al-muslimin* Hasan Al-Bana dari Mesir, dan kelompok *Jama'at Islami* Abu A'la Maududi dari Pakistan, kemudian gerakan tersebut bermetamorfosis di berbagai belahan dunia menjadi gerakan Islam radikal dan lazim disebut gerakan transnasional.

Beranjak dari pengertian radikalisme di atas, penelitian ini tidak bermaksud meneliti gerakan radikalisme secara mendalam, tetapi konsep radikalisme dalam penelitian ini dimaknai sebagai implikasi

dari pendidikan multikultural terhadap santeri, di mana santeri berubah sikap dan perilakunya tidak radikal yang diwujudkan dalam kehidupan keseharian di lingkungan pondok pesantren. Terdapat beberapa indikator radikalisme, seperti: ujaran kebencian, sikap negatif terhadap pemeluk agama lain, sikap positif terhadap paham khilafah, kebencian terhadap minoritas dan pemimpin perempuan, dan lain-lain.

C. PONDOK PESANTREN

1. Makna Pondok Pesantren

Istilah pesantren berasal dari akar kata santri, selanjutnya diberi awalan pe- dan akhiran an, disatukan menjadi “pe-santri-an” yang artinya tempat santri. John berpendapat istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru ngaji. Sedangkan CC Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* berasal dari bahasa India yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *Shastri* sendiri berasal dari kata *shastra* artinya buku suci atau buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (Dhofier, 1994:18).

Setidaknya ada empat teori yang menjelaskan tentang asal-usul perkataan santri, yaitu berasal dari bahasa Sanksekerta, Jawa, Tamil dan India. Abu Hamid, dalam Ali Anwar (2011: 23) menyebutkan istilah pesantren berasal dari bahasa sanksekerta, yang berasal dari kata *sant* artinya orang baik, disambung dengan kata *tra*, yang berarti menolong. *Santeri* berarti orang baik yang suka menolong, sedangkan kata pesantren berarti tempat membina manusia menjadi orang baik.

Nurcholis Madjid memberikan asal-usul kata santri dalam dua pandangan. Pertama, berasal dari bahasa sanskerta *sastri*, artinya melek huruf. Kedua, kata *santeri* berasal dari bahasa Jawa, *cantrik*, artinya seseorang yang mengabdikan kepada seorang guru. Misalnya, seseorang yang ingin menguasai keahlian atau kepandaian dalam pewayangan, menjadi dalang, atau penabuh gamelan, ia akan mengikuti seseorang yang sudah ahli dibidang tersebut. Hubungan

guru-cantrik ini berubah menjadi guru-santri. Karena istilah guru dipakai secara luas, untuk guru yang terkemuka kemudian dinamakan Kyai. Yang mengandung arti tua, sakral, keramat, dan sakti. Pada perkembangan selanjutnya dikenal istilah kyai-santri, bukan lagi guru-cantrik (Ali Anwar, 2011: 23).

Pengertian pesantren dari segi Istilah, menurut Karel Steenbrink, pesantren adalah sekolah tradisional Islam berasrama di Indonesia. Institusi pengajaran ini memfokuskan kepada pengajaran agama dengan menggunakan metode pengajaran tradisional, mempunyai aturan administrasi dan kurikulum pengajaran yang khas. Menurut Mastuhu (1996 : 6), pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Menurut Arifin dalam Mujamil (2005 : 2). pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kompleks) dimana santri menerima pendidikan dengan sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik titik persamaan dalam memberikan pengertian tentang pesantren misalnya adanya konsep lembaga pendidikan Islam tradisional, berasrama, yang menekankan pada pengajaran agama, dengan sistem pengajaran yang khas dimana santri sepenuhnya dibawah kendali kyai.

Dalam pemakaian sehari-hari, sebagaimana diungkapkan Qomar (2005:1). istilah pesantren sering di gabungkan dengan istilah pondok., menjadi pondok pesantren. Kadang disebut pondok saja atau pesantren saja. Secara esensial kata itu memiliki arti yang sama. namun, sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. Pada pesantren santerinya tidak disediakan asrama atau pemondokan di kompleks pesantren tersebut. Mereka tinggal di seluruh penjuru desa di sekeliling pesantren, dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran

diberikan secara wetonan. Meskipun kenyataan seperti itu, tetapi pemakaian istilah pesantren menjadi kecenderungan para penulis dan peneliti kepesantrenan belakangan ini baik yang berasal dari pemerhati domestik maupun mancanegara.

Hal yang sama dikemukakan Dhofier (1994: 18), bahwa pada sekitar tahun 1960-an di Jawa dan Madura istilah pesantren lebih dikenal dengan sebutan pondok. Istilah pondok barangkali ditujukan kepada asrama-asrama para santri, atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu-bambu. Dimana pondok berasal dari kata bahasa arab "*fundug*", artinya hotel atau asrama.

Saat ini pesantren memiliki beragam corak dan jenis, ada pesantren tradisional dan ada pesantren modern. Menurut Mujamil (2005: 16) Pesantren merupakan hasil usaha mandiri para kyai dibantu para satri dan masyarakat sehingga memiliki berbagai bentuk. Selama ini belum pernah terjadi, atau bahkan tidak akan pernah bisa dilakukan penyeragaman pesantren dalam skala nasional. Karena setiap pesantren memiliki ciri khusus sesuai selera kyai dan keadaan sosial budaya maupun sosial geografis yang mengelilinginya.

Kategorisasi pesantren bisa dilihat dari berbagai persektif, dari rangkaian kurikulum, tingkat kemajuan dan kemodernan dan tingkat keterbukaan terhadap perubahan dan dari sistem pendidikannya. Dari sisi kurikulum Arifin membagi pesantren kepada pesantren modern, *tahassus* (mengajarkan khusus *ilmu alat, fiqh-ushul fiqh, tafsir-hadits, tasawuf - tariqat*, dan *qiraat al-qur'an*), dan pesantren Campuran. (Mujamil, 2005: 16). Martin Van Bruinessen mengkategorikan pesantren berdasarkan tingkat kemajuan dilihat dari muatan kurikulumnya, terbagai kepada: pesantren yang paling sederhana, hanya mengajarkan cara membaca huruf arab dan menghafal beberapa bagian atau seluruh al-qur'an, pesantren sedang adalah pesantren yang mengajarkan kitab fiqh, ilmu aqidah, tata bahasa arab (*nahwu-sharaf*), terkadang amalan sufi, dan pesantren paling maju mengajarkan fiqh, aqidah, dan tawasuf lebih mendalam dan beberapa pelajaran tradisional lainnya (Mujamil, 2005: 16).

Dipandang dari keterbukaan terhadap perubahan yang terjadi Dhofier membagi pesantren kepada salafi dan khalaf. Pesantren salaf adalah pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran dalam bentuk pengetahuan umum. Diantara pesantren yang mengikuti pola ini adalah: Pesantren Lirboyo, Ploso di Kediri, pesantren Maslakul Huda di Pati, dan pesantren Tremas di Pacitan. Sedangkan pesantren khalafi yang telah memasukan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah -madrasah yang dikembangkannya, atau membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren. Misalnya pondok modern gontor tidak lagi mengajarkan kitab-kitab Islam klasik, pesantren Tebuireng dan Rejoso di Jombang telah membuka pendidikan umum SMP, SMA dan universitas, disamping masih mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik (Dhofier, 1994:41).

Kategori lain pesantren bisa dipandang dari jumlah santrinya, ada pesantren kecil, jumlah santerinya kurang dari 1000 orang dan pengaruhnya hanya terbatas pada tingkat kabupaten, pesantren menengah, jumlah santerinya sekitar 1000-2000 orang dan pengaruhnya lebih luas mampu menarik santri dari berbagai kabupaten, sedangkan pesantren besar adalah pesantren dengan jumlah santri memiliki lebih dari 2000 santri yang datang dari berbagai wilayah kabupaten dan propinsi (Mujamil, 2005: 17).

Selanjutnya, pembagian pesantren dilihat dari sistem pendidikan yang dikembangkannya meliputi tiga kategori: kategori pertama, memiliki santeri yang belajar dan tinggal bersama dengan kyai, kurikulum tergantung kiyai dan pembelajaran dilakukan secara individual. Kategori kedua, memiliki madrasa, kurikulum tertentu, pengajaran bersifat aplikasi, kiyai memberikan pengajaran secara umum dalam waktu tertentu, santri bertempat tinggal di asrama untuk memperoleh pengajaran agama dan umum. Kategori ketiga adalah hanya ada asrama, santri belajar di sekolah, madrasah, perguruan tinggi

umum atau agama di luar, kyai sebagai pengawas dan pembina mental (Mujamil, 20205: 17).

Pembagian kategori pesantren dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pesantren itu sendiri ada lima kategori: (1) pesantren yang memiliki mesjid dan rumah kyai; (2) memiliki mesjid, rumah kyai, pondok, dan pendidikan formal; (3) memiliki mesjid, rumah kyai, pondok, pendidikan formal, dan pendidikan keterampilan; (4) memiliki masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan bangunan fisik lainnya (Mujamil, 2005: 17).

Di samping pembagian tersebut, masih banyak kategori lain yang dibikin oleh masing-masing peneliti untuk melihat variasi pesantren di Indonesia. Apalagi jika dilihat dari perkembangannya hingga saat ini, ada pesantren anak-anak, lansia, yatim dan dhua'fa, ketergantungan obat, untuk anak berkebutuhan khusus (uutis), dan lainnya. Berbagai model pesantren bermunculan, demikian juga variasinya, ciri-ciri masing-masing kategori di atas, belum mampu mewakili karakter pesantren yang ada. Ciri-ciri tersebut makin tidak mampu menjadi jarak pemisah yang tegas karena menghadapi keberadaan aspek lainnya atau perubahan yang makin kompleks di kalangan pesantren. Meskipun demikian, mayoritas pesantren memiliki unsur minimal: (1) Kyai yang mendidik dan mengajar, (2) Santeri, (3) Masjid. Tiga unsur ini yang menandai pesantren pada masa awal. Dhofier (1994: 44) menyebutkan, unsur pesantren terdiri dari pondok, masjid, pengajaran kitab kuning, Santeri, dan Kyai. Keberadaan dan kelangsungan hidup pondok pesantren tergantung dari berbagai unsur yang menopangnya.

A. Pondok

Sebuah pondok pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tinggal bersama di asrama dan belajar dibawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai. Asrama untuk para santri biasanya berada di dalam lingkungan pesantren di mana Kyai bertempat tinggal. Lingkungan psantren biasanya dikelilingi tembok-tembok untuk dapat mengawasi keluar masuk santri sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pada kebanyakan pesantren, dahulu seluruh kompleks merupakan milik Kyai, tetapi sekarang, kompleks pesantren tidak semua milik Kyai, melainkan masyarakat juga turut memiliki. Hal ini karena sekarang para Kyai memperoleh bantuan dana untuk mengembangkan pesantrennya dari masyarakat. Bahkan banyak pesantren yang sudah memiliki status wakaf, baik dari Kyai maupun dari masyarakat.

Pondok, asrama bagi santri merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid, surau-surau yang kebanyakan tersebar di masyarakat. Keberadaan pondok dalam tradisi pesantren sangat penting karena beberapa alasan: *pertama*, kemasyhuran seorang Kyai dan kedalaman ilmu pengetahuannya tentang Islam menarik santri-santri dari jauh untuk dapat mempelajari ilmu dari Kyai tersebut, *kedua*, umumnya pesantren itu berada di desa-desa, dan tidak tersedia perumahan yang cukup untuk menampung para santri, *ketiga*, ada kebutuhan timbal balik antara Kyai dan santri, di mana para Kyai dianggap sebagai bapaknya oleh para santri, sementara Kyai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus dilindungi. Kebutuhan timbal balik ini menyebabkan mereka harus senantiasa berdekatan secara terus menerus. Sikap ini juga merupakan bentuk tanggungjawab Kyai kepada untuk dapat menyediakan tempat tinggal untuk para santrinya.

B. Masjid

Masjid merupakan tempat yang harus ada dalam setiap pesantren, karena masjid merupakan tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama untuk mengajarkan praktek sholat lima waktu, khutbah dan sholat jum'at juga sebagai tempat pengajaran kitab-kitab klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dalam sistem pendidikan tradisional. di manapun umat Islam berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai pusat pendidikan, pertemuan, aktifitas administrasi dan kultural. Hal ini telah berlangsung selama 13 abad (Dhofier, 1994:49).

Seorang Kyai yang ingin mengembangkan pesantren biasanya, pertama-tama mendirikan mesjid di dekat rumahnya. Para Kyai selalu mengajar muridnya di mesjid dan menganggap mesjid sebagai tempat yang tepat untuk mengajarkan disiplin kepada para santerinya untuk memperoleh dan mengajarkan ilmu.

C. Santeri

Unsur yang paling penting dalam sebuah lembaga pesantren adalah santeri. Seorang Kyai tidak akan memperoleh gelar Kyai, jika tidak memiliki santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Walaupun begitu, santri dalam tradisi pesantren memiliki dua kategori. *Pertama*, santri mukim: yaitu santri yang datang dari berbagai tempat yang jauh dan mereka tinggal untuk beberapa waktu yang lama di lingkungan pesantren. *Kedua*, santri kalong: santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren, yang biasanya tidak menetap di pesantren. Untuk mengikuti pelajaran di pesantren mereka bolak balik dari rumahnya sendiri. Perbedaan pesantren besar dengan pesantren kecil biasanya dilihat dari jumlah santri yang mukim. Makin besar sebuah pesantren, akan makin banyak jumlah santri yang mukim. Dengan kata lain, pesantren kecil akan memiliki santeri kalong lebih banyak daripada santri mukim.

D. Pengajian Kitab Islam Klasik.

Pengajian atau pengajaran kitab-kitab klasik merupakan ciri dari sebuah lembaga pesantren. Pengajaran Kitab-kitab klasik di pesantren dimaksudkan untuk mempersiapkan calon-calon Kyai. Biasanya mereka mempelajari kitab-kitab Klasik dalam waktu yang lama mulai dari bentuk sorogan hingga bandongan. Namun, dalam perkembangan sekarang, model pesantren sangat beragam. Ada pesantren yang mengajarkan kitab klasik (kitab kuning), ada pula pesantren yang hanya mengajarkan al-qur'an, bahasa arab dan ilmu agama lain dengan rujukan dari kitab kontemporer (kitab putih).

Tradisi pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) di pesantren, berkaitan dengan alasan pokok didirikan pesantren.

Menurut Martin Van Bruinessen (2012 : 85) “alasan pokok didirikan pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis beberapa abad yang lalu”. Kitab-kitab klasik ini di Indonesia dikenal dengan sebutan kitab kuning. Jumlah kitab klasik yang diterima di pesantren yang dianggap ortodok (*mu'tabaroh*) sangat terbatas. Kitab ini dianggap sesuatu yang sudah bulat, dan tidak dapat dirubah, hanya dapat diperjelas dan dirumuskan kembali.

E. Kyai.

Unsur-unsur kunci Islam tradisional adalah lembaga pesantren. Peran dan kepribadian Kyai serta kharisma yang dimilikinya sangat menentukan. Sikap hormat, takdzim dan kepatuhan mutlak kepada Kyai adalah salah satu nilai yang pertama ditanamkan pada santri. Kyai merupakan unsur esensial dari suatu pesantren. Kyai umumnya menjadi pendiri atau pemilik pesantren. Oleh karena itu, pertumbuhan suatu pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi Kyai.

Kebanyakan Kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil, di mana Kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tidak seorangpun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan Kyai (dalam lingkungan pesantrennya). Kecuali Kyai lain yang lebih besar pengaruhnya (Dhofier, 1994 : 55).

Kyai merupakan tokoh-tokoh sentral di pesantren. Selain sebagai pimpinan, mereka adalah guru, teladan, dan sumber nasehat bagi para santri. Mereka mempunyai peran yang substansial dalam mensosialisasikan ajaran agama di pesantren. Hubungan antara Kyai dan Nyai dengan santri diikat oleh emosi keagamaan sedemikian rupa sehingga setiap pandangan dan pendapat Kyai dan Nyai adalah pegangan bagi para santrinya (Marhumah, 2011:7).

Pondok pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri di mana Kiyai, ustadz, ustadzah, santeri, dan pengurus hidup bersama dalam satu lingkungan yang dilandasi nilai agama Islam, norma dan kebiasaan sendiri yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Rambu yang diterapkan dalam beberapa peraturan di pondok pesantren bertujuan memberi batasan perbuatan halal, haram, wajib, sunnah, baik-buruk, dan lainnya. Hal itu senantiasa didasarkan pada hukum-hukum agama, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan pondok pesantren. Semua aktivitas di pondok pesantren berdasarkan aturan yang bersumber dari ajaran agama. Implikasinya, hampir semua kegiatan di pondok pesantren bermakna ibadah.

Sistem pendidikan di pondok pesantren menggunakan pendekatan holistik. Artinya, kegiatan belajar mengajar di pesantren merupakan satu kesatuan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di kalangan para santri dan pengasuh pesantren belajar tidak mengenal waktu, kapan harus mulai dan kapan harus berakhir dan terkadang target yang harus dicapai oleh santripun tidak ditentukan. Pesantren juga merupakan lembaga sosial, karenanya bisa menampung santri dari beragam latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Biaya hidup di pesantren lebih murah daripada belajar di luar pesantren. Bahkan tradisi santri memasak sendiri untuk menghemat biaya masih terdapat di beberapa pesantren tradisional di Jawa.

Di beberapa pesantren tertentu santri membangun pondoknya sendiri di atas tanah yang telah disediakan oleh pesantren tanpa dipungut biaya. Bahkan di antara wali calon santri sengaja datang ke pesantren dan menyerahkan putra/putrinya kepada kiai untuk diasuh. Mereka percaya penuh bahwa kyai tidak akan menyesatkannya.

Dunia pondok pesantren dengan sisi positif- negatifnya tentu bukan hal yang asing lagi. Banyak sisi positif yang dapat diperoleh yaitu salah satunya menjadikan putra putri bangsa Indonesia berakhlakul karimah. Harapannya dengan karakter yang

kuat putra-putri Indonesia dapat meneruskan perjuangan bangsa kedepan. Berbicara sisi negatif, sering kita dengar bahwa pesantren merupakan ajang melunturkan jiwa nasionalisme pada jiwa pemuda Indonesia. Ungkapan tersebut sering diperdebatkan oleh beberapa kelompok masyarakat. Masyarakat luar memandang dunia pesantren kental dengan kehidupan rohani, mengindikasikan bahwa didalam pesantren tidak ditanamkannya jiwa nasionalisme terhadap peserta didik, bahkan sempat beredar isu bahwa pesantren adalah sarang teroris yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Pesantren dianggap menanamkan ajaran untuk berjihad dengan membunuh kaum kafir dalam artian kaum non muslim. Hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, bagaimana kalangan pesantren dapat menyikapi multikultural bangsa Indonesia dikarenakan pada era saat ini menjadikan model pendidikan Islam pluralitas multikultural sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi kebutuhan yang niscaya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan kondisi realitas sosial dan dianalisis secara deskriptif naratif, dan bukan data yang dapat dikuantifikasi berupa angka, baik yang dikumpulkan pada saat survey awal, selama proses penelitian, maupun hasil analisisnya.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, (2009), metode deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan fenomena alamiah, mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, hubungan kesamaan dan perbedaan dengan fenomena lain. Jhon W Creswell (2010) menyatakan lebih detail, bahwa metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami individu, kelompok, objek, kondisi, peristiwa dari makhluk sosial dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi, atau *Focus Group Discussion* (FGD).

Teknik wawancara dilakukan kepada orang-orang yang dipandang signifikan untuk dijadikan informan (responden) penelitian. Teknik studi dokumentasi digunakan apabila data yang tersedia dalam bentuk dokumen tertulis. Teknik observasi untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dengan cara merekam dan mencatat secara terstruktur maupun semi terstruktur kemudian mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dari data yang terkumpul. Teknik FGD digunakan untuk menyempurnakan data dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap data penting (utama) agar lebih terfokus dan memperoleh tanggapan, klarifikasi, konfirmasi agar hasilnya lebih objektif dan akurat.

Penelitian kualitatif mengacu kepada pendapat Borgdan & Biklen (2002) memiliki lima ciri yang membedakan dengan penelitian kuantitatif, yaitu: (1) latar alamiah tanpa dimanipulasi dan direayasa, (2) instrument adalah peneliti sendiri, (3) menggunakan metode

kualitatif, (4) menggunakan analisis induktif, dan (5) menggunakan teknik deskriptif naratif kualitatif.

Ciri pertama, latar penelitian ini bersifat alamiah, yang berada pada satu konteks utuh secara alami, tanpa rekayasa, dan tidak dapat difahami jika dipisahkan dari konteksnya. Menurut Lincoln & Guba yang dikutip oleh Moleong (1995:4), latar alamiah menjadi salah satu ciri penelitian kualitatif didasarkan kepada beberapa asumsi: (1) Tindakan pengamatan memengaruhi pemahaman terhadap konteks. Oleh karena itu, peneliti dituntut mampu memosisikan diri untuk memahami konteks alami tersebut; (2) Konteks kemungkinan saling memengaruhi terhadap konteks lain. Oleh karena itu, peneliti dituntut mampu menetapkan apakah suatu penemuan memiliki kaitan dengan konteks lainnya atau apakah suatu penemuan relevan dengan fokus penelitian; (3) Sebagian struktur nilai kontekstual biasanya bersifat determinatif terhadap apa yang akan dicari. Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki kecerdasan memahami nilai-nilai kontekstual yang terjadi sehingga tidak bias dalam memandang fenomena sosial.

Latar alamiah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah situasi sosial yang terjadi di pondok pesantren Al-Mizan Majalengka.

Dalam pelaksanaan di lapangan, peneliti melakukan observasi intensif mengamati kegiatan keseharian santeri, menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan santeri, para ustadz/ustadzah, dan pengurus Yayasan, setiap minggu selama dua bulan dari mulai September sampai awal November 2019. Meskipun demikian, banyak kekurangan yang dapat dideskripsikan disebabkan beberapa hal: (1) Latar alamiah itu sangat dinamis, kompleks, tidak sederhana seperti latar di laboratorium, di mana setiap peneliti melakukan observasi di lokasi, akan menemui hal yang baru, berubah, berbeda, berkembang, dan tidak dapat diprediksi, sehingga dalam mendeskripsikan hasil penelitian lapangan terus menerus mengalami perubahan, perbaikan, penyempurnaan; (2) Berhubung latar alamiah itu dinamis, maka hasil yang dideskripsikan oleh peneliti akan berbeda dengan peneliti lainnya; (3) Mengamati latar alamiah yang dinamis akan menghasilkan deskripsi yang subjektif, karena tergantung kepada focus, kepekaan,

atensi, persepsi, motif, dan tujuan peneliti dalam mendeskripsikan realitas situasi sosial; (4) Mengamati latar alamiah harus dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain; (5) Mengobservasi dan mengumpulkan data dari latar alamiah membutuhkan ketelitian, kesungguhan, seni, metodologi humanis, dan pendekatan emic-etic, apalagi pada lingkungan masyarakat dalam kultur yang masih “tradisional”; (6) Mengamati latar alamiah membutuhkan waktu lebih lama agar hasilnya maksimal.

Ciri kedua, peneliti sebagai instrumen. Dalam hal ini peneliti berperan menjadi alat pengumpul data utama yang secara langsung terlibat dalam penelitian. Peneliti sebagai instrumen dituntut mampu memahami kaitan antara berbagai situasi dinamis yang terjadi di lapangan. Peneliti tidak menggunakan bantuan lain selain tim peneliti, baik dalam melakukan observasi, wawancara, maupun FGD.

Ciri ketiga, metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (1995:5), metode kualitatif memiliki beberapa kelebihan: (1) fleksibel dan lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan di masyarakat yang kompleks, (2) mampu menunjukkan hubungan real antara peneliti dan responden, (3) dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola nilai yang dihadapi di masyarakat, (4) mudah melakukan penajaman pada beberapa hal yang terkait sesuai dengan kenyataan yang dinamis dan selalu berubah setiap saat.

Dengan metode kualitatif, peneliti leluasa mendeskripsikan secara detail data yang diperoleh di lapangan, meskipun sangat melelahkan, namun dengan harapan dapat memetakan lebih detail situasi dan keadaan di lapangan agar lebih memudahkan mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan bagi para pihak di masyarakat, sesuai dengan problematika yang muncul.

Ciri keempat, analisis data menggunakan analisis induktif. Teknik ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu: (1) hasil penelitian ini lebih akurat dan aktual karena data yang diperoleh benar-benar ditemukan di lapangan atau berdasarkan dokumen yang menggambarkan kondisi real di lapangan, (2) hasil penelitian bersifat

kontekstual karena menyangkut data kekinian dan terjadi di sini, (3) hasil penelitian data lebih aplikatif untuk bahan mengambil kebijakan. Berdasarkan kelebihan tersebut, penelitian ini mampu menyajikan data secara aktual karena peneliti langsung berhadapan dengan responden dan terlibat di lapangan. Hasil penelitian dapat diambil sebagai bahan kebijakan oleh pihak yang berkepentingan dalam menginspirasi penerapan Pendidikan Multikultural di pondok pesantren.

Ciri kelima, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan kondisi apa adanya secara alamiah, tanpa merakaya dan memanipulasi. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan keadaan real di lapangan. Teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap teknik yang sederhana, terutama oleh para peneliti kuantitatif, meskipun dalam praktiknya teknik deskriptif kualitatif sangat memberatkan, karena tidak dapat digantikan oleh orang lain selain harus oleh tim peneliti itu sendiri sebagai instrumen, tidak dapat dibantu oleh pengolah data program komputer karena bukan berupa angka, sehingga yang menjadi otaknya adalah kepala peneliti itu sendiri dengan instrumen yang dinamis, yang melakukan pengumpulan data di lapangan mengandalkan kaki peneliti itu sendiri, dan yang menyusun deskripsi hasil penelitian adalah tangan dan otak peneliti itu sendiri.

B. Responden Penelitian

Responden utama penelitian ini adalah Kyai, ustadz, ustadzah, dan para santeri yang ditentukan secara *purposive* mewakili santeriwani dan santeriwati dari tiap level/angkatan sebagai responden pendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan, terhitung sejak 1 Agustus sampai dengan 30 Desember 2019, namun pengumpulan data secara intensif di lapangan dilakukan mulai 1 September – 30 November 2019.

Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpul data, yaitu: wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Pertama, teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang seting sosial lingkungan pondok pesantren al-Mizan, pelaksanaan Pendidikan Multikultural dengan melihat proses pembelajaran di pondok pesantren dan di sekolah, termasuk mengamati pelaksanaan Pendidikan Multikultur yang diberikan dalam pembinaan secara massal dari K.H. Maman Imanul Haq, yang dikenal dengan kegiatan *Suluk Mizan*, yang dilaksanakan pada upacara Senin. Untuk beberapa data dari hasil pengamatan yang masih *ambigu* dan *multiinterpreted* akan dikonfirmasi melalui wawancara kepada yang bersangkutan atau orang kedua (*second opinion*) yang dianggap terpercaya. Pelaksanaan observasi dilakukan seminggu sekali mulai 1 Agustus sampai 30 September 2019.

Kedua, teknik studi dokumentasi untuk memperoleh data tentang seting sosial pondok pesantren, mencakup: profil pondok pesantren, profil pendiri dan tokoh, visi, misi, tujuan, aktivitas dan jadwal pengajian, jumlah santri dan ustadz/ah, aturan pondok pesantren, dan lain-lain. Pengumpulan data dari dokumentasi yang intensif dilakukan selama satu bulan di lapangan, setelah itu dilakukan analisis dengan mereduksi data, mendisplay data, memverifikasi, dan mendeskripsikan secara kualitatif dalam bentuk narasi yang tercantum di BAB IV. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan selama empat kali pertemuan, dimulai dari tanggal 1 – 30 September 2019.

Ketiga, teknik wawancara dilakukan kepada responden utama yaitu K.H. Zaenal Muhyidin, H. Asep Zaenal Arifin, dan para ustadz/ustadzah untuk mengumpulkan data tentang seting sosial pondok pesantren Al-Mizan dan pelaksanaan Pendidikan Multikultural, kurikulum, kitab yang diajarkan, dan metode pengajarannya. Teknik wawancara kepada Kyai dilakukan dalam dua kali pertemuan, sedangkan dengan para ustdzah/ah selama empat kali pertemuan secara formal, dan beberapa kali secara informal untuk melengkapi kekurangan data yang diperlukan, khususnya yang terkait dengan kondisi objektif pondok pesantren, pelaksanaan Pendidikan

Multikultural, dan pembinaan santeri. Pengumpulan data melalui studi wawancara dilakukan dari tanggal 1 – 30 September 2019.

Keempat, teknik FGD dilakukan dengan *asatidz* dengan narasumber K. H. Zaenal Muhyidin dan H Asep Zaenal. FGD dengan *asatidz* dilakukan sebanyak lima kali pertemuan, dengan rincian pertemuan: (1) Kegiatan pengajian santeri putera/i, (2) Sikap dan perilaku santeri putera/i dalam kehidupan keseharian di pondok, (3) Pelaksanaan Pendidikan Multikultural di Sekolah, (4) Pelaksanaan Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren, (5) Internalisasi santeri terhadap Pendidikan Multikultural untuk menangkal sikap dan perilaku radikalisme.

Di samping itu, FGD dilakukan juga dengan perwakilan beberapa orang santeri. FGD dengan santeri dilakukan sebanyak dua kali, yaitu untuk mendiskusikan tentang pelaksanaan Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren al-Misan serta bagaimana sikap dan perilaku keseharian santeri di lingkungan pondok, baik dalam pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan di pondok

D. Teknik Analisis Data

Berhubung yang dikumpulkan berupa data kualitatif, maka digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, baik dalam menganalisis data awal survey maupun data akhir hasil penelitian.

Untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan tentang seting sosial pondok pesantren al-Mizan, pelaksanaan Pendidikan Multikultural, sikap dan perilaku santeri di lingkungan pondok pesantren, dan internalisasi santeri terhadap Pendidikan Multikultural dengan cara mendeskripsikan data secara alamiah berdasarkan data hasil observasi, studi dokumentasi, wawancara, dan FGD. Di samping itu, penulis mengamati pelaksanaan *Suluk Mizan* dalam upacara Senin.

Teknik analisis data kualitatif untuk penelitian ini dipilih karena beberapa alasan: (1) Analisis kualitatif dapat menggambarkan kondisi realitas sosial secara luas, kaya, spesifik, relatif, dan subjektif; (2) Sifat subjektivitas analisis data kualitatif diambil dari data induktif

yang terjadi di lapangan; (3) Data induktif lebih realistis sesuai dengan realitas sosial dan kontekstual; (4) Gaya penulisan dalam teknik analisis kualitatif bersifat fleksibel dan tidak kaku (*rigid*).

Menurut Matthew B. Milles & A. Michael Huberman (2007), teknik analisis data kualitatif ditempuh melalui tahapan: (1) mengumpulkan data, (2) mereduksi data, (3) mendisplay data, (4) memverifikasi data, dan (5) mengambil kesimpulan.

Pertama, mengumpulkan data. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang terkumpul sangat banyak, tidak terstruktur, dinamis, dan tumpang tindih, karena instrumen observasi yang sudah disiapkan oleh peneliti banyak mengalami perubahan mengikuti kondisi aktual di lapangan, terutama ketika mengumpulkan data tentang pelaksanaan Pendidikan Multikultural, mengidentifikasi sikap dan perilaku santeri, cara santeri menginternalisasi Pendidikan Multikultural, serta ketika mendiskusikan dalam FGD tentang sikap dan perilaku anti radikal para santeri serta mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Multikultural agar berdampak lebih efektif terhadap sikap dan perilaku yang anti radikal.

Kedua, mereduksi data. Mereduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan mentransformasi dari data kasar. Oleh karena banyaknya data yang terkumpul, tetapi belum terstruktur, maka dilakukan pemilahan data dengan cara mereduksi data dalam kategori data yang sangat relevan, relevan, dan tidak relevan. Data yang tidak relevan dianulir. Data yang relevan untuk menyempurnakan data yang sangat relevan. Namun dalam praktiknya, pemilahan tersebut juga memakan energi yang cukup melelahkan, menyulitkan, dan memakan waktu lama.

Ketiga, mendisplay data. Pada tahap ini, data yang terpilih ditampilkan dan dikategorikan dalam empat kategori sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: (1) Setting sosial pondok Pesantren al-Mizan, (2) Pendidikan Multikultural yang sudah diterapkan di pondok pesantren al-Mizan, (3) Sikap dan perilaku Santeri di lingkungan pondok pesantren al-Mizan, (4) Internalisasi Santeri terhadap Pendidikan Multikultural untuk menangsang sikap dan perilaku radikal.

Keempat, memverifikasi. Pada tahap ini data yang sudah ditampilkkan dan disusun berdasarkan kategori tersebut di atas, kemudian diverifikasi lagi di lapangan. Beberapa data yang tidak sesuai dianulir, beberapa data yang masih kurang lengkap disempurnakan, dan data yang tumpang tindih akan diurutkan sesuai dengan kategorinya. Untuk menguji keabsahan data dilakukan cek ulang kepada informan tandingan, konfirmasi kepada informan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan secara informal, dan hasil penelitian akan dipresentasikan terbuka kepada informan agar memperoleh koreksi dan masukan.

Kelima, menyimpulkan. Pada tahap ini penulis menentukan data yang akan dianalisis dan ditafsirkan dengan cara mencari arti, mencatat pola, menjelaskan konfigurasi, alur sebab akibat, proposisi, dan verifikasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dalam bentuk narasi kata-kata yang dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah, dan dibahas menggunakan teori yang diambil dari Bab II.

E. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi *instrument* adalah peneliti sendiri. Meskipun demikian, peneliti menggunakan panduan observasi, wawancara, dan FGD untuk menghimpun data utama, meskipun banyak data yang diperoleh yang tidak terkait langsung dengan data utama. Dalam hal ini, perolehan data utama akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi utama, sementara data lain untuk menyempurnakan data utama. Instrumen lain digunakan alat perekam wawancara. Kisi-kisi instrument tersusun sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Indikator dan Sub Indikator
1	<p>Seting Sosial Pondok Pesantren al-Mizan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang, sejarah berdiri, perkembangan kemajuan pondok pesantren 2. Visi dan misi Pondok Pesantren 3. Profile Kyai, Pimpinan, Pengelola, para ustadz/ah 4. Profile santeri (latar belakang orangtua) 5. Lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren al-Mizan 6. Sarana dan prasarana pondok pesantren 7. Aturan/tata tertib pondok pesantren
2	<p>Pelaksanaan Pendidikan di Pondok Pesantren al-Mizan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren 2. Kitab-kitab, jadwal, dan metode pengajaran di pondok pesantren 3. Keunikan/program unggulan yg diusung dibanding pondok pesantren lain 4. Kurikulum pondok pesantren 5. Keteladanan Kyai dan para pengasuh pondok pesantren 6. Figur Kyai di mata santeri dan masyarakat 7. Pengaruh lingkungan demografis dan geografis terhadap kehidupan santeri 8. Kepemimpinan yang diterapkan oleh para Pengasuh/Kyai
3	<p>Sikap dan Perilaku Santeri di lingkungan Pondok Pesantren</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehidupan keseharian para santeri dan interaksi antar santeri, serta santeri dg Kyai 2. Kasus-kasus pernah terjadi dalam kehidupan santeri 3. Sikap Santeri terhadap Kyai, Guru, Ustadz/ah 4. Pelanggaran yang sering dan umum dilakukan santeri 5. Pelanggaran santeri yang sulit ditangani 6. Perilaku kasar, kejam, keras yang sering dilakukan antar santeri di lingkungan pondok 7. Tindakan protes, demo, kritik yang dilakukan secara keras dan brutal oleh santeri 8. Tindakan provokator, mudah ikut-ikutan, dan mudah terpengaruh di kalangan santeri 9. Sopan santun dalam berperilaku dan berbahasa antar santeri dan kepada Kyai/ustadz 10. Gotong royong, toleransi, kebersamaan, keterlibatan dalam kegiatan bersama
4	<p>Internalisasi Santeri terhadap Pendidikan Pondok Pesantren</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan tata tertib Pondok Pesantren dan sanksi pelanggaran 2. Tata tertib Pondok Pesantren dengan Sekolah yang terintegral 3. Pengawasan dan disiplin dari para Pengasuh, Ustadz, Guru 4. Kegiatan pengajian kitab dari Ustadz 5. Motivasi, suluk Mizan, dan pengajian dari Kyai 6. Pelaksanaan Pendidikan Akhlaq dan Pendidikan Kewarga-negaraan

	<ol style="list-style-type: none">7. Kegiatan ekstra kurikuler keagamaan, sosial, pengembangan minat dan bakat8. Kegiatan sosial dengan dan di masyarakat sekitar9. Kegiatan intra kurikuler bersifat akademik kompetitif
--	---

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Seting Sosial Pondok Pesantren Al-Mizan

Berdasarkan penelitian yang cukup intensif di lapangan, banyak diperoleh informasi yang berharga terkait dengan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan K. H. Mas Zaenal Muhyidin dan H. Asep Zaenal Arifin, Pengasuh dan Pengurus Yayasan Al-Mizan, dan studi dokumentasi, seting sosial pondok pesantren Al-Mizan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Al-Mizan lahir berawal dari keinginan luhur keluarga H. Moh. Kosim Fauzan dan Hj. Ummi Kulsum untuk mengembangkan dakwah Islam, yang dimanifestasikan dengan dibangunnya mesjid dan Madrasah Diniyah (MD), serta mengirimkan putera-puterinya ke pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pada tahun 1992 mulai dirintis Taman Kanak-kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran (TKA-TPA). Pada tahun 1995 berdiri Majelis Ta'lim ibu-ibu, shalat Jumat, dan pengajian santeri kalong. Tahun 1999 mulai menerima santeri pelajar yang mukim (mondok) di Al-Mizan dengan jumlah santeri pertama 50 orang, kemudian dibentuk pengajian Muhasabah di beberapa kota di Jawa Barat dan Studi Islam Intensif (SII). Tahun 2000 dibentuk Badan Penyelenggara Pendidikan di Al-Mizan yaitu dengan nama Yayasan Al-Mizan yang kini menjadi Yayasan Al-Mizan Langensari dengan moto: "Mengibarkan panji cinta sejati dan persaudaraan abadi".

Nama Al-Mizan terinspirasi dari al-Quran yang menyebutkan: "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*" (QS. Al-Rahman [55]:9). Dua nilai kehidupan yang dipetik dari ayat tersebut adalah "menegakkan keadilan dan menolak kehancuran tatanan Sunatullah". Dengan nama "Al-Mizan" pada pondok pesantren tersebut, memiliki visi, misi, dan tujuan untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, keseimbangan, persaudaraan, kemitraan dalam membangun masyarakat yang berperadaban. Al-

Mizan yang berarti “Timbangan” sebagai lambang keadilan, seimbang, tidak berat sebelah, dan anti diskriminasi. Menurut K. H. Mas Zaenal Muhyidin, nama MIZAN juga dapat diambil dari singkatan pendirinya yaitu Mi (Ummi Kulsum) dan Zan (H. Moh. Kosim Fauzan), pasangan suami isteri sebagai muwakif Al-Mizan.

Dalam gerak perjuangannya, Al-Mizan direfleksikan sebagai ikhtiar dalam membangun tradisi keilmuan yang meletakkan pengetahuan agama sebagai *mainstream* dalam menyusun strategi kebudayaan yang adi luhung menuju sebuah tatanan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, terbuka, dan berkeadilan.

Gagasan strategis yang diusung adalah: (1) Mempertemukan sejumlah pemikiran kritis yang emasipatoris, eksploratif, dan liberatif; (2) Merekonstruksi nilai keberagamaan dan keberimanan dalam konteks yang lebih luas dan majemuk; (3) Menjalin kerjasama yang sinergis dengan semua lapisan, semua kalangan semangat saling mengenal, menghargai, dan menguntungkan untuk kemanusiaan.

Landasan filosofis yang tercermin dalam nama Al-Mizan adalah reflektif keagamaan terhadap realitas kehidupan yang berperadaban, berkeadilan, bernilai keagamaan, dan menegakkan persatuan, sehingga melahirkan masyarakat yang memiliki tatanan anti kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan marginalisasi baik secara struktural maupun kultural.

Segala ikhtiar transformatif tersebut diorientasikan dapat mengubah kehidupan umat manusia ke arah yang lebih adil, humanis, demokratis, pluralis, toleran, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pada tataran struktural maupun kultural, dan membangun masyarakat *Rabbani* demi mencapai keridhaan Ilahi melalui generasi *Qur'ani*.

Pesantren Al-Mizan mempunyai tradisi (*al-turâts*) khas yang merupakan khazanah kejiwaan (*makhzun al-nafs*) yang bersifat material dan immaterial yang digali selama 12 tahun pengabdianya di tengah masyarakat. Tradisi ini apabila dikembangkan akan melahirkan pribadi yang berkarakter kuat, memiliki integritas dan pemikiran yang

progresif-transformatif. Karakter ini akan bersifat fleksibel dan toleran sehingga jauh dari watak radikal, apalagi ekstrem, misalnya dalam menyikapi masalah sosial, politik, maupun kebangsaan. Oleh karena memiliki watak dan tradisi yang fleksibel dan toleran, maka para santri Al-Mizan akan mampu menjembatani problem keotentikan dan kemodernan (*musykilat al-ashlah wa al-hadatsah*) secara harmonis.

Dunia berkembang dan berubah dengan sangat cepat dan tidak menentu, sehingga mewarnai perjalanan Al-Mizan secara fundamental. Dua belas tahun kiprah Al-Mizan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat telah mampu menunjukkan eksistensi, konsistensi, dan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, masa depan akan sangat lain dengan masa yang telah dijalani. Dengan berbagai perubahan yang terjadi, setiap organisasi termasuk pondok pesantren Al-Mizan, perlu merumuskan kembali arah yang tepat ingin dituju dalam menghadapi suatu masa depan yang didominasi oleh nilai-nilai dan pemikiran yang logis dan idealis namun tetap realistis.

Kompetisi yang ketat di masa depan mempunyai dimensi utama pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam era yang seperti ini, kedudukan sebuah “ideologi” akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing. Maka berbagai pemikiran, ide, gagasan, kebijakan, perilaku keseharian, kegiatan sosial dan budaya, serta respon masyarakat terhadap kiprah Al-Mizan selama 12 tahun yang diidentifikasi menjadi nilai ke-Al-Mizan-an sebagai *makhzun al-nafs* yang bersifat material dan imaterial yang dikembangkan untuk melahirkan pemikiran yang progresif-transformatif dalam upaya membangun masyarakat.

Nilai ke-Al-Mizan-an ini digali dan dirumuskan untuk membangun pertalian bathin (*‘alaqoh al-ruh*) antar warga Al-Mizan dalam memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya kebersamaan antar lembaga dan warga di Al-Mizan dalam memperjuangkan kepentingan masa depan kehidupan yang lebih baik dengan semangat keberagaman, kesetaraan, dan harmoni.

Dari sisi ini, Al-Mizan adalah sebuah cara pandang dan metode bagi seluruh warga Al-Mizan untuk membangun tradisi keilmuan, menyusun strategi kebudayaan, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, terbuka, dan berkeadilan.

Dari Al-Mizan diharapkan lahir generasi yang mempunyai karakter Qur’ani dan memegang teguh nilai Islam, yang dapat diandalkan sebagai agen perubahan yang mensosialisasikan nilai cinta kasih, persaudaraan, keadilan sosial, kemashlahatan, dan kerahmatan semesta di tengah kehidupan berbangsa, bernegara, serta dalam kehidupan global.

Pondok pesantren Al-Mizan yang beralamat di Jl. Raya Timur No. 1/456 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, posisinya terletak di jalan raya Cirebon-Bandung, sehingga mudah dijangkau. Di samping itu posisi kompleks Al-Mizan sangat strategis karena cukup dekat dari salah satu pintu keluar lintasan Jalan tol Cikapa (Cikampek-Palimanan), dan berjarak 2 km dari Bandara Internasional Kertajati Kabupaten Majalengka. Identitas lengkap dan jumlah civitas pondok pesantren Al-Mizan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Identitas Pondok Pesantren Al-Mizan

Nama Lembaga	: Pondok Pesantren Al-Mizan
NSPP	: 510032100050
Alamat	: Jl. Raya Timur Ciborelang No 456 Jatiwangi Majalengka Kode Pos 45454 Jawa Barat
Telephone/fax	: (0233) 884730/881024884716
Website/email	: www.almizanjatiwangi.or.id/ almizanjatiwangi@yahoo.co.id
Nama Yayasan	: Yayasan Al-Mizan Langensari
No Akta Notaris	: AHU. 1801. AH.01.05/10 April 2013

Status/Luas Tanah	: Wakaf dan HGP/14000 m ²
Pimpinan PP Al-Mizan	: K.H. Mas Zaenal Muhyiddin

Table 4.2

Jumlah Civitas Pondok Pesantren Al-Mizan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengasuh	5
2.	Ustadz dan ustadzah	11
3.	Tenaga administrasi	1
4.	Penjaga	3
	Santeri mukim putera/i	150
6	Santeri tidak mukim putera/i	1000

Profil para pelopor dan pengasuh pondok pesantren Al-Mizan dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut:

Pertama, K.H. Ahmad Fauzi (almarhum) adalah pendiri Al-Mizan, lahir di Cirebon pada tanggal 6 Juli 1955, awalnya sebagai pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muhtad'in Cisambeng Majalengka. K. H. Ahmad Fauzi sejak 1980 mulai dekat dengan keluarga H. Moh. Kosim Fauzan dan Hj. Ummi Kulsum, kemudian mulai merintis pondok pesantren Al-Mizan tahun 1999 bersama H. Moh. Kosim Fauzan. Inilah foto pendiri Al-Mizan:



K.H. Ahmad Fauzi

Kedua, H. Moh. Kosim Fauzan adalah Dewan Wakaf Yayasan Al-Mizan, lahir di Majalengka 25 Mei 1948, pernah aktif sebagai Pengurus Gerakan Pemuda Anshar dan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PC NU) Majalengka. Sosok yang *low profile* ini sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Mizan dan mengikuti perkembangannya sampai sekarang. Inilah sosok H. Moh. Kosim Fauzan:



H. Kosim Fauzan

Ketiga, Hj. Ummi Kultsum, isteri dari H. Moh. Kosim Fauzan, adalah juga Dewan Wakaf Yayasan Al-Mizan, lahir di Majalengka tanggal 1 Juli 1953, yang dengan motivasi dan komitmennya ikut merintis pondok pesantren dengan dukungan moral dan material hingga sekarang. Inilah foto Ummi Kulsum dan H. Moh. Kosim Fauzan:



Hj. Umi Kulsum

Zan)



Hj.Ummi Kultsum & H. Moh. Kosim Fauzan (Mi-

Keempat, K.H. Maman Imanul Haq adalah Dewan Pembina dan Pengasuh Yayasan Al-Mizan, lahir di Sumedang tanggal 6 Desember 1972. Tokoh muda ini adalah seorang anggota DPR RI dua periode 2014-2019 dan 2019-2024, seorang aktifis gender dan penegakan HAM, di samping aktif berdakwah menyebarkan Islam damai dan *rahmat li al-'alamin* ke seluruh nusantara, bahkan luar negeri. Melalui pondok pesantren yang dibinanya, ia terus menerus aktif mengukuhkan spirit nasionalisme dan menanamkan nilai keagamaan dan kepesantrenan yang humanis, menghargai perbedaan dan keragaman kepada ratusan santeri dan ribuan jama'ah "Paguyuban Shalawat Akar Jati" yang diasuhnya.



K.H. Maman Imanul Haq

Keempat, K.H. Mas Zaenal Muhyidin adalah Dewan Pembina dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan, lahir di Subang 2 April 1974, aktivis organisasi PMII semasa kuliah di STAI Cipasung, dan saat ini aktif di NU sebagai LAZISNU kabupaten Majalengka. Beliau membidani lahirnya lembaga-lembaga Al-Mizan, seperti: PKBM Bina Muda Mandiri al-Mizan, SMA Islam Al-Mizan, dan SMK Islam Al-Mizan. Kini dipercaya sebagai kepala SMA Islam Al-Mizan. Berikut ini foto K. H. Mas Zaenal Muhyidin:



K.H. Mas Zaenal Muhyidin

Kelima, Hj. Dede Masyitoh adalah Dewan Pengawas dan Pengasuh Yayasan Al-Mizan, lahir di Majalengka pada tanggal 23 September 1973, alumni dari Pondok Pesantren Pasir Bokor Tasikmalaya, aktif di NU sebagai Bendahara PC Fatayat NU Kabupaten Majalengka. Dia ikut membidani lahirnya TK, Madrasah Tsanawiyah, dan SMI Islam Al-Mizan. Inilah sosok Hj. Masyitoh dalam satu fosennya:



Hj. Dede Masyitoh

Keenam, Hj. Upik Rofikoh adalah Bendahara dan Pengasuh Yayasan Al-Mizan, lahir di Majalengka tanggal 13 Oktober 1975, alumni Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Majalengka. Ia memiliki tekad menjadikan Al-Mizan sebagai pondok pesantren ramah anak, aktif mengampanyekan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan sering mengadvokasi para korban kekerasan. Berikut ini foto Hj. Upik Rofikoh:



Hj. Upik Rofikoh

Ketujuh, H. Asep Zaenal Arifin adalah Ketua dan Pengasuh yayasan Al-Mizan, lahir di Majalengka tanggal 3 Juni 1983, alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini aktif di PMII semasa kuliah. Dia juga insiator beberapa lembaga di Al-Mizan, seperti: Rumah Perlindungan Anak (RPA) Ummi Maktum, Balai Latihan Kerja (BLK) Al-Mizan, SDIT Al-Mizan, dan Mizan Mart. Dia berkomitmen untuk terus berinovasi mengembangkan Al-Mizan sebagai lembaga pendidikan yang maju dan profesional. Inilah foto Kang H. Asep Zaenal Arifin:



H. Asep Zaenal Arifin

Kedelapan, Ade Duryaman adalah Sekretaris Yayasan Al-Mizan, lahir di Majalengka tanggal 25 April 1978, salah seorang pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Mizan. Semasa kuliah di UNY aktif berorganisasi di PMII, dan sekarang sebagai Bendahara PC GP Anshar Kabupaten Majalengka. Dia ikut membidani lahirnya lembaga Al-Mizan,

seperti: SMA Islam Al-Mizan, RPA Ummi Maktum, BLK, Redaktur website www.almizanjaiwangi.or.id, aktif mengampanyekan Islam ramah yang anti kekerasan melalui publikasi konten dakwah Islam yang damai dan menyejukkan. Inilah fose energik Kang Ade Duryaman:



Ustadz Ade Duryaman

Di bidang pendidikan, Yayasan Al-Mizan menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal. Lembaga pendidikan formal terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) Islam, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.), Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berikut ini beberapa foto aktivitas santeri berbagai tingkat pendidikan formal di lingkungan pondok pesantren Al-Mizan:



Latihan Manasik Haji Siswa-siswi TK Islam Al-Mizan



Kegiatan Siswa-siswi SDIT Al-Mizan



Kegiatan Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Al-Mizan





Kegiatan Siswa-siswi SMK Ma'arif Al-Mizan



Kegiatan Siswa-siswi SMA Islam Al-Mizan

Lembaga pendidikan non formal yang dikelola Yayasan Al-Mizan antara lain: pondok pesantren, Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Balai Latihan Kerja (BLK), dan SMA Terbuka.

Pondok pesantren yang diselenggarakan menampung santri putera-puteri sambil sekolah di Madrasah Tsanawiyah, SMA Islam, atau SMK Maarif, sedangkan untuk siswa-siswi SDIT dan TK Islam hanya khusus sekolah. DTA diselenggarakan sore hari mulai jam 15.30 – 17.00 untuk siswa-siswi SDN dari luar yang ingin menambah ilmu agama. PKBM diselenggarakan sebagai pendidikan penyeteraan untuk masyarakat dalam program paket A,B dan C. BLK dikelola oleh Yayasan Al-Mizan secara profesional yang diperuntukkan terutama untuk memberi latihan keterampilan kepada siswa-siswi SMK, agar

setelah lulus memiliki life skill yang baik hingga mempermudah mereka bekerja atau mandiri menjadi wirausahawan. BLK juga melayani masyarakat yang berusia minimal 17 tahun untuk memberikan life skill agar masyarakat bekerja memiliki keterampilan, atau para pencari kerja lebih mudah untuk dapat pekerjaan. Tenaga pelatihnya telah mengikuti pelatihan dari BLK Pusat. Inilah foto sebagian aktivitas di BLK:



Kegiatan Siswa-siswi di BLK

SMA Terbuka sifatnya pendidikan jarak jauh dari sekolah induknya, diperuntukkan bagi masyarakat yang berusia 17- 21 tahun (usia produktif), atau yang putus sekolah, atau masyarakat yang menghendaki penyetaraan ijazah tetapi tidak memiliki waktu cukup untuk sekolah reguler karena kesibukan bekerja atau sudah berkeluarga. SMA Terbuka diselenggarakan dua hari dalam seminggu, yaitu hari sabtu dan minggu, hari lainnya digunakan untuk belajar mandiri. Ijazah SMA Terbuka berijazah formal sama dengan sekolah induknya.

Tujuan diselenggarakan pendidikan formal yang bermacam-macam itu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (masyarakat) dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan non formal yang disediakan di Al-Mizan, memfasilitasi masyarakat

memperoleh pendidikan umum, agama, keterampilan yang bersifat mudah, murah, terjangkau, dan fleksibel dalam segi biaya, jadwal belajar, dan arah karir yang diharapkan oleh yang bersangkutan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak bangsa untuk tidak mengenyam pendidikan formal, non formal, maupun in formal. Al-Mizan memiliki prinsip “*education for all*”, yaitu bahwa setiap individu bukan hanya berhak, bahkan wajib memperoleh pendidikan, tanpa diskriminasi. Orang yang tidak terdidik tidak dapat dipandang karena kesalahan dia sendiri yang tidak ingin berpendidikan, tetapi mungkin terjadi karena banyak kendala sistemik, seperti: sistem birokrasi yang sulit, panjang, dan kaku, sistem pendidikan yang membelenggu, maupun kesulitan mengakses pendidikan karena tidak terjangkau biaya atau tidak memiliki waktu.

Di bidang Da’wah dan Sosial, yayasan Al-Mizan mengelola lembaga: Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Majelis Taklim, Paguyuban Shalawat Akar Jati, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Rumah Perlindungan Anak (RPA) Ummi Maktum, dan Lembaga Zakat Infak Shadaqah (LAZIS) Al-Mizan. Inilah sebagian foto kegiatan LAZIS dan Majelis Ta’lim Al-Mizan:



Kegiatan LAZIS Al-Mizan



Kegiatan Majelis Ta'lim di Lingkungan Masyarakat Al-Mizan

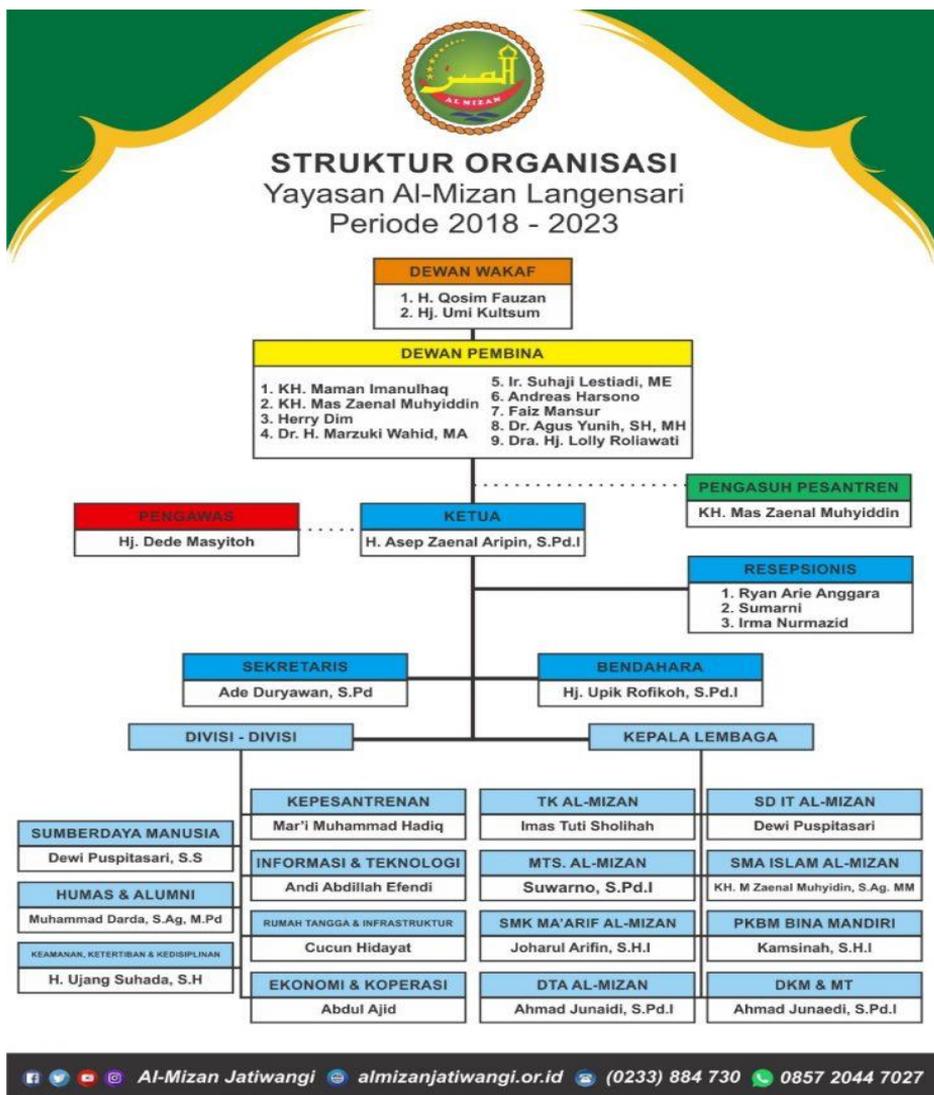
Dalam bidang Ekonomi, yayasan Al-Mizan mengelola Mizan Mart yang menyediakan berbagai kebutuhan santeri, seperti alat tulis, pakaian seragam, sepatu, makanan, dan minuman dengan harga yang ekonomis. Di samping itu ada Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN), Bank Mini Syariah SMK Ma'arif Al-Mizan, serta usaha Tour & Travel Haji dan Umrah. Inilah foto kantor Bank Mini Syariah yang dikelola sebagai laboratorium SMK Ma'arif :



Bank Mini Syari'ah SMK Maarif

Di bidang pendidikan informal, Al-Mizan mengkoordinir kegiatan komunitas, seperti: Keluarga Alumni Al-Mizan (KALAMI) yang mengadakan pengajian bulanan, syawalan, dan reunian, pengembangan hobi dan bakat yaitu pencak silat dan karate yang menamakan diri komunitas Barisan Takut Allah (BASTOH), pengembangan kecakapan berbahasa Inggris disebut Al-Mizan English Club (AEC), dan komunitas santeri Tahfidz al-Qur'an.

Adapun susunan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan Periode 2018-2023 selengkapya sebagai berikut:



Adapun peraturan untuk santri putera dan puteri di pondok pesantren Al-Mizan dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Peraturan Santeri Pondok Pesantren Al-Mizan

No	Jenis Peraturan	Uraian
1	Kewajiban di Lingkungan	<p>Santeri Pondok Pesantren Al-Mizan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sholat berjama'ah lima waktu, kecuali yang berhalangan dan bera dalam kegiatan sekolah. 2. Bagi santri keluar dari kompleks pondok pesantren harus izin kepada bagian keamanan 3. Mengikuti seluruh kegiatan dan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan Pondok Pesantren, kecuali berhalangan/sakit. 4. Menjaga kebersihan masjid, asrama, MCK, kamar mandi dan lingkungan pesantren sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pengurus. 5. Berpakaian sopan, rapi dan menutup aurat. 6. Bertutur kata baik dan sopan kepada siapapun di lingkungan pondok pesantren.
2	Kewajiban di Asrama	<p>Santeri Pondok Pesantren Al-Mizan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kebersihan kamar/asrama masing-masing dan kamar mandi yang ada di asrama. 2. Membereskan dan merapikan tempat tidur. 3. Melaksanakan piket kamar/asrama sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pengurus. 4. Berada di asrama dan tidur malam pada pukul 22.00 WIB.
3	Larangan di Lingkungan	<p>Santeri Pondok Pesantren Al-Mizan dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merusak sarana prasarana atau fasilitas yang ada di linagakaungan pondok pesantren. 2. Mengganggu dan meresahkan masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren. 3. Mengadakan pertemuan lain jenis tanpa sepengetahuan pengurus. 4. Menerima tamu tanpa sepengetahuan pengurus atau pengasuh

		<p>5. Memakai celana pendek, ketat atau pakaian transparan (terbukanya aurat).</p> <p>6. Membawa hp di pondok pesantren.</p> <p>7. Merokok di lingkungan Pondok Pesantren.</p> <p>8. Pulang tanpa ijin atau melewati batas waktu yang ditentukan pondok pesantren</p> <p>9. Memakai atau merusak barang orang lain tanpa ijin (<i>ghasab</i>).</p>
4.	Bentuk Pelanggaran	<p>Ringan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanggar peraturan yang berkenaan dengan kewajiban santri di lingkungan pondok pesantren 2. Melanggar peraturan yang berkenaan kewajiban santri di kamar/asrama. <p>Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengulangi pelanggaran ringan 2. Melanggar peraturan yang berkenaan dengan larangan di lingkungan pondok pesantren <p>Berat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengulangi pelanggaran sedang 2. Mencemarkan nama baik pondok pesantren dan keluarga besar pondok pesantren 3. Melakukan dosa besar seperti : mencuri, berzina, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, di dalam/luar pondok pesantren
5	Sangsi	<p>Pelanggaran Ringan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan dan diberi sangsi yang edukatif 2. Membersihkan kamar mandi/MCK 3. Membersihkan lingkungan asrama <p>Pelanggaran Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar denda berupa alat-alat pendidikan/kebersihan 2. Mengganti barang atau fasilitas apabila merusak salahsatu fasilitas pondok pesantren 3. Sangsi tambahan sesuai kebijakan pengurus <p>Pelanggaran Berat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan kepada Orangtua/Wali santri (SP2) 2. Mengganti barang milik orang lain yang diambil, serta sangsi tambahan sesuai kebijakan pengurus 3. Dikeluarkan dari Pondok Pesantren

B. Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Al-Mizan

Berdasarkan wawancara dengan K.H. Mas Zaenal Muhyidin, H. Asep Zaenal Aripin, dan beberapa ustadz menyatakan, pendidikan multikultural diselenggarakan di pondok pesantren Al-Mizan melalui kurikulum yang terintegrasi (*integrated curriculum*) dan kurikulum tersendiri (*separated curriculum*). Dalam *separated curriculum*, pendidikan multikultural diberikan secara eksplisit dalam materi *Suluk Mizani*. Dalam *integrated curriculum*, pendidikan multikultural secara implisit terkandung dalam identitas pondok pesantren, profil pengasuh, dan pengajaran kitab kuning.

Pendidikan multikultural di pondok pesantren Al-Mizan terkandung secara eksplisit dan implisit dalam muatan kurikulum. Artinya, wawasan dan nilai-nilai multikultur melekat secara inheren dalam keseluruhan profil dan kegiatan pondok pesantren.

Dengan demikian, pendidikan multikultural di pondok pesantren Al-Mizan mencakup empat bentuk yaitu: (1) *Suluk Mizani*, (2) Identitas pondok pesantren, mencakup: dasar, visi, misi, tujuan, dan motto juang; (3) Profil Pengasuh; (4) pengajian Kitab kuning. Keempat bentuk pendidikan multikultural dideskripsikan secara terperinci sebagai berikut:

Pertama, *Suluk Mizani*. *Suluk Mizani* adalah merupakan pendidikan multikultural secara eksplisit dan khas ala pondok pesantren Al-Mizan yang utama dan komprehensif, dan dikenalkan kepada santeri sejak masuk di pondok pesantren ini.

Suluk Mizani terinspirasi dari peristiwa penyebaran Islam ke Nusantara, termasuk di Jawa, yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran tasawuf. Pada umumnya, tasawuf diajarkan oleh para da'i yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu dan praktik *thariqat*. Hal ini berdampak positif terhadap berkembangnya karya sastra di Jawa, yaitu karya Islam santeri dan karya Islam

Kejawen. Khusus untuk karya sastra Islam Kejawen muncul apa yang sering disebut primbon, suluk, dan wirid.

Kata *suluk* berasal dari terminologi al-Qur'an dari kata *Fasluki* (QS. Al-Nahl [16]: 69): *فا سلكي سبيل ربك ذللا* yang artinya: *Tempuhlah jalan Rabb-mu yang telah dimudahkan (bagimu)*. Seseorang yang menempuh jalan *suluk* disebut *Salik*.

Dalam buku Daar- al-Masryriq karya Louis Ma'luf, *suluk* berasal dari bahasa Arab *sulukun* yang merupakan isim masdar dari *salaka* yang berarti “melalui atau menempuh jalan”. Kata *suluk* juga dapat merupakan isim jama' dari *silkun* yang berarti benang atau tali yang digunakan untuk merangkai intan atau permata.

Suluk secara harfiah berarti menempuh (jalan). Dalam kaitan dengan agama Islam dan sufisme, kata *suluk* berarti menempuh jalan (spiritual) untuk menuju Allah. Menempuh jalan (*bersuluk*) mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan eksoteris agama Islam (*syariat*) dan aturan esoteris agama Islam (*hakikat*). *Bersuluk* mencakup hasrat untuk mengenal diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan, kebenaran sejati (*Ilahiyyah*) melalui penempaan diri seumur hidup dengan melakukan *syariat lahiriah* dan *batiniah* demi mencapai kesucian hati untuk mengenal diri dan Tuhan.

Suluk berarti “jalan”, sering digunakan untuk menjelaskan tahapan yang dilalui para sufi dalam menempuh jalan menuju Allah SWT. *Suluk Mizani* adalah metode yang menuntun para *salik* memiliki karakter Qur'ani dan memegang teguh nilai Islami. Melalui *Suluk Mizani* ini diharapkan sebagai agen perubahan yang mensosialisasikan nilai cinta kasih, persaudaraan, keadilan, kemashlahatan, kerahmatan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di era global.

Sebagai sebuah proses pembentukan perilaku, *Suluk Mizani* bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pencerahan pada para *salik* untuk memahami Islam sebagai energi bagi transformasi dan kemanusiaan.

2. Mendorong perubahan perilaku para salik baik kognitif, afektif dan psikomotor.
3. Membantu terwujudnya sebuah tata-tatanan masyarakat yang kritis dalam berfikir, terbuka dalam bersikap, berdaya dalam martabat, dan berkeadilan dalam tatanan kehidupannya.

Metode Suluk Mizani ada tiga, yaitu: normatif, historis, dan reflektif. Metode normatif digunakan untuk teks keagamaan (*al-nushush al-diniyyah*), seperti: al-Quran, al-Hadist, dan Qaul Ulama yang menjadi rujukan utama dalam menggali nilai Islami yang akan menjadi energi atau motor penggerak transformasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Metode historis digunakan untuk menggali nilai-nilai Islami secara induktif dari empiris sejarah Nabi, para Sahabat, Ulama, Auliya, dan Asatidz pondok pesantren dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya perubahan struktur sosial ke arah yang lebih adil, sadar mengorganisasi diri, menyuarakan, dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Metode reflektif digunakan dengan cara menggali nilai Islam dari beberapa sumber utama seperti yang dikemukakan di atas, dari deduktif ke induktif, atau sebaliknya dan mengidentifikasi dalam nilai ke-al-Mizan-an sebagai *makhzun al-nafs* yang bersifat material dan immaterial dikembangkan untuk melahirkan pemikiran progresif-transformatif membangun masyarakat.

Materi *Suluk Mizani* diberikan kepada santri secara berurut sesuai kerangka dasar dari pendiri Al-Mizan sebagai berikut:

1. Makna Al-Mizan
2. Makna Logo
3. Lagu Mars Al-Miza
4. Lagu hymne Al-Mizan
5. The Five Spirit
6. Guru-guru utama
7. Manhaj al-Fikr
8. Manhaj al-Haraki

Materi pertama, makna Al-Mizan. Para santeri diberi pemahaman tentang makna Al-Mizan, agar tertanam dalam diri para santeri misi keadilan yang terkandung dalam makna Al-Mizan yang terinspirasi dari firman Allah: *واقموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان* yang artinya “Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (QS. Al-Rahman [55]:9). Dua nilai dari ayat tersebut adalah: (1) menegakkan keadilan (*iqomah al- qisti*), (2) menolak kehancuran tatanan Sunnatullah (*daf’u ikhsar al-mizan*).

Materi kedua, logo Al-Mizan. Makna logo ini perlu para difahami dan biasanya diberikan pada masa orientasi siswa baru (OSPEK). Logo ini diciptakan oleh K.H. Maman Imanulhaq, dan disempurnakan oleh K.H. Mas Zaenal Muhyiddin, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai nilai filosofis sebagai berikut:



Para santeri diharapkan dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dari setiap bagian logo Al-Mizan, sekaligus mengidentifikasikannya ke dalam nilai ke al-Mizan-an sebagai *makhzun al-nafs* yang bersifat material dan imaterial yang dikembangkan untuk melahirkan pemikiran yang progresif-transformatif dalam upaya membangun masyarakat.

Materi ketiga, mars Al-Mizan. Mars Al-Mizan merupakan simbol semangat kebangkitan. Mars Al-Mizan yang diciptakan oleh K.H Maman Imanulhaq adalah reflektif keagamaan terhadap realita kebuntuan peradaban, keterpurukan nilai keadilan, ketertindasan umat, dan perpecahan. Semua itu dijadikan dasar untuk kebangkitan gerakan pondok pesantren dengan nama Al-Mizan. Di dalamnya ada proses pemahaman kembali nilai keislaman, yang kemudian dirumuskan menjadi pemahaman transformatif, agar menjadi penggerak transformasi dalam mewujudkan keadilan sosial.



Materi keempat, hymne Al-Mizan. Lagu hymne Al-Mizan merupakan simbol melawan fenomena kekafiran dan wacana reflektif keagamaan terhadap pengalaman hidup keterpurukan, kebodohan, kemiskinan, dan ketertindasan. Kefakiran, kebodohan, kemiskinan, kezaliman, dan keterpurukan adalah “musuh” yang terus membelenggu masyarakat yang harus dilawan (QS. Al-Fath [48]: 29). Refleksi itu melahirkan kesadaran melakukan pemberdayaan dalam mengembangkan pertanggung jawaban diri, memaksimalkan potensi diri, mengembangkan kreativitas, dan memutus ketergantungan terhadap kekuatan lain. Berikut ini lirik lagu hyme Al-Mizan:



Hymne Al-Mizan

Senandung luka yang mengganggu
Menyayat perasaan yang telah lama duka
Menutup mata membelenggu jiwa
Menyumbat alam pikiran kita

Kekafiran merajalela
Kebodohan melanda manusia
Kemiskinan mendera dunia
Kebenaran jauh dari jiwa

Hilangkan ragu
Lenyapkan dungu
Tanamkan rasa malu

Kuatkan iman
Di dalam kalbu
Agar tentram hati dan khusyu'

Kibarkan rasa cinta cinta sejati
Dan persaudaraan abadi
Dalam tali silaturahmi

Bersama kami santri-santri al-mizan
Bersama kami keluarga besar al-mizan



Dalam gerak perjuangannya, Al-Mizan selalu mempunyai komitmen untuk melawan fenomena kekafiran yang terjadi di tengah masyarakat dengan cara:

1. Membaca realita kekafiran yang merajalela berupa penindasan, pembodohan, marginalisasi dan korupsi
2. Membangun kesadaran bersama tentang pentingnya perubahan struktur sosial ke arah kehidupan yang lebih adil, sadar untuk mengorganisasi diri, menyuarakan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meletakkan cinta sejati dan persaudaraan sejati sebagai fondasi dalam mengatasi fenomena kekafiran dengan menguatkan tekad, mencerdaskan diri, mengurai benang kusut persoalan kehidupan dengan silah ar-rahim, silah al-fikri dan silah al-amal yang sinergis dengan berbagai kalangan.

Materi kelima, the five spirit of Al-Mizan. The five spirit of Al-Mizan merupakan symbol untuk menggali potensi diri. Ada lima nilai atau spirit yang harus ditanamkan kepada para santeri untuk

melahirkan pribadi unggul yang memiliki karakter: Keilmuan, Keikhlasan, Kemandirian, Kebersamaan, dan Kemaslahatan, yang digambarkan sebagai berikut.



Spirit pertama, Keilmuan. Mengenai spirit keilmuan yang harus ditegakkan oleh seluruh santeri Al- Mizan, sesuai ajaran Islam yang tertera dalam firman Allah sebagai berikut:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

Artinya: “*Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin untuk berangkat semua ke medan perang. Mengapa tidak ada orang yang pergi dari tiap-tiap golongan untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama. Dan kemudian memberi peringatan pada kaumnya saat kembali, agar mereka dapat menjaga diri*” (QS. Al-Taubah [9]: 122).

Rasulullah bersabda, “Siapa ingin meraih dunia, maka wajib mencarinya dengan ilmu. Siapa ingin meraih akhirat, wajib mencarinya dengan ilmu. Siapa ingin meraih akhirat dan akhirat wajib mencarinya dengan ilmu juga”. Syeikh Abu Ali Al-Tsaqafi mengatakan, “Ilmu itu hidupnya hati dari kebodohan dan cahaya iman yang melindungi dari kedzaliman”.

Spirit kedua, Keikhlasan. Mengenai spirit keikhlasan ini Allah telah berfirman: وما أمرنا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين , artinya “Dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk beribadah penuh keikhlasan...”(QS. Al-Bayyinah [98]: 5). Rasulullah bersabda, ” Setiap manusia akan hancur kecuali yang berilmu. Setiap yang berilmu akan rugi kecuali yang beramal. Setiap yang beramal akan sia-sia kecuali yang ikhlas”.

Keikhlasan hati dan ketulusan jiwa akan membuat manusia tegar meskipun diasingkan oleh masyarakat yang terpedaya hawa nafsu. Keikhlasan akan menjadi kemenangan dalam kekalahan, kenyang dalam kelaparan, aman dalam ketakutan serta selalu gembira meskipun derita mendera. Keikhlasan mampu mengubah tujuan perjuangan seseorang yang semula untuk diri sendiri menjadi berguna bagi sebanyak mungkin umat manusia yang membutuhkan. Sosok yang berjiwa ikhlas itu ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi saudara, tetangga, masyarakat, dan generasi yang akan datang.

Spirit ketiga, Kemandirian. Kemandirian yang tertanam sejak kecil, termasuk kerasnya pengalaman hidup, akan mendorong seseorang menjadi pemimpin. Kemandirian tersebut diperlukan sebagai sebuah kemampuan untuk mengembangkan pertanggungjawaban diri secara jujur, memaksimalkan potensi diri, dan mengembangkan kreativitas untuk memutus ketergantungan terhadap kekuatan lain. Seorang yang mandiri akan mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat, yaitu berpandangan jauh ke depan (*visioneer*), berkemauan kuat (*passion*), menguasai perubahan, berintegritas tinggi, pemelajar yang tekun, amanah (*trust*), dan berani mengambil resiko (*courage*).

Spirit keempat, Kebersamaan. Kebersamaan, persaudaraan, atau *ukhuwwah* telah disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبأعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

Artinya, “Mereka diliputi kehinaan di mana pun mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali Allah dan tali kemanusiaan...” (QS. Ali Imran [3]: 112). Kebersamaan sebagai solusi yang ampuh untuk menghindarkan masyarakat dari kehancuran, kehinaan, kebinasan, dan keterpurukan.

Habl min Allah atau tali agama Allah (*habl min Allah*) adalah nilai agama yang dilandasi semangat tauhid, yang merupakan suatu kesatuan manusia (*unity of mankind*). Dalam konteks ini, masyarakat muslim tidak dibenarkan terjadi diskriminasi dalam agama, kelas, ras, gender, atau apapun. Masyarakat tauhid sejati yang diajarkan Rasulullah, sesungguhnya mempunyai tugas untuk menjamin nilai kesatuan dan keutuhan yang sempurna, yaitu dengan menghilangkan dominasi terhadap kelompok yang lemah dan dilemahkan. Apabila terjadi diskriminasi di antara sesama umat manusia, maka hal itu sama berarti ada pengingkaran terhadap pembentukan masyarakat yang adil.

Habl min al-nas atau hubungan dengan sesama manusia adalah sebuah komitmen untuk menghormati segala upaya perubahan ke arah yang lebih baik, dapat berupa kesepakatan, keputusan, maupun aturan yang disepakati bersama.

Al-Mizan menambahkan satu lagi, *habl min al-alam* atau hubungan dengan lingkungan. Hal ini penting karena di tengah krisis ekologi dan perusakan alam yang kian parah, kaum beragama seharusnya menggugat sikap keberagamaannya. Bukankah kaum beragama seharusnya menjadi pelopor untuk melestarikan alam semesta dan kehidupan, bukan ikut merusaknya. Ini dimulai dengan perbaikan cara pandang dan tindakan langsung dalam upaya pelestarian lingkungan.

Spirit kelima, Kemaslahatan. Mengenai kemaslahatan, dalam sebuah kaidah ushul fiqh disebutkan, “Tasharruf al-imam ‘ala al-raiyyah manuthun bi al-mashlahah” yaitu bahwa kebijakan pemerintah terhadap warga negaranya harus diorientasikan kepada kesejahteraan. Kesejahteraan itu harus bersifat esensial yang menyentuh

kesejahteraan umum, mencegah kerusakan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan (kontrak) yang telah disepakati umum.

Al-Mizan sebagai lembaga pendidikan terus berupaya mengembangkan wacana keagamaan kritis, penguatan teologi pembebasan. Al-Mizan terus berupaya mengembangkan kultur masyarakat yang berorientasi pada perubahan sosial dan penciptaan keadilan sosial. Semua itu diarahkan pada pengorganisasian sumber daya pondok pesantren dan masyarakat pendukungnya menjadi sebuah kekuatan strategis yang dapat mengisi ruang pengambilan kebijakan publik dan memastikan kebijakan publik yang bernafaskan keadilan.

Pondok pesantren Al-Mizan mempunyai tradisi (*al-turâts*) khas yang merupakan khazanah kejiwaan (*makhzun al-nafs*) yang bersifat material dan immaterial. Tradisi ini bila dikembangkan akan melahirkan pribadi yang berkarakter kuat, memiliki integritas dan pemikiran yang progresif-transformatif. Karakter ini akan bersifat memunculkan sikap dan perileku toleran sehingga jauh dari watak radikal, apalagi ekstrem. Misal dalam menyikapi masalah sosial, politik, maupun kebangsaan. Oleh karena memiliki sikap dan perilaku yang toleran, maka para santeri Al-Mizan akan mampu menjembatani problem keotentikan dan kemodernan (*musykilah al-ashlah wa al-hadatsah*) secara harmonis.

Setelah santeri mengikuti kelima materi tersebut diharapkan mereka mampu menjelaskan lima nilai dasar, makna, argumen al-Quran dan hadist, serta contoh tindakannya yang terkandung dalam *The Five Spirit of Al-Mizan*.

Materi keenam, Guru-guru utama. Pondok pesantren yang berhaluan Islam Ahl Sunah wa al-Jamah ala Nahdhatul Ulama, mempunyai tradisi intelektualitas dan kekayaan intelektual luar biasa. Tradisi yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lembaga pondok pesantren. Apabila ditelusuri, geneologi intelektual di kalangan ulama pondok pesantren Nahdlatul Ulama tidak dapat dilepaskan dari jaringan yang dibentuk ulama peletak dasar intelektualisme pondok pesantren dan NU, seperti: Syekh

Nawawi Al-Bantani, K.H. Mahfudz Al-Termasi, K.H. Khalil Bangkalan, K.H. Asnawi Kudus, K.H. Bisyr Syamsuri, dan K.H. Hasyim Asy'ari, dan lain-lain.

Setelah mengikuti materi ini para santeri diharapkan: (1) mampu menjelaskan geneologis keilmuan guru-guru pesantren; (2) mampu menjelaskan beberapa guru-guru utama pondok pesantren serta keistimewaan, ajaran, dan kitab karangannya; (3) mampu menyebutkan keterkaitan para pengajar di Al-mizan dengan guru-guru utama pondok pesantren lain; (4) mampu bersikap dan berperilaku meneladani para guru utama pondok pesantren.

Materi ketujuh, *Manhaj Al-Fikr*. *Manhaj al-fikr* bertujuan untuk menciptakan generasi moderat. *Manhaj al-Fikr* merupakan pikiran, gagasan, pendapat para pengasuh, baik yang disampaikan di media masa cetak, elektronik, maupun dalam kegiatan Suluk Mizani, dengan maksud untuk menyikapi, merespon, mengkritisi, dan menanggapi peristiwa di tanah air yang berpotensi mengandung unsur radikalisme yang bertujuan agar para santeri lebih moderat, adil dalam berpendapat dan menilai, dan mendudukan persoalan secara proporsional. Beberapa kejadian yang berpotensi menimbulkan sikap dan perilaku radikalisme, seperti: ujaran kebencian, menghina seseorang, kelompok, atau Pemerintah, menuduh tanpa bukti dan fakta kuat, memprovokasi untuk membuat keributan, menteror, dan berbagai bentuk kekerasan, seperti: kekerasan fisik, verbal, emosi, psikologis, ekonomi, politik, seksual, ras, dan agama.

Dalam pemikiran keagamaan, baik yang menyangkut sosial, ekonomi, atau politik, Al-Mizan berhaluan Islam Ahl Sunnah wa al-Jamaah 'ala Nahdhatul Ulama (NU). Oleh karena itu, prinsip yang paling sering dijadikan dasar untuk seluruh tindakan dan kebijakan Al-Mizan adalah kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme.

Setelah mengikuti materi ini para santei diharapkan: (1) mampu menjelaskan prinsip yang sering dijadikan dasar untuk seluruh tindakan dan kebijakan Al-Mizan; (2) mampu menjelaskan arti kebijaksanaan, keluwesan, moderatisme dengan menyebutkan kaidah

fiqhnya; (3) mampu menyebutkan contoh dan tindakan pemikiran politik NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun strategi yang digunakan dalam *Suluk Mizani* ini adalah ISHLAH yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Introduksi:** pengantar pembelajaran yang meliputi abstraksi materi, standar kompetensi dan indikator kompetensi yang diharapkan tercapai santeri setelah mengikuti satu materi pembelajaran.
2. **Stimulan:** memulai proses dengan doa, apersepsi dan rangsangan, baik melalui cerita, kuis atau metode lainnya.
3. **Harakah:** gerakan khas *suluk mizani* dengan yel-yel yang akan menggairahkan semangat para salik. Kegiatan ini dimulai dan diakhiri dengan salam Al-mizan.
4. **Latihan:** langkah inti dari *suluk mizani* adalah latihan yang meliputi Teori, yakni bahasan materi inti dan Aksi berisi petunjuk apa yang harus dilakukan para salik setelah mendapat materi ini.

Materi kedelapan, *Manhaj Al-Haraki*. *Manhaj al-Haraki* merupakan gerakan kampanye multikultural yang selalu dilakukan di lapangan secara masal sebelum kegiatan berlangsung, misalnya: setiap upacara senin, kegiatan pramuka, olahraga, atau pengajian, dengan cara menggerakkan anggota badan sambil menyuarakan kalimat yel-yel semangat, antara lain sebagai berikut:



Berikut ini beberapa foto sedang melakukan gerakan *manhaj al-haraki* pada santri Madrasah Tsanawiyah, SMA, dan SMK:



Gerakan Manhaj Al-Haraki Santri Tsanawiyah, SMA, dan SMK

Kedua, Identitas Pondok Pesantren. Pondok pesantren Al-Mizan memiliki identitas yang berbeda dengan pondok pesantren lainnya. Identitas ini untuk menegaskan dasar,

visi, misi, dan tujuan sebagai pondok pesantren yang mengusung moto perjuangan: “Al-Mizan untuk Keadilan dan Harmoni”. Identitas pondok pesantren Al-Mizan mencakup: dasar, visi, misi, tujuan, dan moto juang yang dapat dijelaskan berikut ini.

Visi Pondok Pesantren Al-Mizan: “Lembaga pelayanan yang Mandiri, Amanah, Profesional dan Unggul (MAMPU)”.

Misi Pondok Pesantren Al-Mizan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dengan jaringan yang luas dan relevan dengan realitas abad 21.
2. Penguatan dakwah Islam Ahl al-Sunah wa al-Jamaah yang progresif, moderat dan toleran.
3. Pelayanan sosial yang merata dan berkeadilan bagi kelompok masyarakat marjinal dan mustadz’afin.

Tujuan Umum Pondok Pesantren Al-Mizan adalah:

1. Mencerdaskan umat dalam memahami Islam sebagai energi bagi perubahan, perdamaian dan kemanusiaan
2. Mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang kritis dalam berfikir, terbuka dalam bersikap, berdaya saing tinggi dan berkeadilan dalam tatanan kehidupan
3. Menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang toleran, damai dan sejahtera.

Tujuan Khusus Pondok Pesantren Al-Mizan: “Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan standar kompetisi global dan keterampilan abad 21, yaitu : kolaborasi, komunikasi, berfikir kritis, dan kreativitas”.

Ketiga, Profil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan. Profil para pengasuh secara implisit mendukung, memengaruhi, bahkan mewarnai penerapan Pendidikan Multikultural. Sebagaimana sudah dipaparkan di atas tentang profil dan hasil wawancara terhadap beberapa orang ustadz/ustadzah tentang kepribadian dan rekam jejak para pengasuh, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Masing-masing personal memiliki akhlak yang baik dan menjadi suri teladan bagi para ustadz, ustadzah, santeri, dan masyarakat di lingkungan pondok pesantren khususnya, dan

umumnya di kabupaten Majalengka, wilayah III Cirebon, bahkan beberapa pengasuh sudah dikenal di wilayah Jawa Barat.

Masing-masing personal pengasuh telah memiliki kapasitas ilmu agama yang cukup karena mereka telah menuntut ilmu di pondok pesantren yang bervariasi dengan bekal yang relatif cukup mumpuni di bidangnya dan diturut oleh masyarakat.

Masing-masing personal pengasuh sebagai aktivis pengurus dan anggota NU yang *concern* untuk menegakkan ajaran *Ahl al- Sunnah wa al-Jama'ah*, memakmurkan masjid, memberdayakan masyarakat yang termarginalkan agar menjadi masyarakat yang terdidik, melek huruf, melek pendidikan, melek agama, melek informasi, melek teknologi, dan melak ekonomi, mengadvokasi masyarakat tertindas, membantu mengoptimalkan potensi ekonomi agar lebih mandiri dan sejahtera.

Masing-masing pengasuh telah memperoleh pengalaman pelatihan kepemimpinan, keorganisasian, dan keterampilan lain semasa menjadi mahasiswa

Masing-masing personal sebagai pegiat sosial yang telah memiliki pengalaman dalam mengabdikan kepada, untuk, dan bersama masyarakat.

Masing-masing personal memiliki empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang termarginalkan dengan usaha nyata melalui pendidikan yang disediakan untuk semua unsur masyarakat (*education for all*), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Masing-masing personal pengasuh memiliki rekam jejak yang baik di mata masyarakat dan di wilayah kabupaten Majalengka.

Masing-masing personal pengasuh memiliki dedikasi yang tinggi, semangat yang besar, upaya yang sungguh-sungguh, dan komitmen yang kuat untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Semua masyarakat yang ingin berpendidikan akan dilayani, tidak hanya yang mampu membayar, bahkan tidak hanya yang memiliki waktu cukup dalam kelas reguler, sehingga disediakan program paket A, B, C, SMA Terbuka, kursus keterampilan di BLK, penyediaan LKSA dan RPA untuk anak terlantar dan korban kekerasan, sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, pengajian umum untuk masyarakat, kegiatan sosial bersama masyarakat, di samping kegiatan untuk internal santeri dan ustadz dan ustadzah di pondok pesantren Al-Mizan.

Dasar, visi, misi, tujuan, spirit, moto, dan *manhaj al-haraki* pondok pesantren al-Mizan dapat dirangkum dalam gambar berikut:



Keempat, Pengajaran Kitab Kuning. Pengajaran kitab kuning secara implisit mengandung Pendidikan Multikultural. Beberapa foto berikut sedang berlangsung pengajian kitab kuning:



Kegiatan Pengajian Kitab Kuning

Kitab kuning yang diajarkan kepada santeri di pondok pesantren Al-Mizan adalah sebagai berikut:



Kitab *Hadits al-Arbain al-Nawawiyah*

Kitab *al-Arba'in An-Nawawiyah* atau judul lengkapnya *Al-Arbain fi Mabani al-Islam wa Qawa'id al-Ahkaam* karya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Bin Murri Al-Nizami Al-Nawawi al-Bantani, yang memuat 40 hadis landasan Hukum, banyak digunakan dan dihafal oleh santeri di beberapa pondok pesantren di Indonesia.

Berdasarkan hasil FGD, kitab tersebut mengandung minimal ada delapan hadits yang terkait dengan Pendidikan Multikultural, yaitu: (1) mencintai sesama muslim, (2) berkata yang baik atau diam, (3) jangan marah, (4) berbuat baik dalam segala urusan, (5) milikilah sifat malu, (6) larangan berbuat dzalim, (7) jangan berbuat kerusakan, dan (8) jangan saling mendengki.

Kitab *Safinah al-Najah*

Kitab *Safinah al-Najah* karya Syeikh Salim bin Sumair Al Hadhramy yang menjelaskan dasar-dasar fiqh dalam perspektif Imam

Syafi'i, ini seolah-olah tendensius mengajarkan santeri untuk menganut monokultur. Hal ini berpotensi pada sikap menyalahkan dan tidak toleran terhadap pandangan atau mazhab lain, jika pondok pesantren hanya mengajarkan kitab ini sebagai satu-satunya rujukan. Namun jika menganalisis kontennya, terdapat beberapa bab yang mengandung Pendidikan Multikultural, seperti: bab jenazah, shalat berjamaah, zakat, dan haji. Pada bab pengurusan jenazah, dapat menumbuhkan sikap kepedulian terhadap orang lain dan kebersamaan. Pada bab shalat berjamaah, secara implisit mengajarkan kedisiplinan, kesetaraan, persamaan, kedamaian, dan toleransi. Pada bab puasa, secara implisit menanamkan kepekaan sosial dan tanggung jawab. Bab zakat, dengan jelas mengajarkan kepedulian sosial. Pada bab haji, mengajarkan kedisiplinan, tanggungjawab, toleransi, kebersamaan, kesetaraan, dan toleransi.

Kitab *Fath al-Qarib*

Kitab *Fath al-Qarib* judul aslinya *Fath al-Qarib Al-Mujib fi Syarah al-Fazh al-Taqrīb atau al-Qawl al-Mukhtar al- fi Syarah al-Ghayat al-Ikhtishar* atau orang sering menyebut *Taqrīb* saja, karya Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani (434 H - 593 H). Kitab ini adalah kitab fiqh madzhab Syafi'i yang paling populer di kalangan pondok pesantren salaf di Indonesia.

Berdasarkan hasil FGD, dalam kitab *Fath al-Qarib* ini terdapat beberapa tema secara implisit mengandung Pendidikan Multikultural, yaitu pada bab hukum jual beli, jinayat, waris, nikah, jihad, berburu, pengadilan, dan memerdekakan budak.

Pada bab jual beli, Islam mengatur bahwa jual beli harus didasarkan kepada kejujuran, saling ridha, tidak merugikan salah satu pihak, mengandung kemaslahatan, kemanfaatan, penghargaan, dan terjadi silaturahmi. Nilai-nilai ini jika diaplikasikan dalam praktik kehidupan yang berhubungan antar manusia, akan tercipta kehidupan yang adil, jujur, dan saling menghargai. Islam melarang melakukan *taskhir*, seperti: menghina, merendahkan, dan mengejek, karena dapat merusak relasi sosial. Pada bab waris dan wasiat, Islam ingin

mengajarkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan tanggungjawab yang diembannya. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh harta warisan, meskipun sebelum Islam perempuan hanya menjadi barang yang diwariskan, tetapi sejak Islam datang, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai manusia yang harus dihormati dan memperoleh hak waris dari harta orang tuanya maupun suami yang telah meninggal.

Kitab *Ta'lim al-Muta'allim*

Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* karya Syekh al-Zarnuji, meliputi: (1) Hakikat Ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaan ilmu; (2) Niat dalam mencari ilmu; (3) Cara memilih ilmu, guru, teman dan Ketekunan; (4) Cara menghormati ilmu dan guru; (5) Kesungguhan mencari ilmu, beristiqamah dan cita-cita luhur; (6) Ukuran dan urutannya; (7) Tawakal; (8) Waktu belajar ilmu; (9) Saling mengasihi dan saling menasehati; (10) Mencari tambahan ilmu pengetahuan; (11) Bersikap *wara'* saat menuntut ilmu; (12) Hal yang menguatkan hafalan; (13) Hal yang mempermudah datangnya rejeki.

Berdasarkan FGD, kitab *Ta'lim al-Muta'allim* mengandung Pendidikan Multikultural pada bab musyawarah, yang mengantarkan santri memiliki sikap demokratis, menghargai orang lain, dan menerima perbedaan. Konsep musyawarah ditemukan sinonimnya dalam beberapa istilah: *al-musyawahah*, *al-musawa*, *al-adl*, *hablu min al-nas*, *al-taaruf*, *al-ta'awun*, *al-salam*, *al-ta'adudiyat*, *al-tanawwu'*, *al-tasamuh*, *al-rahmah*, *al-afw*, *al-ihsan*.

Kitab *Taysir al-Khalaq*

Kitab *Taysir al-Khalaq fi 'Ilmi al-Akhlaq* karya Al-Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini membahas Ilmu Akhlaq dan perilaku kehidupan manusia, terutama santri. Isi Kitab ini terdiri dari pembahasan: (1) Ketakwaan, (2) Adab Guru, (3) Adab Santeri, (4) Hak kedua orang tua, (5) Hak Kerabat, (6) Hak Tetangga, (7) Adab Pergaulan, (8) Kerukunan, (9) Persaudaraan, (10) Adab Majelis, (11) Adab Makan, (12) Adab Minum, (13) Adab Tidur, (14) Adab di Masjid, (15) Kebersihan, (16) Kejujuran dan Kebohongan, (17) Amanat, (18)

Kesucian diri, (19) Budi Luhur, (20) Sifat Pemaaf, (21) Kedermawanan, (22) Rendah hati, (23) Kemuliaan Diri, (24) Dendam, (25) Dengki, (26) Ghibah, (27) Mengadu domba, (28) Kesombongan, (29) Ghurur, (30) Kezhaliman, dan (31) Keadilan.

Berdasarkan FGD menyimpulkan, keutamaan dari kerukunan adalah memberi keuntungan untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah *Berpegang teguhlah kamu sekalian dalam agama Allah dan jangan bercerai-berai*. Dalam bab adab Guru dijelaskan, guru adalah penunjuk jalan bagi siswa untuk mencapai tingkat kesempurnaan dengan memberinya ilmu dan pengetahuan. Seorang guru harus bertakwa, rendah hati, ramah, pemaaf, berwibawa, menunjukkan rasa kasih sayang kepada para siswa/santerinya, menasehati, mendidik, dan tidak memaksakan kata-kata yang sulit dipahami.

Pada bab adab santeri dijelaskan, santeri harus rendah hati, jujur, berjalan dengan tenang, menjauhkan pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan, jujur atas ilmu yang diajarkan kepadanya, tidak boleh sombong dan menjawab sesuatu yang tidak diketahuinya. Santeri mempunyai adab terhadap Kyai dan para ustadznya antara lain: meyakini bahwa jasa Kyai dan para ustadznya lebih besar daripada orangtuanya, maka harus menunduk di depannya, duduk dengan sopan, mendengarkan perkataannya, tidak bergurau, tidak memuji guru lain di hadapannya yang dikhawatirkan salah paham.

Pada bab adab santeri kepada temannya, dijelaskan harus menghormati, tidak menghina, menganggap diri lebih dari mereka, mengejek salah seorang dari mereka yang lambat pemahamannya, gembira bila guru menegur teman yang bersalah, karena akan menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Pada bab hak orang tua dijelaskan, harus mematuhi perintah orangtua, menghormati, mencintai, menyayangi, dan selalu mendoakannya. Ketika duduk bersama orang tua harus sopan, tidak memperhatikan kesalahan mereka, mengganggu, mengucapkan

perkataan kasar, membantah, dan berjalan di depan keduanya.

Pada bab hak tetangga dijelaskan, harus memberi salam bila berpapasan, berbuat baik kepada mereka, memberi imbalan atas kebajikannya, menjenguk bila sakit, membantu keuangan, mengucapkan selamat ketika mereka memperoleh kebahagiaan, menghibur bila kesusahan, menutupi kejelekannya, menyingkirkan gangguan darinya, dan menghormatinya.

Beberapa adab yang dijelaskan di atas, merupakan unsur-unsur yang dapat membentuk sikap dan perilaku anti radikal pada santeri. Sikap saling menghormati, menghargai, dan kebersamaan merupakan titik orientasi bagi Pendidikan Multikultural untuk menentang sikap dan perilaku radikalisme yang menodai nilai kemanusiaan secara universal, seperti: kekerasan, permusuhan, konflik, dan sikap individualistik.

Keadilan merupakan salah satu yang dibahas dalam kitab ini, di mana dijelaskan bahwa keadilan adalah bersikap di tengah dalam segala urusan dan berjalan di dalamnya sesuai dengan syariat. Keadilan di dalam kitab ini dijelaskan ada dua macam yaitu: (1) keadilan manusia dalam dirinya dengan menempuh jalan yang lurus, (2) keadilan terhadap orang lain, terbagi ke dalam tiga macam:

1. Keadilan penguasa terhadap rakyat dengan bersikap baik dan memberi kepada setiap orang yang berhak, yang menjadi haknya.
2. Keadilan rakyat terhadap penguasa, siswa terhadap gurunya, dan anak terhadap orang tuanya dengan ketaatan yang ikhlas.
3. Keadilan manusia terhadap sesamanya dengan tidak bersikap sombong kepada mereka dan mencegah gangguan dari mereka.

Terkait sikap adil Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat Adil dan Ihsan”. Ayat ini menjadi landasan moral dan etika bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan adil, dalam ucapan, sikap, maupun perbuatan. Perlakuan adil di sini berkaitan dengan interaksi sosial antara orang muslim satu dengan orang muslim lainnya, antara orang muslim dan non muslim,

antara orang Arab dengan non Arab, orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Islam tidak mengajarkan doktrin rasisme, yang menempatkan satu kelompok lebih superior dari kelompok lain.

Kitab *Riyadh al-Shalihin*

Kitab *Riyadh al-Shalihin* karya Abu Zakaria Muhyidin Al-Nawawi ini merupakan yang paling tebal disbanding kitab sebelumnya, meskipun materi yang diajarkan tidak seluruhnya, biasanya dipilih oleh ustadznya. Kitab ini terdiri dari 372 bab yang terbagi ke dalam dua atau tiga jilid. Pembahasan biasanya dimulai dari ayat al-Qur'an yang terkait dengan tema bab, kemudian hadits-haditsnya dan penjelasan ringkas (*syarah*)nya. Tiap tema memuat lebih dari satu hadits, sehingga jumlah hadits dalam kitab tersebut ada 1893 hadits.

Berdasarkan FGD, kitab *Riyadh al-Shalihin* paling lengkap mengandung Pendidikan Multikultural, yaitu nilai keterbukaan, musyawarah, kemanusiaan, toleransi, tolong menolong, keadilan, dan persaudaraan, yang terdapat dalam bab-bab perintah maupun larangan beberapa perbuatan sebagai berikut:

Pada bab perintah, dijelaskan agar: menunaikan amanat, mengembalikan hak orang yang dizhalimi, menjunjung kehormatan umat Islam, kasih sayang, mendamaikan orang yang bersengketa, menyayangi anak yatim, perempuan, orang lemah, dan miskin, menggauli isteri dengan baik dan berbuat adil terhadap mereka, memberi nafkah untuk keluarga, mendermakan sebagian harta yang baik dan dicintai, berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik kepada orangtua, bersilaturahmi, berbuat baik kepada kenalan bapak dan ibu, kerabat, isteri, orang yang pantas dihormati, memuliakan keluarga Rasulullah, menghormati ulama, orang terpandang dan yang berjasa, bergaul dengan sesama manusia, tawadhu, dan merendahkan diri kepada sesama mukmin, santun, sabar, ramah, memberi maaf, menjadi pemimpin yang adil, bersikap lunak, memberi nasihat, tidak menipu, tidak boros, berbuat kemaslahatan, mendahulukan kepentingan rakyat.

Pada bab larangan, dijelaskan agar menghindari: berbuat

dzalim, makan harta anak yatim, membuka rahasia umat Islam, durhaka kepada orangtua, memutuskan persaudaraan, takabur dan sombong, menyakiti orang shalih, lemah, dan miskin, mengadu domba, berdusta, menjadi saksi palsu, membenci dan memutuskan tali persahabatan, mencaci maki, dengki, mengutuk, mengunjing dan mendengar gunjingan, berburuk sangka, mengganggu dan menyakiti orang lain, menghina orang Islam, menghina nasab, menipu, berkhianat, mendiamkan sesama Muslim lebih dari tiga hari, berbisik di depan, riba, riya, mengkafirkan orang Islam, menangguk bayar utang, dan bersikap munafik.

C. Sikap dan Perilaku Santeri Pondok Pesantren Al-Mizan

Untuk menilai sikap perilaku santeri di lingkungan pondok pesantren Al-Mizan terkait dengan radikalisme, penulis mengadopsi pendapat Yusuf Qardhawi (2009: 40-55) bahwa seseorang tergolong memiliki sikap dan perilaku radikalisme dapat terlihat dari indikator:

1. Fanatisme terhadap satu pendapat, tanpa mengakui pendapat lain
2. Mewajibkan orang lain melaksanakan yang tidak diwajibkan
3. Sikap keras dan kasar bukan pada tempatnya
4. Menganggap kafir (musuh) kepada yang tidak sepaham.

Berdasarkan FGD di kalangan santeri dan di kalangan *asatidz*, dapat dideskripsikan hasilnya sebagai berikut:

Indikator pertama, sikap fanatisme terhadap satu pendapat tanpa mengakui pendapat lain.

Dari FGD di kalangan *asatidz* dikemukakan bahwa hampir seluruh santeri belum ada yang terlibat perselisihan soal perbedaan pendapat dalam bermadzhab, meskipun mereka seolah telah digiring pada satu madzhab Syafi'iyah sebagai madzhab yang dianut dan

diajarkan di pondok pesantren Al-Mizan. Para santeri menerima ajaran Imam Syafi'i dari kitab-kitab yang diajarkan kepada mereka.

Dalam soal ibadah ritual, para santeri mengikuti apa yang sudah diajarkan, tanpa ada yang nyleneh dan aneh-aneh. Hal tersebut disebabkan, mereka memahami dasar-dasar argumentasi ajaran setiap amalan dari Imam Syafi'i itu dianggap logis dan rasional dari para asatidznya. Di samping itu, keluarga atau orangtua santeri juga umumnya memiliki latar belakang madzhab yang sama, dan pergaulan mereka masih relative terbatas dan homogen, sehingga hampir tidak ada perselisihan pendapat tentang anutan mereka.

Dalam soal muamalah, masing-masing ustadz dan ustadzah selalu menekankan pentingnya untuk hidup rukun tanpa perselisihan dengan teman, keluarga, atau dengan siapapun, bahkan dengan orang yang berbeda agama sekalipun, maklum di Jatiwangi sudah merupakan masyarakat multikultur, banyak pendatang, banyak etnik Cina, Arab, dan lainnya. Dalam pengajaran kitab-kitab kuning sangat ditekankan oleh para asatidznya untuk bersikap moderat, saling menghormati, dan berdamai dengan perbedaan pendapat yang akan terjadi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Para asatidz juga selalu berpesan, tidak mudah terprovokasi, tidak boleh cepat reaktif, apalagi terhadap berita-berita dari media sosial yang belum pasti kebenarannya. Apabila santeri menerima berita-berita yang belum pasti kebenarannya, wajib dilaporkan dan diberitahukan kepada ustadz/ustadzah. Biasanya santeri selalu ditanya oleh ustadz atau ustadzah sebelum pengajian kitab dimulai tentang hari ini dapat berita apa. Bahkan santeri juga diberikan pelatihan/workshop anti hoax, sebagaimana foto berikut ini:



Workshop Dakwah Anti Hoax

Dengan demikian, menurut beberapa ustadz dalam FGD tersebut, hampir tidak ada yang berselisih di masyarakat karena mempertahankan pendapat sendiri yang dianggapnya paling benar. Meskipun demikian, para santeri juga diajarkan untuk berani bertanya, berdiskusi, baik dalam suasana pengajian kitab, apalagi di sekolah, tetapi mereka juga diajarkan beretika ketika menyampaikan pendapat dan argumentasinya.

Gambaran bagaimana egaliternya suasana pengajian kitab di pondok pesantren Al-Mizan, tidak seperti di pondok pesantren tradisional lainnya, di mana antara Kyai atau Ustadz terhalang (terhijab) dengan santerinya, atau santeri putera dan puteri sangat ketat dipisah untuk tidak saling berinteraksi, atau santeri putera duduk di depan dan santeri puteri di belakangnya. Terlihat suasana pengajian kitab yang rileks, dapat tertawa, humor, dan santai tetapi serius, dan salah seorang santeri sedang bertanya kepada Kyai dalam foto berikut:



Suasana Pengajian Kitab Kuning



Santeri sedang bertanya saat Pengajian Kitab

Meskipun suasana egaliter dan santeri diberi kesempatan untuk bertanya, santeri tetap tekun, tertib, beretika, hormat dan menunduk ketika Kyai, ustadz, dan ustadzah sedang berbicara, sebagaimana terlihat dari foto-foto sebagai berikut:



Sikap Sopan dan Serious para Santeri

Berdasarkan FGD di kalangan santeri dikemukakan, mereka merasa bangga menjadi santeri di Al-Mizan, meskipun pengajian kitab itu cukup sulit namun suasananya relax, sehingga hampir semua santeri jarang absen. Dalam bidang ibadah kami diberi ilmunya yang benar, dalam muamalah diajarkan bagaimana harus bersikap dan berperilaku baik, menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kedamaian di lingkungan di manapun berada.

Menurut mereka, kami bangga menjadi seorang muslim, penganut Sunni, kelompok NU, bangsa Indonesia, dan santeri Al-Mizan, sebagaimana selalu diikrarkan setiap berkumpul, terutama pada upacara senin. Rasa kebanggaan itu bukan karena terpaksa harus

diikrarkan dalam yel-yel tersebut, tetapi merupakan refleksi sejati, bahwa apa yang diajarkan dan bagaimana cara pengajaran itu diberikan kepada kami, cukup menyenangkan. Menurut kami, tepat pondok pesantren ini mengusung moto: “Al-Mizan untuk Keadilan dan Harmoni”. Inilah yel-yel kebanggaan yang selalu kami ikrarkan:



Ketika para santeri dalam FGD didesak dengan pertanyaan oleh moderator, bagaimana sikap anda jika menghadapi orang yang berbeda, misalnya: bukan santeri Al-Mizan, bukan Sunni, bukan NU, non muslim, dan orang asing. Mereka mengatakan, ajaran kami melarang berlaku tidak baik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda dalam segala hal. Kami harus menjaga persaudaraan sesama manusia, soal anutan berbeda itu urusan mereka, dan kami tetap harus menghormati hak mereka.

Apabila dianalisis secara kritis, yel-yel tersebut yang selalu disampaikan sebagai refleksi dari *Suluk Mizani* berpotensi mengandung makna ambigu. Di satu sisi, para santeri diharapkan memiliki wawasan multikultur, namun di sisi lain mereka ditempa monokultur untuk memiliki kebanggaan pada identitas mereka sendiri. Dampak positif dari yel-yel tersebut, akan menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan pada identitas: agama, madzhab, bangsa, dan

almamaternya. Dampak negatif dari yel-yel tersebut berpotensi pada fanatisme terhadap pendapatnya sendiri tanpa mengakui pendapat lain yang berbeda.

Indikator kedua, mewajibkan orang lain melaksanakan yang tidak diwajibkan.

Dari FGD di kalangan *asatidz* dikemukakan, sebagian besar santeri tidak terlibat dan tidak memiliki keberanian mewajibkan orang lain yang berbeda keyakinan dan anutan untuk melaksanakan yang tidak diwajibkan. Sikap demikian tidak terjadi di lingkungan pondok pesantren Al-Mizan yang homogen, bahkan di luar pondok sekalipun belum terdengar seorang santeripun yang terlibat dalam tindakan tersebut, kata salah seorang ustadz (AH) dalam FGD itu.

Menurut salah seorang ustadz (ZA), pondok pesantren Al-Mizan memang milik keluarga Fauzan, dan hampir tidak ada saham masyarakat di dalamnya, tetapi tidak diciptakan sebagai “mercusuar” atau “menara gading” yang terpisah dari masyarakat. Warga pondok pesantren dan masyarakat berinteraksi dan bersinergi dalam bidang sosial dan pendidikan. Misalnya, dalam ajang festival Al-Mizan yang menghadirkan pertunjukan barongsay dari masyarakat Cina sekitar pondok, shalat berjamaah Jum’at, shalat ied al-fitr, shalat ied al-adha, shalat gerhana, shalat istisqa, santunan anak yatim dan kaum dhuafa, pengajian bulanan wali santeri dan masyarakat, khitanan masal, dan lain-lain. Siapapun masyarakat sekitar, akan dilayani apabila meminta bantuan. Misalnya: siapapun yang datang ingin bersekolah di Al-Mizan, tidak ada yang ditolak meskipun tidak mampu membayar SPP; siapapun yang datang ingin belajar keterampilan tertentu di BLK pasti diterima; siapapun yang datang ingin memiliki ijazah yang disetarakan, dapat dilayani di pendidikan paket A,B,C atau dapat mengikuti SMA Terbuka; siapapun yang meminta bantuan dari kasus kekerasan dapat ditampung di rumah singgah sambil diadvokasi dengan bantuan hukum dan konseling. Kegiatan sosial dan dakwah kepada masyarakat ini merupakan pendidikan plus, yang tidak semua pondok pesantren mau dan mampu melakukannya. Kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh pondok pesantren ini merupakan visi, misi, dan tujuan didirikannya

pondok pesantren ini untuk mewujudkan motto “Al-Mizan untuk Keadilan dan Harmoni” di tengah masyarakat, bukan hanya slogan.

Dari FGD di kalangan santri juga diakui bahwa tidak ada santri yang berani melakukan perbuatan untuk mewajibkan orang lain melaksanakan sesuatu yang tidak menjadi kewajibannya, bahkan salah seorang santri (AR) mengatakan dengan lantang, bagaimana mungkin kami berani melakukan hal itu, apalagi kepada orang lain yang asing, sedangkan untuk menegur yang seharusnya sekalipun dibutuhkan kearifan, kesopanan, tidak hanya sekedar keberanian. Menurut santri yang lain (LN), biarlah kita bersepakat untuk tidak sepakat sekalipun, asal tidak membuat orang lain tersakiti.

Dari FGD dengan *asatidz*, diketahui bahwa banyak faktor yang melatar belakangi sikap santri demikian, antara lain: (1) santri merasa masih hijau (junior) yang belum pantas dan tidak berani mengajak apalagi mewajibkan kepada orang lain untuk melaksanakan ini atau itu; (2) santri belum merasa belum memiliki ilmu pengetahuan yang cukup; (3) santri merasa belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memengaruhi, mengajak, atau menegur orang lain; (4) santri mungkin kurang peduli menyampuri persoalan orang lain; (5) santri terbiasa bergaul dengan teman, keluarga, dan masyarakat yang homogin, yang sama-sama melaksanakan kewajiban tertentu sesuai dengan ilmu yang telah mereka terima di pondok pesantren; (6) santri sudah terbiasa bergaul dan berbaur dengan masyarakat sekitar, sehingga lebih toleran menghadapi orang lain yang berbeda kultur. Berikut ini beberapa foto dokumen kegiatan santri berbaur dengan masyarakat:



Shalat Istisqa dengan Masyarakat



Peringatan Maulid Nabi SAW dengan Masyarakat



Shalat Ied al-Fitri dan Halal bi-halal dengan Masyarakat



Istighatsah dengan Masyarakat



Pengajian Bulanan Orangtua Santeri



Pagelaran Seni Multikultural di Festival Al-Mizan



Upacara Hari Santeri 2019

Indikator ketiga, sikap keras dan kasar bukan pada tempatnya.

Dari FGD dengan *asatidz* dikemukakan, bahwa sikap keras dan kasar yang merupakan sifat temperamental individu mungkin saja ada yang merupakan pembawaan kepribadiannya, namun hal ini sedikit demi sedikit dapat dikendalikan dengan terus menerus menerima pendidikan di pondok pesantren ini, hal ini berdasarkan banyaknya orangtua yang melaporkan perubahan sikap keras dan kasar anak-anaknya menjadi lebih baik setelah mondok di Al-Mizan. Di samping itu, menurut salah seorang ustadz (AH) yang sudah berkiprah selama 10 tahun lebih, hampir jarang mendengar dan menerima pengaduan atas sikap keras dan kasar para santerinya. Apalagi di hadapan Kiyai, ustadz/ustadzah, guru-guru, bahkan kepada tamu dan siapapun yang berkunjung ke pondok pesantren, mereka selalu menyalami, menundukkan kepala, membungkuk, dan bersikap sopan, meskipun tidak sampai “mengesot” seperti tradisi santeri salaf di pondok pesantren lainnya.

Dari FGD di kalangan santeri dikemukakan, ada sedikit santeri, tetapi masih dapat dihitung jari yang memiliki perangai kasar dan temperamen ketika dia tersinggung atau ada alasan yang menimbulkan dia berbuat kasar, tetapi biasanya tidak berlangsung lama dan segera dapat ditangani oleh teman seniornya atau ketua pondok. Biasanya mereka diminta menjelaskan masalahnya, kemudian diishlah, meminta maaf, dan membaca istighfar.

Dari FGD di kalangan *asatidz* maupun santeri dikemukakan, bahwa kalua yang dimaksudkan sikap keras dan kasar bukan pada

tempatnyanya, yang mengarah kepada tindakan sadis dan radikalisme, tidak ada seorangpun yang terlibat. Hal tersebut disebabkan, santri yang melanggar aturan dengan tidak menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, akan memperoleh sangsi, sebagaimana peraturan pondok pesantren yang sudah dipaparkan di muka. Di samping sangsi dari pimpinan pondok, santri yang berbuat onar, makar, kerusakan, merugikan, dan menyakiti orang lain, akan menanggung akibatnya, dijauhi oleh temannya sebagai sangsi sosial.

Dengan demikian dapat dikatakan, santri pondok pesantren Al-Mizan tidak ada yang terindikasi memiliki sikap dan perilaku radikal. Apabila kesimpulan ini benar, maka moto juang “Al-Mizan untuk Keadilan dan Harmoni”, serta moto kerja Al-Mizan: *Trust, Partnership, Share, Harmonize, Network, Collaborate, Support, dan Work*, yang merupakan uraian dari kata TEAMWORK, tercapai. Moto juang dan moto kerja dipajang di kantor yayasan maupun di pondok pesantren Al-Mizan, di samping “*The Five Spirit of Al-Mizan*”, sebagai penyemangat dan pengingat perjuangan dan pengabdian civitas academica Al-Mizan.



Indikator keempat, menganggap kafir (musuh) kepada yang tidak sepaham.

Dari FGD di kalangan *asatidz* maupun santri dikemukakan, tidak ada santri yang memiliki sikap dan perilaku yang memvonis dan memberi atribut musuh apalagi kafir kepada orang lain, yang berbeda faham sekalipun. Masyarakat Cina yang hidup berdampingan di sekitar pondok pesantren tidak dipandang musuh yang harus diperangi meskipun mereka berbeda agama dan tradisi. Warga pondok sudah

terbiasa dan hidup berdamai dengan berbagai lapisan masyarakat dan berteman di pondok dengan berbagai tradisi dan, sifat, dan kepribadian yang berbeda. Mereka juga menyaksikan dan meneladani Kyai, *asatidz*, dan guru-guru yang menunjukkan sikap pluaralitas, egaliter, dan baik kepada siapapun. Di samping itu, para santeri terus menerus ditempa pikirannya dengan pengetahuan pentingnya hidup harmonis dengan sesama manusia, bahkan dengan alam melalui pengajian kitab kuning yang selalu menjadi penekanan para *asatidz* dalam bab muamalah, dibina akhlaqnya dengan pengajaran akhlaq secara teori maupun praktik kehidupan keseharian di lingkungan pondok, dan dilatih sopan santun sebagaimana tradisi santeri pondok pesantren, terutama adab terhadap Kyai dan *asatidz*, sangat jelas terlihat berdasarkan observasi di pondok pesantren ini.

Dengan penjelasan dalam FGD *asatidz* maupun santeri, dapat disimpulkan, santeri pondok pesantren Al-Mizan tidak ada yang menjurus pada sikap dan perilaku radikal berdasarkan empat indikator yang telah dibahas. Penulis mengakui dan menyaksikan, bahwa sopan santun santeri yang ditunjukkan santeri, bukan hanya terjadi di pondok pesantren ini, tetapi hampir di semua pondok pesantren salaf (Sunni), merupakan tradisi yang melekat, yang kemudian menjadi kepribadian santeri, berbeda dengan siswa di sekolah yang tanpa mondok. Ini merupakan kelebihan pendidikan pondok pesantren dibandingkan pendidikan sekolah saja.

Meskipun demikian, ada saja tantangannya dari orang yang sentiment kepada pondok pesantren, bahwa pendidikan sopan santun dan penghormatan (*ta'dzim* dan *takrim*) kepada Kyai, *asatidz*, dan guru-guru atas keshalehan pribadinya dan kedalaman ilmunya, yang ditanamkan kepada santeri di pondok pesantren dipandang sebagai pendidikan feodal karena terjadi pengkultusan, sehingga tidak humanis dan melahirkan relasi hirarkhis yang timpang. Pendidikan multikultural di pondok pesantren menjadi ambigu. Namun dalam realitas, kaum Sunni justru yang lebih toleran dan dapat berdamai dengan berbagai perbedaan di masyarakat. Kaum Sunni banyak yang menjadi pegiat sosial, penegakan HAM, dan pemikirannya moderat.

D. Internalisasi Santeri terhadap Pendidikan Multikultural

Berdasarkan FGD di kalangan *asatidz* dan santeri, diketahui bahwa Pendidikan Multikultural di pondok pesantren Al-Mizan diinternalisasi oleh santeri melalui empat cara, yaitu: (1) *Manhaj al-Fikr*; (2) *Manhaj al-Haraki*; (3) pengajaran kitab kuning; (4) Figur ideal multikulturalisme; (5) kegiatan keagamaan. Kelima cara ini akan dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, *Manhaj al-Fikr*. *Manhaj al-fikr (multicultural knowledge)* yaitu memberi wawasan pengetahuan multikultural kepada santeri sebagai upaya menangkal sikap radikal. *Manhaj al-fikr* merupakan ide-ide, gagasan, fikiran tentang multikulturalisme dari para pengasuh pondok pesantren Al-Mizan, terutama dari empat tokoh penting K.H.Maman Imanul Haq, K.H. Mas Zaenal Muhyidin, H. Zaenal Arifin, dan ustadz Ade Duryaman yang dituangkan dalam bentuk tulisan di media masa cetak maupun elektronik.

Beberapa buah pikiran dan opini tertulis di web yayasan (<https://almizanjatiwangi.or.id/profil/visi-misi/>) adalah: “Pesantren dan Budaya Damai” (H. Asep Zaenal Aripin), “Syekh Qura Pendiri Pesantren Pertama di Jawa Menyebarkan Islam dengan Kedamaian” (Ade Duryaman), “Syair dengan Kelembutan” (Ade Duryaman), Spirit Maulid Meneladani Akhlaq al-Karimah Nabi” (Ade Duryaman), “NU Perlu Porsi Besar Da’wah Inovatif dan Adaptif Kekinian” (K.H. Maman Imanul Haq), “Jangan Remahkan Kekuatan Pesantren” (K.H. Maman Imanul Haq), “Al-Mizan Ajarkan Islam Damai” (K.H. Mas Zaenal Muhyidin), “Ngaji Rutin Bulanan Cara Al-Mizan Membangun Kebersamaan” (H. Asep Zaenal Aripin), “Festival Al-Mizan: Kolaborasi Spirit Religi & Seni Budaya” (Ade Duryaman), “Pentingnya Cinta Alam untuk membentengi Anak dari Faham Radikalisme” (Ade Duryaman), “Suluk Mizani Membangun Karakter Siswa” (Wahyuddin As-Siraji, alumni).

Manhaj al-fikr yang disampaikan secara lisan berbentuk

khutbah Jum'at, khutbah Ied Fitr, Ied Adha, Istisqa, atau tausiyah kuliah subuh, majlis ta'lim, kuliah tujuh menit (kultum) Ramadhan, nasihat dalam upacara pernikahan, da'wah dari K. H. Maman Imanul Haq di masyarakat, dan pembinaan rutin untuk santeri putera dan puteri setiap hari Sabtu malam jam 20.00 – 21.30, secara bergiliran dari ketiga tokoh tersebut, dan secara insidental sesuai kebutuhan. *Manhaj al-Fikr* sangat diperlukan untuk memberi pencerahan pengetahuan dan wawasan kepada santeri dan masyarakat tentang pentingnya bersikap moderat menggunakan perspektif multikultural.

Dengan *manhaj al-fikr* diharapkan santeri memiliki sikap anti radikal dan lebih toleran dalam memandang perbedaan kultur.

Beberapa materi yang disampaikan secara lisan seperti konsep: Islam *rahmatan li al-'alamin*, khalifah yang adil, *baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur*, *al-ta'awun*, *musyawarah*, *al-musawa*, *al-'adl*, *al-ta'aruf*, *al-ta'addudiyat*, *al-tanawwu'*, *al-tasamuh*, *al-rahmah*, *al-afw*, *al-ihsan*, dan lain-lain. Materi-materi yang disampaikan cukup bagus, namun belum terbukukan.

Gagasan Rifatul Mahfudhoh & Moh. Yahya Anshari (1978) berikut ini yang mencakup nilai dasar, implementasi, dan tujuan, dapat menginspirasi menyusun kurikulum Pendidikan Multikultural:

Tabel 4.4

Pendidikan Islam Multikultural

Kategori	Materi
Nilai Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tawhid</i>. Sebagai ruh bagi manusia. Cara pandang yang untuk merealisasi ketauhidan Tuhan dalam relasi antar manusia. Tuhan sumber utama kehidupan manusia; sesama manusia adalah bersaudara di bawah naungan tauhid (<i>ukhuwah basyariyyah</i>). 2. <i>Ummah</i> (kehidupan bersama). Setiap orang memiliki akses yang sama sebagai penghuni alam semesta, hidup berdampingan, mengikat hubungan sosial harmonis kepada kelompok, komunitas, dan masyarakat luas. 3. <i>Rahmah</i> (kasih sayang). Mencontoh sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, manusia diciptakan Tuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi atas dasar semangat cinta dan kepedulian.

	4. <i>Al-musawa (egalitarianism)</i> . Semua manusia setara di hadapan Allah, meskipun Allah menciptakan perbedaan seks, gender, ras, warna kulit, dan agama, harus disikapi dengan semangat persamaan hak dan kewajiban.
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ta`aruf, ihsan</i> (saling mengenal, berlaku baik). Kesadaran dan kemauan untuk hidup bersama, berdampingan, bertetangga dengan orang dari budaya, etika, dan agama berbeda untuk memperluas hubungan sosial, saling memberi, dan rela berkorban. 2. <i>Tafahum</i> (saling memahami). Kesadaran adanya perbedaan nilai, sehingga harus saling melengkapi untuk menciptakan hubungan dinamis, bekerja sama dengan kelompok berbeda keyakinan. Sahabat sejati adalah partner dialog yang menunjukkan komitmen kebersamaan, memahami perbedaan, dan keunikan. 3. <i>Takrim</i> (saling menghormati). Saling menghormati adalah nilai-nilai universal dari setiap agama dan budaya, bersedia mendengar perbedaan pendapat dan menghormati perbedaan individu/kelompok. 4. <i>Fastabiq al-khayrat</i> (kompetisi yang sehat). Persamaan dalam perbedaan mendorong lahir komunikasi dan kompetisi antar individu dan kelompok untuk meraih kualitas dan prestasi setiap aspek kehidupan sosial. 5. <i>Amanah</i>. Menumbuhkan saling percaya. 6. <i>Husn al-dzan (positive thinking)</i>. Berhati-hati dalam memvonis seseorang atau sesuatu (<i>truth claim</i>), berusaha melakukan klarifikasi dari sumber aslinya. 7. <i>Tasamuh</i> (toleransi). Menghormati perbedaan dan keragaman agama, budaya, dan etnisitas. 8. <i>Afw, maghfirah</i> (sifat pemaaf). Suka memaafkan berarti melupakan segala bentuk kesalahan, kejahatan, yang dilakukan oleh seseorang baik sengaja maupun, baik sedang mempunyai kekuasaan maupun tidak. 9. <i>Sulh</i> (rekonsiliasi). Memilih jalan menyepakati konsep kebenaran, kedamaian, hukum setelah ada pertikaian. 10. <i>Ishlah</i> (resolusi konflik). Hubungan kuat antara dimensi psikologis dan politik untuk mencari jalan tengah yang saling menguntungkan, menyelesaikan perselisihan.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salam (peace)</i>. Menjaga dan membangun perdamaian. 2. <i>Layn</i> (anti kekerasan). Perbuatan, perkataan, sikap, perilaku untuk menjaga fisik, mental, sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. 3. <i>`Adl</i> (keadilan). Kesetaraan sosial untuk menjaga, berbagi, bersikap moderat merespon perbedaan, terbuka dalam berperilaku dan bersikap.

Kedua, *Manhaj al-Haraki*. *Manhaj al-Haraki* merupakan *multicultural action/habituation*. Jadi sebenarnya lebih pada

memotivasi santeri agar mau bergerak, dinamis, aktif, energik, berubah ke arah yang lebih baik, kreatif, transformatif, progresif, berkembang menuju kemajuan, dan tetap semangat. Banyak kerugian yang diperoleh disebabkan seseorang tidak mau bergerak, bukan tidak mampu bergerak. Oleh karena itu, perlu dimotivasi terus menerus agar mau bergerak sehingga bergerak menjadi suatu kebiasaan. Secara filosofis, *manhaj al-haraki* dimaksudkan untuk melawan kemalasan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, kemunduran, kejumudan, kekerdilan, kepicikan, kekhawatiran/ ketakutan yang tidak beralasan, menimbulkan kesehatan, kebugaran, keceriaan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Anak-anak muda milenial, harus dimotivasi dan ditempa untuk mampu bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman globalisasi, tidak loyo dan tidak menunggu nasib. Gerakan-gerakan fisik dalam *manhaj al-haraki* dapat berbentuk senam, nyanyian, tepuk tangan, tepukan, sorakan, atau ucapan yel-yel, tergantung kreativitas motivator memandu para santerinya. Dari gerakan itu, harus diawali atau diakhiri dengan yel-yel *manhaj al-haraki* dari Al-Mizan seperti sudah digambarkan di atas, agar santeri memiliki kebanggaan atas identitas dirinya, sehingga mantap untuk bergerak maju, berkompetisi, melakukan perubahan ke arah lebih baik. Pembiasaan bergerak ini meminimalisir, mengonpenasasi perilaku radikalisme.

Ketiga, pengajaran kitab kuning. Sebagaimana dipaparkan di atas, ada enam kitab kuning yang diajarkan kepada santeri, masing-masing kitab mengandung pendidikan multikultural. Untuk menilai ada tidaknya kandungan Pendidikan Multikultural dalam kitab tersebut, penulis menggunakan tujuh standar indikator: keterbukaan, musyawarah, kemanusiaan, toleransi, tolong menolong, keadilan, persamaan, persaudaraan (Muthoharoh, 2011: 56-77):

Tabel 4.5
Pendidikan Multikultural dalam Pengajaran Kitab Kuning

Nama Kitab	Pend. Multikultur	Terkandung dalam bab
<i>Hadist al-Arbain</i>	1.Kemanusiaan 2.Toleransi 3.Menolong 4.Keadilan 5.Persaudaraan	Meninggalkan yang tidak manfaat, mencintai sesama Muslim, berkata baik atau diam, tidak marah, berbuat baik dalam segala urusan, memiliki sifat malu, tidak dzalim, bersedekah, tidak berbuat keresahan & kerusakan, menuduh tanpa bukti, dengki, membantu sesama, menundukan hawa nafsu.
<i>Safinah al-Najah</i>	1.Kemanusiaan 2.Toleransi 3.Menolong 4.Persaudaraan	Shalat, puasa, zakat, haji jenazah
<i>Fath al-Qarib</i>	1.Kemanusiaan 2.Toleransi 3.Menolong 4.Persaudaraan	Shalat, puasa, zakat, jenazah, haji, muamalat (seperti: jual beli, warisan, wasiat)
<i>Ta'lim al-Mutaallim</i>	1.Musyawah 2.Keadilan 3.Menolong	Kasih sayang, nasihat, dan musyawarah
<i>Taysir al-Khalaq</i>	1.Kemanusiaan 2.Toleransi 3.Menolong 4.Keadilan 5.Persaudaraan	Adab guru dan santeri, dendam, tunaikan hak orang tua, kerabat, tetangga, adab bergaul, rukun, persaudaraan, adil, jujur, amanah, berbudi luhur, pemaaf, dermawan, rendah hati, tidak dengki, tidak ghibah, tidak adu domba, tidak sombong, tidak ghurur, tidak dzalim.
<i>Riyadh al-Shalihin</i>	1.Keterbukaan 2.Musyawah 3.Kemanusiaan 4.Toleransi 5.Menolong 6.Keadilan 7.Persaudaraan	1. Perintah: menunaikan amanat, mengembalikan hak orang, menjunjung kehormatan umat Islam, kasih sayang, mendamaikan yang sengketa, menyayangi anak yatim, perempuan, orang lemah dan miskin, menggauli isteri dengan baik dan berbuat adil terhadap mereka, memberi nafkah untuk keluarga,

		<p>dermawan, baik kepada siapapun, silaturahmi, baik kepada kenalan orangtua, kerabat, isteri, yang pantas dihormati, memuliakan keluarga Rasulullah, tidak menipu menghormati ulama, orang terpandang dan yang berjasa, bergaul dengan sesama, tawadhu, rendah diri, santun, sabar, ramah, pemaaf, pemimpin adil, sikap lunak, kasih sayang, hemat, menasihati, berbuat maslahat, mementingkan rakyatnya.</p> <p>2. Larangan: dzalim, makan harta anak yatim, membuka rahasia, durhaka kepada orangtua, riya, munafik, putus persaudaraan, takabur, riba menyakiti orang shaleh, lemah, dan miskin, adu domba, dengki, dusta, jadi saksi palsu, mencaci, membenci, mengutuk, menggunjing, mendengar gunjingan, buruk sangka, menyakiti, menghina, menipu, khianat, diam lebih dari tiga hari, berbisik di depan orang, mengkafirkan orang, menangguk bayar utang.</p>
--	--	---

Berdasarkan paparan tersebut, materi yang mengandung pendidikan multikultur itu sedikit demi sedikit diinternalisasi oleh santeri, apalagi metode pengajaran tersebut disampaikan oleh K. H. Maman Imanul Haq, K.H. Mas Zaenal Muhyidin, dan H. Asep Zaenal Aripin, dalam suasana relaks, menyenangkan, dan terjadi diskusi dan tanya jawab dalam forum tersebut.

Keempat, figur ideal multikulturalisme. Berdasarkan temua FGD di kalangan asatidz maupun santeri dikemukakan, figur ideal multikultural Kyai di pondok pesantren Al-Mizan, yaitu K.H. Maman Imanul Haq merupakan faktor penting dalam internalisasi pendidikan multikultural para santeri. Dalam setiap pengajaran kitab, pembinaan Suluk Mizani, khutbah, da'wah yang disampaikan oleh Kyai Maman,

semua santeri respek, karena beliau merupakan sosok ideal yang kharismatik, orator yang handal, da'i sejuta ummat yang memukau siapapun, bukan hanya di kalangan santeri, tetapi juga di kalangan pejabat, pengusaha, intelektual, perempuan, laki-laki, segala umur dan segala lapisan masyarakat. Gaya orasinya yang bagus, uraiannya sistematis, suara dan intonasinya tepat, humor dan wawasan akademiknya mumpuni, dalil-dalil diucapkannya fasih, perangnya menebarkan kekraban dan keteduhan, gaya humornya cerdas dan apik, senyumnya terkulum menandakan keramahannya, visinya jauh ke depan, ucapannya mudah dicerna oleh segala usia dan seluruh lapisan masyarakat, dan hampir setiap kata yang ditekankannya mudah diingat dan tersugesti untuk diamalkan. Tokoh muda kharismatik yang egaliter seperti ini hampir tidak ada duanya, khususnya di wilayah III Cirebon. Figur ideal santeri terhadap Kyai Maman ini menjadi faktor pendukung dalam menginternalisasi pendidikan multikultural. Oleh karena kehebatannya sebagai orator da'i, dan politisi dari seorang aktifis organisasi masa, maka dapat mengantarkan Kyai Maman menjadi anggota DPR dengan mudah karena masyarakat telah mengenalnya.

Kelima, kegiatan keagamaan. Faktor penting lainnya adalah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan untuk internal pondok pesantren maupun dengan masyarakat, seperti: manasik haji untuk semua tingkatan (TK, SD, Madrasah Tsanawiyah, SMA, dan SMK), peringatan hari besar Islam, program tahfidz al-Qur'an, istighatsah dengan masyarakat, shalat berjamaah dengan masyarakat, pertunjukan seni multikultur dengan masyarakat pada Festival Al-Mizan, diskusi agama, muthalaah pengajaran agama, dan lain. Berikut beberapa foto kegiatan keagamaan santeri:





Manasik Haji Santeri Putera Puteri



Kegiatan Suluk Mizani



Santeri Tahfidz



Jama'ah Santeri Puteri



Santeri sedang Muthala'ah Pelajaran



Shalat Berjama'ah & Taushiyah



Shalat Istisqa dan Festival Al-Mizan dngan Masyarakat

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dengan menggunakan metodologi penelitian seperti yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seting sosial Pondok pesantren Al-Mizan sebagai berikut:

Pondok pesantren Al-Mizan yang beralamat di Jl. Raya Timur No. 1/456 Jatiwangi Kabupaten Majalengka, didirikan oleh keluarga pasangan H. Kosim Faozan dan Hj. Umi Kulsum sebagai mukaif, dan bersama dengan H. Ahmad Fauzi pada tahun 1999.

Nama Al-Mizan terinspirasi dari ayat al-Quran yaitu: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”* (QS. Al-Rahman [55]:9). Dua nilai kehidupan yang dipetik dari ayat itu adalah “menegakkan keadilan dan menolak kehancuran tatanan Sunatullah”.

Pondok pesantren ini memiliki visi, misi, tujuan berbeda dengan pesantren lain, yakni menegakkan keadilan, kesetaraan, keseimbangan, persaudaraan, kemitraan dalam membangun masyarakat yang berperadaban.

Di bidang pendidikan, mengelola pendidikan formal, non formal, dan informal. Lembaga pendidikan formal antara lain: Taman Kanak-kanak (TK) Islam, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.), Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lembaga pendidikan non formal antara lain: pondok pesantren, Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Balai Latihan Kerja (BLK), dan SMA Terbuka. Lembaga pendidikan informal antara lain: Keluarga Alumni Al-Mizan (KALAMI), pengembangan bakat pencak silat dan karate disebut Barisan Takut Allah (BASTOH), pengembangan kecakapan

bahasa disebut Al-Mizan English Club (AEC), dan tahfidz al-Qur'an.

Di bidang Da'wah & Sosial, mengelola lembaga: Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM), Majelis Taklim, Paguyuban Shalawat Akar Jati, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Rumah Perlindungan Anak (RPA) Ummi Maktum, dan Lembaga Zakat Infak Shadaqah (LAZIS) Al-Mizan.

Di bidang Ekonomi, mengelola Mizan Mart, Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN), Bank Mini Syariah SMK Ma'arif Al-Mizan, Tour & Travel Al-Mizan.

2. Pendidikan Multikultural di pondok pesantren Al-Mizan diterapkan melalui kurikulum terintegrasi (*integrated curriculum*) dan kurikulum tersendiri (*separated curriculum*). Dalam *separated curriculum*, pendidikan multikultural diberikan secara eksplisit dalam materi *Suluk Mizani*. Dalam *integrated curriculum*, pendidikan multikultural secara implisit sudah terkandung dalam identitas pondok pesantren, profil pengasuh, dan pengajaran kitab. Dengan demikian, Pendidikan Multikultural di pondok pesantren Al-Mizan mencakup empat bentuk: (1) *Suluk Mizani*; (2) Identitas pondok pesantren, mencakup: dasar, visi, misi, tujuan, dan motto juang; (3) Profil Pengasuh; (4) pengajaran kitab kuning.

Pertama, *Suluk Mizani* adalah merupakan pendidikan multikultural secara eksplisit dan khas ala pondok pesantren Al-Mizan yang utama dan komprehensif, diberikan kepada santri sejak masuk pondok ini, dengan delapan materi secara berurutan: (1) Makna Al-Mizan, (2) Makna logo, (3) Mars Al-Mizan, (4) Hymne Al-Mizan, (5) *The Five Spirit of Al-Mizan*, (6) Guru-guru utama, (7) *Manhaj al-Fikr*, dan (8) *Manhaj al-Haraki*.

Kedua, Identitas pondok pesantren ini berbeda dengan pondok pesantren lainnya. Identitas ini untuk menegaskan dasar, visi, misi, dan tujuan sebagai pondok pesantren yang mengusung moto perjuangan: "Al-Mizan untuk Keadilan dan Harmoni", yang memiliki lima spirit perjuangan tercakup dalam "*The Five Spirit of Al-Mizan*": Keilmuan, Keikhlasan, Kemandirian, Kebersamaan,

dan Kemashlahatan, dan memiliki moto kerja: *Trust, Partnership, Share, Harmonize, Network, Collaborate, Support, dan Work*, yang merupakan uraian dari kata *TEAMWORK*.

Ketiga, Profil para pengasuh pondok pesantren Al-Mizan secara implisit mendukung, memengaruhi, bahkan mewarnai penerapan Pendidikan Multikultural.

Keempat, Pengajaran kitab kuning kepada santeri yaitu *Hadits Arbain, Safinah al-Najah, Fath al-Qarib, Ta'lim al-Muta'alim, Taysir al-Khalaq, dan Riyadh al-Shalihin*, secara implisit telah mengandung Pendidikan Multikultural.

3. Sikap dan perilaku santeri di lingkungan pondok pesantren Al-Mizan berdasarkan empat indikator radikalisme dari Yusuf Qardhawi (2009), disimpulkan bahwa: (1) Hampir tidak ada santeri yang terlibat memiliki sikap dan perilaku fanatis terhadap satu pendapat, tanpa mengakui pendapat lain; (2) Hampir tidak ada santeri yang terlibat dalam sikap dan perilaku yang mewajibkan orang lain melaksanakan yang bukan kewajibannya; (3) Sangat sedikit dan dapat dihitungkan jari santeri yang memiliki sikap dan perilaku keras dan kasar yang beralasan, tetapi bukan sikap dan perilaku keras dan kasar yang tidak beralasan dan itu pun tidak mengarah kepada sikap dan tindakan radikalisme, karena mereka segera dapat ditangani dengan pendidikan dan bimbingan yang terus menerus di pondok pesantren; (4) Hampir tidak ada santeri yang terlibat memiliki sikap dan perilaku menganggap kafir (musuh) kepada orang lain yang tidak sepaham.
4. Internalisasi Pendidikan Multikultural santeri untuk menangkal sikap radikalisme melalui tiga cara: (1) Manhaj al-Fikr, (2) pengajaran kitab, dan (3) figure ideal. Ketiga cara ini sebagai internalisasi *multicultural knowledge*. Untuk menangkal perilaku radikalisme melalui dua acara: (1) Manhaj al-Haraki, (2) kegiatan keagamaan. Kedua cara ini sebagai internalisasi *multicultural action/habituatation*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran untuk perbaikan ke depan, antara lain:

1. Bagi pihak yayasan Al-Mizan, Suluk Mizani merupakan Pendidikan Multikultural khas ala pondok pesantren Al-Mizan, dalam kegiatan *Manhaj al-Haraki* sudah bagus, kompak, bahkan kegiatan tersebut disenangi oleh santeri. Respon tersebut mungkin terjadi karena faktor motivatornya yang bagus, terutama ketika diberikan langsung oleh K.H.Maman Imanul Haq sebagai figur ideal yang diidolakan oleh santeri, namun bisa saja jika diberikan oleh orang yang tidak kompeten dan kurang disegani oleh santeri, keberhasilannya masih perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, perlu ada kaderisasi kepada ustadz lainnya dan kurikulumnya harus jelas tertulis jelas untuk memberikan *Manhaj al-Haraki*. *Manhaj al-Fikr* sangat penting sebagai *multicultural knowledge* bagi santeri, namun harus terbuka agar menjadi khazanah Pendidikan Multicultural yang menjadi rujukan pondok pesantren lain.
2. Bagi peneliti lanjutan, perlu melakukan penelitian serupa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk dapat mengukur dengan lebih akurat, seberapa besar efektivitas dan signifikansi pengaruh Pendidikan Multikultural dengan metode Suluk Mizani terhadap sikap dan perilaku anti radikalisme santeri, dan dapat menentukan dengan pasti faktor-faktor yang diinternalisasi dari Suluk Mizani terhadap sikap dan perilaku anti radikalisme santeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq, D. (2003). *Emoh Sekolah Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual: Menuju Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: INSPEAL Press.
- Ali, Abdullah. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Ali. (2011). *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banks, James A & Cherry A Mc Gee Banks. *Multicultural Education: Issues and Perspective*. University of Washington: Wiley
- Baruttamam. (2015). *Pesantren Nalar dan Tradisi: Geliat Santeri Menghadapi ISIS, Terorisme, dan Transnasionalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Benyamin, Olan. (2016). *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: Indeks.
- Budi, Nursulistyo, Salamun, dkk. (2014). *Implementasi Pendidikan Multikultural di SMA Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Cresswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Susanti, Rini. (2013). *Menguak Multikulturalisme di Pesantren: Telaah atas Pengembangan Kurikulum*. Jurnal ADDIN, Vol 7.No 1, Februari 2013.
- El Mahdy, Muhaimin. (2015). "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural" dalam [http:// artikel. us/muhaemin 6-04.html](http://artikel.us/muhaemin_6-04.html), diakses 27 Mei 2015.
- Endang, Turmudzi & Riza Sihbudi. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Fatimah, Siti & Wirdanengsih. (2016). *Gender dan Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Abdul. (2017). *Model Pendidikan Islam Anti radikalisme di Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Kab. Brebes*, Thesis. Semarang: UIN Walisongo.

- Harahap, Syahrin. (2017). *Upaya Mencegah Radikalisme dan Teroris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jainuri, Ahmad. (2016). *Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Journal of Education and Research Vol 2 No 10 October 2014.
- Jurnal Religi Volume 6, Nomor 1, April 2015; ISSN: 1978-306X; 116-118.
- Kawuryan, Sekar Purbarani. (2009). *Bahan Ajar Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: UNY.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, Choirul. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mutohar, Ahmad, Nurul Anam. (2013). *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam & Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naim, Ngainun & Achmad Sauqi. (2017). *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nuha, Ulin. (2014). *Geneologi dan Ideologi Gerakan Radika Islam Kontemporer di Indonesia*. Jurnal Inteligensia, Vol.03 No.01. Januari-Juni.
- Nuha, Ulin. (2014). Jurnal Intelegensia – Vol. 03 No. 01 Januari – Juni 2014.
- Parsudi, Suparlan. (2002). *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural: Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Purwasito, Andrik. (2003). *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Rachman, Budhy Munawar. (2007). *Islam dan Pluralisme: Nurcholis Madjid*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Rachman, Budhy Munawar. (2017). *Pendidikan Karakter*. Asia Foundation.
- Raihani. (2016). *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rois, Ahmad. (2013). Jurnal Episteme Vol 8 No 2 Desember 2013.
- Sahasrad, Herdi & Al Chaidar. (2017). *Fundamentalisme Terorisme dan Radikalisme*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Samovar, Larry A & Richard E Porter. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Solang, Izal., dkk. (tanpa tahun). *Peran MA/Ponpes dan Perguruan Tinggi dalam Menangkal Radikalise*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Sutarno. (2007). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Depdiknas.
- Tilaar, HAR. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT GramediaWidiasarana.
- Tim. (2007). *Paham-paham Keagamaan Liberal*. Jakarta: Puslitbang Departemen Agama RI.
- Ubaidillah, Abdul Rozak. (2006). *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE. UIN Syarif Hidayatullah.
- Yasid, Abu. (2018). *Paradigma Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Zaeni, A. Wahid. (1995). *Dunia Pemikiran Kaum Santri*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY.
- Ziemek, Manfred. (1986). *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Buche B Sundjojo (Terj.). Jakarta: P3M.

BIODATA TIM PENELITI

Peneliti bernama Eti Nurhayati adalah seorang Professor Bidang Psikologi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, email: etinurhayati@syekhnrjati.ac.id.

Pendidikan formal penulis adalah Doktor (S3) jurusan BK UPI Bandung tahun 2010, Magister (S2) jurusan Psikologi UNPAD Bandung tahun 2000, dan Sarjana (S1) Tarbiyah IAIN Jakarta tahun 1985.



Penulis bersuami dengan H. Abdus Salam Dz, seorang Professor Bidang Manajemen SDM di institusi yang sama, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai tiga orang putera: (1) Khairil Fikri, sudah menikah, memiliki dua orang putera dan seorang puteri, dan bertugas di Pertamina Pusat Jakarta; (2) Nafis El-Fariq, sudah menikah, memiliki seorang putera, dan bertugas di BPK Pusat Jakarta, (3) Faiz Muttaqy, mahasiswa PMDSU Program Doktor (S3) Jurusan Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan & Perminyakan ITB Bandung.

Beberapa buku yang sudah diterbitkan: (1) Pembelajaran dalam Berbagai Seting. (2) Bimbingan Keterampilan dan Kemandirian Belajar. (3) *Smart Step of Learning in Higher Education*. (4) Sukses Belajar di Perguruan Tinggi. (5) Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat. (6) Pendidikan dan Konseling di Era Global. (7) Bimbingan, Konseling, dan Psikoterapi Inovatif. 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (8) Psikologi Pendidikan Inovatif. 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (9) Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif. 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (10) Psikologi Komunikasi Antar Gender. 2018. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Beberapa karya ilmiah hasil riset: (1) Metode Mengenalkan Tuhan “Allah” kepada Anak Usia SD. (2) Sistem Penilaian Pendidikan di M.Ts. (3) Kontribusi Literatur Psikologi terhadap Kompetensi Keguruan Mahasiswa FITK. (4) Prototype Keluarga Pada Ibu Pekerja dan Implikasi terhadap Pendidikan Anak. (5) Prinsip Kafa’ah & Sensitivitas Gender dalam Menangkal Tindak Kekerasan Suami terhadap Isteri. (6) *Self Esteem* dan Motivasi Berprestasi Wanita Karir. (7) Konsep Diri dan Motivasi Berprestasi Wanita Karir. (8) Hubungan Gaya Pengasuhan dan Pembentukan Identitas Agama Mahasiswa. (9) Sistem Pendidikan Islam bagi Anak Usia Dini. (10) Model Pendidikan untuk Perempuan. (11) Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Berbasis Kearifan Lokal. (12) Model Bimbingan Keterampilan dan Kemandirian Belajar bagi Mahasiswa. (13) Penanaman Nilai-nilai Keislaman Bagi Anak Usia Dini. (14) Model *Parenting* untuk Membentuk Karakter Islami Anak Usia Dini. (15) Muatan Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam Kitab-kitab Salafi.

Peneliti bernama lengkap Yayah Nurhidayah, lahir di Jatiwangi, 20 April 1962. Penulis adalah seorang Dosen pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, periset, dan pegiat pada Pusat Studi Gender. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1987, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung tamat tahun 2003, dan Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung 2015.



Penulis bersuami dengan Dr. Eben Sahlan, M.Si., seorang Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Cirebon, dan dikaruniai seorang puteri semata wayang bernama Nur-Aulia, yang telah memberikan dua orang cucu yang sehat dan pintar.

Beberapa karya ilmiah hasil riset, antara lain: (1) Akses terhadap Komunikasi Massa dan Sikap Politik Masyarakat; (2) Bias Gender dalam Komunikasi di Lingkungan Pesantren; (3) Peran Perempuan Nelayan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Sosial Perempuan di Pantai Utara Cirebon; (4) Representasi Perempuan dalam Media dan Bahasa: Analisis Semiotik atas Film Ayat-ayat Cinta; (5) Pengaruh Komunikasi Orangtua tentang Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Nilai-nilai Religiusitas Terhadap Perilaku Seksual Remaja; (6) Perbedaan Gender dalam Pola Penggunaan Telepon Seluler di Kalangan Siswa MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon: Analisis Motif dan Kepuasan Komunikasi; (7) Pola Komunikasi Perempuan Pesisir: Studi Etnografi Komunikasi pada Perempuan Pesisir Cirebon; (8) Revitalisasi Kesenian Tari Topeng Sebagai media Dakwah; (9) Muatan Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam Kitab-kitab Salafi: Studi di Pondok Pesantren BIMA Cisaat – Cirebon.

Karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal: Feminisme dalam Perspektif Islam (Jurnal Equalita, 2007); Citra Perempuan dalam Media (Jurnal Equalita, 2008); Profil Perempuan dalam Film Ayat-ayat Cinta (Jurnal Equalita, 2009); Tari Topeng sebagai Media Dakwah (Jurnal Dakwah UIN Bandung, 2017); Psikologi Komunikasi Antar Gender (Buku. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).



PERANAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
DALAM MENANGKAL SIKAP DAN PERILAKU RADIKALISME SANTERI
DI PONDOK PESANTREN AL-MIZAN MAJALENGKA

Prof. Dr. Hj. Eli Nurhayati, M. Si
Dr. Yayah Nurhidayah, M. Si

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019

Menjadi radikal tampaknya merupakan sebuah tren baru di kalangan remaja, karena memiliki pemikiran, sikap, dan perilaku radikal dianggap keren, gagah, berani, kritis, dinamis, berjiwa muda, dan energik. Pendidikan multikultural di pondok pesantren dipandang efektif menangkal sikap dan perilaku radikal. Pondok pesantren Al-Mizan dipilih sebagai objek penelitian karena telah menerapkan Pendidikan Multikultural.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran: (1) seting sosial pondok pesantren, (2) pelaksanaan pendidikan multikultural, (3) sikap dan perilaku santeri di pondok pesantren, (4) internalisasi pendidikan multikultural santeri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan FGD, dan teknik analisis data secara kualitatif dalam bentuk narasi.

Kesimpulan penelitian: (1) Seting sosial pondok pesantren Al-Mizan Jatiwangi – Majalengka, didirikan tahun 1999 oleh H. Ahmad Fauzi beserta keluarga H. Kosim Faozan dan Hj. Umi Kulsum sebagai muwakif. Nama Al-Mizan terinspirasi dari QS. Al-Rahman [55]:9 yang mengandung nilai keadilan dan menolak kehancuran. Di bidang pendidikan formal mengelola: TK Islam, SDIT, M.Ts., SMA Islam, SMK; Di pendidikan non formal mengelola pondok pesantren, DTA, PKBM, BLK, dan SMA Terbuka; Di pendidikan informal mengelola KALAMI, BASTOH, AEC, dan tahfidz al-Qur'an. Di bidang da'wah sosial mengelola DKM, MT, Paguyuban Shalawat Akar Jati, LKSA, RPA, dan LAZIS. Di bidang Ekonomi, mengelola Mizan Mart, KOPONTREN, Bank Mini Syariah, dan Tour & Travel Al-Mizan. (2) Pendidikan Multikultural di pondok pesantren Al-Mizan mencakup empat bentuk, yaitu: *Suluk Mizani*, identitas pondok pesantren, profil pengasuh, pengajaran kitab kuning. (3) Sikap dan perilaku santeri di lingkungan pondok pesantren hampir tidak ada yang memiliki sikap dan perilaku fanatis terhadap satu pendapat, tanpa mengakui pendapat lain; mewajibkan orang lain melaksanakan yang bukan kewajibannya; keras dan kasar yang tidak beralasan, dan menganggap kafir (musuh) kepada orang lain yang tidak sepaham. (4) Internalisasi Pendidikan Multikultural santeri untuk menangkal sikap radikalisme melalui *manhaj al-fikr*, pengajaran kitab, dan figure ideal sebagai internalisasi *multicultural knowledge*, dan untuk menangkal perilaku radikalisme melalui *manhaj al-haraki* dan kegiatan keagamaan, sebagai internalisasi *multicultural action/habituat*ion.

ISBN : 978-623-944-146-3



LPPM
Membangun Wacana Baru

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019